



# LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024



# TAHUN 2025





## KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas curahan rahmat dan limpahan karunia-Nya, sehingga dapat tersusun Buku **Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2024**, yang secara teknis mengacu kepada ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa “Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”.

Sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan transparan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) maka LPPD ini disusun dalam rangka melaporkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamongan, yang memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah terdiri atas Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu Capaian Kinerja Makro, Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, dan Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (SAKIP), selain substansi tersebut LPPD juga memuat laporan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Lamongan ini dibuat, untuk menjadi periksa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

Lamongan,                   Maret 2025

**BUPATI LAMONGAN**

**Dr. YUHRONUR EFENDI., MBA., M.Ek.**



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I     1	
PENDAHULUAN .....	1
1.1.     Latar Belakang .....	1
1.1.1.    Penjelasan Umum .....	1
1.1.2.    Perencanaan Pembangunan Daerah .....	16
1.1.3.    Penerapan Standar Pelayanan Minimal .....	44
BAB II    49	
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH .....	49
2.1.     Capaian Kinerja Makro .....	49
2.2.     Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan .....	49
2.3.     Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah .....	50
BAB III   86	
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN .....	86
3.1.     Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten/Kota .....	111
3.1.1.    Target Kinerja .....	111
3.1.2.    Realisasi .....	121
3.2.     Tugas Pembantuan Provinsi Yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten/Kota .....	163
3.1.3.    Target Kinerja .....	163
3.1.4.    Realisasi .....	167
3.3.     Permasalahan Dan Kendala .....	210
3.4.     Saran Dan Tindak Lanjut .....	214
BAB IV   218	
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL .....	218
BAB V     293	
PENUTUP .....	293



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

##### **1.1.1. Penjelasan Umum**

###### **a. Undang-Undang Pembentukan Daerah**

Dasar Hukum Pembentukan Daerah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan



Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Surat Menteri Dalam Negeri RI Tanggal 26 Januari 2022 Nomor. 120.04/926/OTDA Perihal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 dan Laporan Hasil Pra Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2021 terhadap LPPD Tahun 2020;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2024;
21. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2024.

**b. Data Geografis Wilayah**

Kabupaten Lamongan memiliki luas wilayah  $\pm 1.752,21$  km<sup>2</sup> atau setara dengan 175.221 Ha atau  $\pm 3.67\%$  dari luas



wilayah Provinsi Jawa Timur. Mempunyai panjang garis pantai sepanjang 47 km dan wilayah perairan laut seluas 902,4 km<sup>2</sup>, apabila dihitung 12 mil dari permukaan laut. Kabupaten Lamongan terdiri dari 27 Kecamatan dengan rincian sebanyak 462 Desa dan 12 Kelurahan.

Secara astronomis, Kabupaten Lamongan terletak pada koordinat 6°51'54"-7°23'6" Lintang Selatan dan berada di antara 112°4'41"- 112°33'12" Bujur Timur. Selanjutnya jika dilihat berdasarkan wilayah administrasi, Kabupaten Lamongan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Laut Jawa
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Gresik
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban

Daratan Kabupaten Lamongan dibelah oleh Sungai Bengawan Solo dan secara garis besar daratannya dibedakan menjadi 3 karakteristik yaitu:

- Bagian Tengah-Selatan merupakan dataran rendah yang relatif subur yang membentang dari Kecamatan Kedungpring, Babat, Sukodadi, Pucuk, Lamongan, Deket, Tikung, Sarirejo, Kembangbahu dan Sugio
- Bagian Selatan dan Utara merupakan daerah pegunungan kapur berbatuan dengan tingkat kesuburan sedang. Kawasan ini terdiri dari Kecamatan Mantup, Sambeng, Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Modo, Brondong, Paciran dan Solokoro.
- Bagian Tengah-Utara merupakan daerah Bonorowo yang merupakan daerah produktif namun rawan banjir. Kawasan ini



meliputi Kecamatan Sekaran, Maduran, Laren, Karanggeneng, Kalitengah, Turi, Karangbinangun dan Glagah.

Topografi/ketinggian adalah kondisi ketinggian suatu wilayah dari atas permukaan laut yang dinyatakan dengan mdpl (meter di atas permukaan laut). Kondisi topografi Kabupaten Lamongan berkisar antara 0- 186 meter di atas permukaan laut. Ketinggian tertinggi berada di Kecamatan Ngimbang yang terletak 186 meter di atas permukaan laut. Secara administrasi Kabupaten Lamongan terdiri dari 27 kecamatan yang terbagi menjadi 3 karakteristik daratan berdasarkan aliran sungai bengawan solo yaitu:

- Bagian tengah selatan merupakan daratan rendah yang relatif agak subur yang membentang dari Kecamatan Kedungpring, Babat, Sukodadi, Pucuk, Lamongan, Deket, Tikung, Sugio, Maduran, Sarirejo dan Kembangbahu.
- Bagian utara dan selatan yang merupakan pegunungan kapur berbatu-batu dengan kesuburan sedang meliputi Kecamatan Mantup, Sambeng, Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Modo, Brondong, Paciran, dan Solokuro.
- Bagian tengah utara yang merupakan daerah rawan banjir meliputi Kecamatan Sekaran, Laren, Karanggeneng, Kalitengah, Turi, Karangbinangun, Glagah.

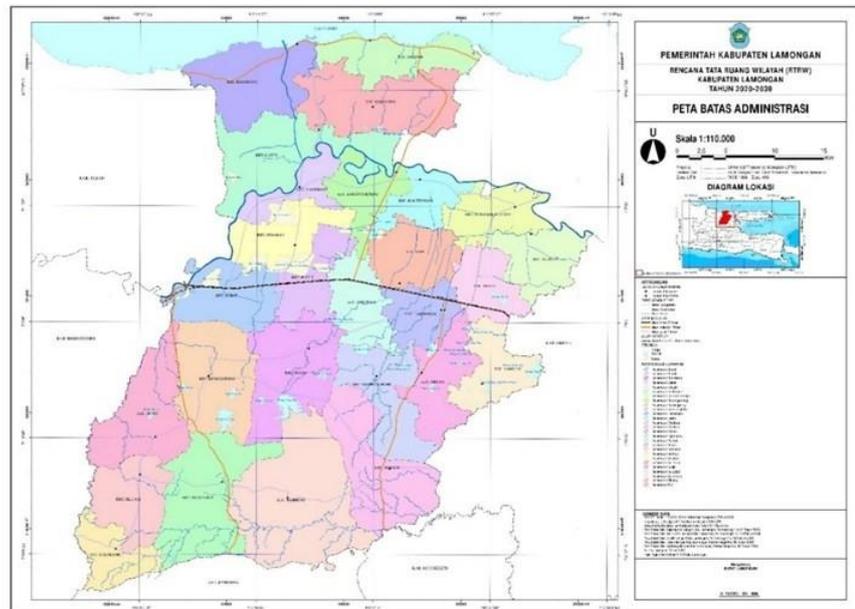
Dilihat dari tingkat kemiringan tanahnya, wilayah Kabupaten Lamongan merupakan wilayah yang relatif datar, karena hampir 72,45% lahannya adalah datar atau dengan tingkat kemiringan 0 – 2% yang tersebar di Kecamatan Lamongan, Deket, Turi, Sekaran, Tikung, Pucuk, Sukodadi,



Babat, Kalitengah, Karanggeneng, Glagah, Karangbinangun, Mantup, Sugio, Kedungpring, Sebagian Bluluk, Modo dan Sambeng, sedangkan hanya sebagian kecil dari wilayahnya sangat curam, atau kurang dari 1% (0,16%) yang mempunyai tingkat kemiringan lahan 40% lebih.

Kondisi tata guna tanah di Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut: baku sawah (PU) 44.08 Hektar, Baku sawah tidak resmi (Non PU) 8.168,56 Hektar, sawah tadah hujan 25.407,80 Hektar, Tegalan 32.844,33 Hektar, pemukiman 12.418,89 Hektar, Tambak/kolam/waduk 3.497,72 Hektar, kawasan hutan 32.224,00 Hektar, kebun Campuran 212,00 Hektar, Rawa 1.340,00 Hektar, Tanah tandus / kritis 889,00 Hektar dan lain-lain 15.092,51 Hektar.

### Peta Wilayah Kabupaten Lamongan



Sumber Data : Dokumen RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2039

### c. Informasi Umum Data Kependudukan

Tahun 2024 jumlah penduduk kabupaten Lamongan sebanyak 1 juta 367 ribu 503 jiwa. Pendudukan berjenis kelamin laki-laki sebanyak 684 ribu 425 jiwa atau 50,05 persen dan 683 ribu 078 jiwa atau 49,95



persen nerjenis kelamin perempuan. Jika dilihat dari sebarannya, jumlah penduduk terendah berada di kecamatan sukorame sedangkan jumlah penduduk tertinggi berada di kecamatan paciran

Adapun secara lengkap struktur usia penduduk Kabupaten Lamongan Tahun 2024 sebagaimana tabel dibawah ini.

**Jumlah Penduduk di Kabupaten Lamongan Tahun 2024**

No	Kecamatan	Jumlah
1	2	3
1	SUKORAME	21,362
2	BLULUK	22.861
3	MODO	50.586
4	NGIMBANG	49.049
5	BABAT	88.763
6	KEDUNGPRING	60.528
7	BRONDONG	78.457
8	LAREN	50.391
9	SEKARAN	42.547
10	MADURAN	32.938
11	SAMBENG	52.130
12	SUGIO	62.714
13	PUCUK	48.081
14	PACIRAN	99.316
15	SOLOKURO	48.983
16	MANTUP	46.546
17	SUKODADI	59.324
18	KARANGGENENG	43.398
19	KEMBANGBAHU	50.276
20	KALITENGAH	35.983
21	TURI	54.561
22	LAMONGAN	70.839
23	TIKUNG	47.702
24	KARANGBINANGUN	40.585
25	DEKET	43.745
26	GLAGAH	40.569
27	SARIREJO	25.269
LAMONGAN		1.367.503

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan



**d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan**

Wilayah Kabupaten Lamongan terbagi menjadi 27 wilayah kecamatan terdiri dari 462 Desa dan 12 Kelurahan, yaitu sebagai berikut:

**Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan  
di Kabupaten Lamongan**

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah Dusun
1	Sukorame	9	38
2	Bluluk	9	41
3	Ngimbang	19	77
4	Sambeng	22	86
5	Mantup	15	72
6	Kembangbahu	18	77
7	Sugio	21	86
8	Kedungpring	23	74
9	Modo	17	76
10	Babat	23	47
11	Pucuk	17	34
12	Sukodadi	20	77
13	Lamongan	20	30
14	Tikung	13	68
15	Sarirejo	9	32
16	Deket	17	55
17	Glagah	29	87
18	Karangbinangun	21	71
19	Turi	19	53
20	Kalitengah	20	44
21	Karanggeneng	18	35
22	Sekaran	21	29
23	Maduran	17	31
24	Laren	20	38
25	Solokuro	10	20
26	Paciran	17	30
27	Brondong	10	23
Jumlah		474	1.431

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024

**e. Rincian Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah Serta Dasar Hukum Pembentukan Kepala Daerah**

Jumlah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 sebanyak 11.959 ASN, terdiri dari 4.758 Orang Laki – laki dan 7.201 Orang Perempuan. Sedangkan Jumlah ASN berdasarkan



Jenis Kepegawaian terdiri dari 6.910 Orang PNS dan 5.049 Orang PPPK atau.

Berdasarkan Jabatan, ASN Kabupaten Lamongan di Dominasi oleh Fungsional sebanyak 10.344 Orang sedangkan 610 Orang ASN merupakan Pejabat Struktural dan 1.005 Pelaksana. Ditinjau dari Tingkat Pendidikan, komposisi ASN sebagai berikut : SD 19 orang, SLTP 57 orang, SLTA 621 orang, DI 8 orang, DII 62 orang, DIII 1.890 orang, dan S1 mempunyai jumlah paling besar yaitu 8.298 orang. S2 1.003 orang dan yang terkecil yaitu pendidikan S3 hanya sejumlah 1 orang.

Adapun secara rinci data Aparatur Sipil Negara sebagaimana tabel dibawah ini.

**Rekapitulasi Perangkat Daerah / Pegawai Pemerintah (PNS) di Kabupaten Lamongan Tahun 2024**

NO	Unit Organisasi	Jabatan		
		Staf	Fungsional	Jumlah
1.	Sekretariat Daerah	71	35	106
2.	Sekretariat DPRD	3	7	10
3.	Satpol PP	27	89	116
4.	RSUD Soegiri	49	667	716
5.	RSUD Ngimbang	5	243	248
6.	RSUD Karang Kembang	2	122	124
7.	BKPSDM	16	17	33
8.	Bakesbangpol	7	4	11
9.	BPBD	5	4	9
10.	Bapenda	15	1	16
11.	BPKAD	17	8	25
12.	Bappelitbangda	15	20	35
13.	Arpusda	8	26	34
14.	Disdukcapil	9	13	22
15.	Dinkes	60	1903	1963
16.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	22	168	190
17.	Diskominfo	8	11	19
18.	Dinkop UMKM	4	12	16
19.	Dinas Lingkungan Hidup	43	12	55
20.	Dinas Pariwisata dan Budaya	19	8	27
21.	Dinas PU Bina Marga	22	13	35
22.	Dinas PU SDA	26	11	37
23.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	7	9	16
24.	Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak	3	7	10
25.	Dinas Pemuda dan Olahraga	15	8	23



NO	Unit Organisasi	Jabatan		
		Staf	Fungsional	Jumlah
26.	DPMPTSP	8	7	15
27.	Dinas Pendidikan	201	6834	7035
28.	Dinas PPKB	19	5	24
29.	Dinas Perhubungan	28	3	31
30.	Dinas Perikanan	7	7	14
31.	Dinas Perindag	9	12	21
32.	Dinas PRKPCK	13	21	34
33.	Dinas Peternakan	27	33	60
34.	Dinas Sosial	4	7	11
35.	Dinas Tenaga Kerja	3	15	18
36.	Inspektorat	13	26	39
37.	Babat	22	0	22
38.	Bluluk	6	0	6
39.	Brondong	6	0	6
40.	Deket	8	0	8
41.	Glagah	4	0	4
42.	Kalitengah	5	0	5
43.	Karangbinangun	9	0	9
44.	Karanggeneng	8	0	8
45.	Kedungpring	7	0	7
46.	Kembangbahu	8	0	8
47.	Lamongan	16	0	16
48.	Laren	3	0	3
49.	Maduran	4	0	4
50.	Mantup	3	0	3
51.	Modo	13	1	14
52.	Ngimbang	4	0	4
53.	Paciran	9	0	9
54.	Pucuk	9	0	9
55.	Sambeng	7	0	7
56.	Sarirejo	7	0	7
57.	Sekaran	6	0	6
58.	Solokuro	2	0	2
59.	Sugio	9	0	9
60.	Sukodadi	2	0	2
61.	Sukorame	7	0	7
62.	Tikung	5	0	5
63.	Turi	7	0	7
<b>JUMLAH</b>		1006	1006	10389

Sumber Data : SIMPEG BKPSDM Kabupaten Lamongan per-Desember 2024



f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

**Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan  
Tahun Anggaran 2024**

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>				
<b>1.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	172.098.755.489,00	177.555.992.706,00	103,17%	160.188.575.701,56
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	19.401.038.840,00	17.863.416.952,00	92,07%	18.816.306.531,00
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.983.767.826,00	21.206.931.503,21	88,42%	22.627.048.677,73
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	346.166.273.830,00	342.831.288.952,12	99,04%	326.977.619.851,58
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>561.649.835.985,00</b>	<b>559.457.630.113,33</b>	<b>99,61%</b>	<b>528.609.550.761,87</b>
<b>1.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
<b>1.2.1</b>	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN</b>				
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil	227.573.692.000,00	261.213.163.000,00	114,78%	287.273.233.421,00
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	1.289.193.578.000,00	1.240.024.937.541,00	96,19%	1.138.999.743.328,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus-Fisik	181.625.855.000,00	172.585.755.986,00	95,02%	125.254.014.967,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	385.637.979.628,00	364.989.018.667,00	94,65%	359.035.338.217,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN</b>	<b>2.084.031.104.628,00</b>	<b>2.038.812.875.194,00</b>	<b>97,83%</b>	<b>1.910.562.329.933,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA</b>				
1.2.2.1	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00%	42.914.751.000,00
1.2.2.2	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2.3	Dana Desa	410.055.236.000,00	410.055.236.000,00	100,00%	419.493.131.000,00
1.2.2.4	Insentif Fiskal	46.488.968.000,00	46.488.968.000,00	100,00%	0,00
	<b>JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA</b>	<b>456.544.204.000,00</b>	<b>456.544.204.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>462.407.882.000,00</b>



<b>1.2.3</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH</b>				
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil	500.003.967.515,00	213.723.691.387,00	42,74%	252.270.960.500,00
1.2.3.2	Bantuan Keuangan	30.706.703.500,00	30.706.703.500,00	100,00%	54.360.046.921,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH</b>	<b>530.710.671.015,00</b>	<b>244.430.394.887,00</b>	<b>46,06%</b>	<b>306.631.007.421,00</b>
	<b>TOTAL PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>3.071.285.979.643,00</b>	<b>2.739.787.474.081,00</b>	<b>89,21%</b>	<b>2.679.601.219.354,00</b>
<b>1.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>				
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00%	1.410.368.400,00
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00%	0,00
	<b>JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.410.368.400,00</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.632.935.815.628,00</b>	<b>3.299.245.104.194,33</b>	<b>90,81%</b>	<b>3.209.621.138.515,87</b>
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>2.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>				
2.1.1	Belanja Pegawai	1.207.568.082.096,00	1.129.756.185.828,00	93,56%	921.124.909.913,00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	840.303.361.036,00	795.835.423.579,55	94,71%	790.209.752.344,73
2.1.3	Belanja Bunga	1.760.620.000,00	1.671.604.633,00	94,94%	9.914.315.232,00
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00%	0,00
2.1.5	Belanja Hibah	347.632.063.727,00	269.739.822.213,00	77,59%	296.399.243.445,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	10.574.800.000,00	10.054.800.000,00	95,08%	15.618.705.050,00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>2.407.838.926.859,00</b>	<b>2.207.057.836.253,55</b>	<b>91,66%</b>	<b>2.033.266.925.984,73</b>
<b>2.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>				
2.2.1	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00%	0,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	99.838.986.769,00	96.038.188.540,00	96,19%	65.249.341.808,50
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	60.750.930.264,00	53.237.324.951,21	87,63%	82.677.140.425,00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	295.722.541.971,00	220.926.231.354,00	74,71%	179.969.688.164,00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	18.568.061.028,00	17.489.428.418,85	94,19%	12.805.673.764,00
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	105.000.000,00	67.000.000,00	63,81%	0,00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>474.985.520.032,00</b>	<b>387.758.173.264,06</b>	<b>81,64%</b>	<b>340.701.844.161,50</b>
<b>2.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>				
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	4.747.669.100,00	4.154.276.306,00	87,50%	163.000.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>4.747.669.100,00</b>	<b>4.154.276.306,00</b>	<b>87,50%</b>	<b>163.000.000,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.887.572.115.991,00</b>	<b>2.598.970.285.823,61</b>	<b>90,01%</b>	<b>2.374.131.770.146,23</b>



<b>2.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>				
<b>2.4.1</b>	<b>TRANSFER BAGI HASIL KE DESA</b>				
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten	23.573.420.968,00	23.573.420.968,00	100,00%	9.255.206.282,00
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten	4.394.232.370,00	4.392.719.570,00	99,97%	440.000.000,00
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00%	0,00
	<b>JUMLAH TRANSFER BAGI HASIL KE DESA</b>	<b>27.967.653.338,00</b>	<b>27.966.140.538,00</b>	<b>99,99%</b>	<b>9.695.206.282,00</b>
<b>2.4.2</b>	<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>				
2.4.2.1	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00%	0,00
2.4.2.2	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00%	0,00
2.4.2.3	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa	664.310.054.540,00	580.674.726.932,00	87,41%	777.987.122.964,00
	<b>JUMLAH TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>	<b>664.310.054.540,00</b>	<b>580.674.726.932,00</b>	<b>87,41%</b>	<b>777.987.122.964,00</b>
	<b>JUMLAH TRANSFER</b>	<b>692.277.707.878,00</b>	<b>608.640.867.470,00</b>	<b>87,92%</b>	<b>787.682.329.246,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>	<b>3.579.849.823.869,00</b>	<b>3.207.611.153.293,61</b>	<b>89,60%</b>	<b>3.161.814.099.392,23</b>
	<b>SURPLUS DAN DEFISIT</b>	<b>53.085.991.759,00</b>	<b>91.633.950.900,72</b>	<b>172,61%</b>	<b>47.807.039.123,64</b>
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>3.1</b>	<b>PENERIMAAN DAERAH</b>				
3.1.1	Penggunaan SILPA	24.187.436.241,00	24.186.513.840,76	100,00%	73.502.909.577,12
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan				
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00%	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00%	0,00
3.1.5	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00	0,00%	0,00
3.1.6	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00%	0,00
3.1.7	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00%	0,00
3.1.8	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)	0,00	0,00	0,00%	0,00
3.1.9	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00%	150.915.000,00
3.1.10	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00%	0,00
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>24.187.436.241,00</b>	<b>24.186.513.840,76</b>	<b>100,00%</b>	<b>73.653.824.577,12</b>
<b>3.2</b>	<b>PENGELUARAN DAERAH</b>				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00%	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00%	0,00



3.2.3	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00		0,00
3.2.4	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00	0,00%	0,00
3.2.5	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank	77.273.428.000,00	77.273.427.463,00	100,00%	97.273.427.460,00
3.2.6	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00%	0,00
3.2.7	Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)	0,00	0,00	0,00%	0,00
3.2.8	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00%	0,00
3.2.9	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00%	0,00
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>77.273.428.000,00</b>	<b>77.273.427.463,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>97.273.427.460,00</b>
	<b>PEMBIAYAAN NETO</b>	<b>(53.085.991.759,00)</b>	<b>(53.086.913.622,24)</b>	<b>100,00%</b>	<b>(23.619.602.882,88)</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>0,00</b>	<b>38.547.037.278,48</b>	<b>0,00%</b>	<b>24.187.436.240,76</b>

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Tahun 2024



**g. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan,  
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan  
dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang Memuat  
Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja**

**Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran  
Kabupaten Lamongan Tahun 2024**

LAMPIRAN I.1 : PERATURAN DAERAH  
NOMOR : 0 TAHUN 2025  
TANGGA : 23 January 2025



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN  
ORGANISASI  
TAHUN ANGGARAN 2024  
PERIODE AKHIR TAHUN

Kode	Usuran Pemerintahan Daerah	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Bertambah / (Berkurang)	
				(Rp.)	%
1	2	3	4	5	
	<b>BELANJA</b>	<b>3,579,849,823,869.00</b>	<b>3,207,611,153,293.61</b>	<b>(372,238,670,575.39)</b>	<b>(10.40)</b>
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN</b>	<b>2,120,152,138,918.00</b>	<b>1,930,861,919,912.61</b>	<b>(189,290,219,005.39)</b>	<b>(8.93)</b>
1 01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG Dinas Pendidikan</b>	<b>994,823,694,133.00</b>	<b>936,336,087,690.07</b>	<b>(58,487,606,442.93)</b>	<b>(5.88)</b>
1 01 0.00.0.00.0	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>947,934,231,855.00</b>	<b>890,657,635,133.01</b>	<b>(57,276,596,721.99)</b>	<b>(6.04)</b>
1 01 01	Belanja Pegawai	711,296,669,003.00	682,965,676,602.00	(28,330,992,401.00)	(3.98)
1 01 01	Belanja Barang dan Jasa	125,325,225,452.00	117,136,043,131.01	(8,189,182,320.99)	(6.53)
1 01 01	Belanja Hibah	105,711,837,400.00	85,431,415,400.00	(20,280,422,000.00)	(19.18)
1 01 01	Belanja Bantuan Sosial	5,600,500,000.00	5,124,500,000.00	(476,000,000.00)	(8.50)
1 01 01	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>46,889,462,278.00</b>	<b>45,678,452,557.06</b>	<b>(1,211,009,720.94)</b>	<b>(2.58)</b>
1 01 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21,681,513,750.00	21,552,992,000.00	(128,521,750.00)	(.59)
1 01 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7,042,927,500.00	7,036,522,138.21	(6,405,361.79)	(.09)
1 01 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	18,165,021,028.00	17,088,938,418.85	(1,076,082,609.15)	(5.92)
1 02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG Dinas Kesehatan</b>	<b>718,007,795,514.00</b>	<b>678,676,775,667.54</b>	<b>(39,331,019,846.46)</b>	<b>(5.48)</b>
1 02 0.00.0.00.0	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>361,269,536,594.00</b>	<b>333,712,249,614.70</b>	<b>(27,557,286,979.30)</b>	<b>(7.63)</b>
1 02 01	Belanja Pegawai	317,180,672,964.00	290,992,637,048.70	(26,188,035,915.30)	(8.26)
1 02 01	Belanja Barang dan Jasa	144,951,909,822.00	130,468,988,933.00	(14,482,920,889.00)	(9.99)
1 02 01	Belanja Hibah	172,028,763,142.00	160,323,648,115.70	(11,705,115,026.30)	(6.80)
1 02 01	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>44,088,863,630.00</b>	<b>42,719,612,566.00</b>	<b>(1,369,251,064.00)</b>	<b>(3.11)</b>
1 02 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23,281,413,030.00	22,173,795,537.00	(1,107,617,493.00)	(4.76)
1 02 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20,762,450,600.00	20,500,817,029.00	(261,633,571.00)	(1.26)
1 02 01	Belanja Aset Lainnya	45,000,000.00	45,000,000.00	-	-
1 02 0.00.0.00.0	<b>RSUD Karangsembang</b>	<b>31,091,235,870.00</b>	<b>29,007,169,524.00</b>	<b>(2,084,066,346.00)</b>	<b>(6.70)</b>
1 02 01	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>8,083,513,822.00</b>	<b>6,897,436,963.00</b>	<b>(1,186,076,859.00)</b>	<b>(14.67)</b>
1 02 01	Belanja Pegawai	201,494,649.00	192,979,649.00	(8,515,000.00)	(4.23)
1 02 01	Belanja Barang dan Jasa	7,882,019,173.00	6,704,457,314.00	(1,177,561,859.00)	(14.94)
1 02 01	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>23,007,722,048.00</b>	<b>22,109,732,561.00</b>	<b>(897,989,487.00)</b>	<b>(3.90)</b>
1 02 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11,724,353,711.00	11,195,748,874.00	(528,604,837.00)	(4.51)
1 02 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11,283,368,337.00	10,913,983,687.00	(369,384,650.00)	(3.27)
1 02 0.00.0.00.0	<b>RSUD dr. Soegiri</b>	<b>253,282,750,000.00</b>	<b>247,362,537,095.84</b>	<b>(5,920,212,904.16)</b>	<b>(2.34)</b>
1 02 01	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>229,680,291,940.00</b>	<b>224,574,424,495.84</b>	<b>(5,105,867,444.16)</b>	<b>(2.22)</b>
1 02 01	Belanja Pegawai	41,285,750,000.00	36,711,458,529.00	(4,574,291,471.00)	(11.08)
1 02 01	Belanja Barang dan Jasa	188,394,541,940.00	187,862,965,966.84	(531,575,973.16)	(.28)
1 02 01	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>23,602,458,060.00</b>	<b>22,788,112,600.00</b>	<b>(814,345,460.00)</b>	<b>(3.45)</b>
1 02 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20,586,974,000.00	19,869,257,561.00	(717,716,439.00)	(3.49)
1 02 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2,955,484,060.00	2,896,855,039.00	(58,629,021.00)	(1.98)
1 02 01	Belanja Aset Lainnya	60,000,000.00	22,000,000.00	(38,000,000.00)	(63.33)
1 02 0.00.0.00.0	<b>RSUD Ngimbang</b>	<b>72,364,273,050.00</b>	<b>68,594,819,433.00</b>	<b>(3,769,453,617.00)</b>	<b>(5.21)</b>
1 02 01	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>62,795,550,000.00</b>	<b>59,166,930,932.00</b>	<b>(3,628,619,068.00)</b>	<b>(5.78)</b>
1 02 01	Belanja Pegawai	12,035,665,502.00	11,586,571,637.00	(449,093,865.00)	(3.73)
1 02 01	Belanja Barang dan Jasa	50,759,884,498.00	47,580,359,295.00	(3,179,525,203.00)	(6.26)
1 02 01	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>9,568,723,050.00</b>	<b>9,427,888,501.00</b>	<b>(140,834,549.00)</b>	<b>(1.47)</b>
1 02 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9,568,723,050.00	9,427,888,501.00	(140,834,549.00)	(1.47)
1 03	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUJANG</b>	<b>367,828,133,573.00</b>	<b>280,479,152,081.00</b>	<b>(87,348,981,492.00)</b>	<b>(23.75)</b>
1 03 0.00.0.00.0	<b>Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga</b>	<b>195,753,434,901.00</b>	<b>155,852,282,915.00</b>	<b>(39,901,151,986.00)</b>	<b>(20.38)</b>
1 03 01	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>19,126,918,356.00</b>	<b>17,872,510,813.00</b>	<b>(1,254,407,543.00)</b>	<b>(6.56)</b>
1 03 01	Belanja Pegawai	5,097,896,496.00	4,618,600,209.00	(479,296,287.00)	(9.40)
1 03 01	Belanja Barang dan Jasa	14,029,021,860.00	13,253,910,604.00	(775,111,256.00)	(5.53)
1 03 01	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>176,626,516,545.00</b>	<b>137,979,772,102.00</b>	<b>(38,646,744,443.00)</b>	<b>(21.88)</b>



Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Bertambah / (Berkurang)	
				(Rp.)	%
1	1			5	
1 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	220,813,320.00	211,410,000.00	(9,403,320.00)	(4.26)
1 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	190,000,000.00	189,395,000.00	(605,000.00)	(.32)
1 03	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan	176,215,703,225.00	137,578,967,102.00	(38,636,736,123.00)	(21.93)
1 03	<b>0.00.0.00.0 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya</b>	<b>64,800,393,288.00</b>	<b>52,611,941,128.00</b>	<b>(12,188,452,160.00)</b>	<b>(18.81)</b>
1 03	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>12,490,858,988.00</b>	<b>11,807,665,053.00</b>	<b>(683,193,935.00)</b>	<b>(5.47)</b>
1 03	Belanja Pegawai	6,391,268,948.00	6,088,816,474.00	(302,452,474.00)	(4.73)
1 03	Belanja Barang dan Jasa	6,099,590,040.00	5,718,848,579.00	(380,741,461.00)	(6.24)
1 03	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>52,309,534,300.00</b>	<b>40,804,276,075.00</b>	<b>(11,505,258,225.00)</b>	<b>(21.99)</b>
1 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	374,587,000.00	361,201,000.00	(13,386,000.00)	(3.57)
1 03	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan	51,934,947,300.00	40,443,075,075.00	(11,491,872,225.00)	(22.13)
1 03	<b>1.04.2.10.0 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan</b>	<b>107,274,305,384.00</b>	<b>72,014,928,038.00</b>	<b>(35,259,377,346.00)</b>	<b>(32.87)</b>
	<b>7.00 Permukiman dan Cipta Karya</b>				
1 03	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>38,446,774,494.00</b>	<b>33,975,002,753.00</b>	<b>(4,471,771,741.00)</b>	<b>(11.63)</b>
1 03	Belanja Pegawai	5,662,876,000.00	4,961,954,139.00	(700,921,861.00)	(12.38)
1 03	Belanja Barang dan Jasa	11,432,324,940.00	9,651,172,795.00	(1,781,152,145.00)	(15.58)
1 03	Belanja Hibah	20,471,573,554.00	18,481,875,819.00	(1,989,697,735.00)	(9.72)
1 03	Belanja Bantuan Sosial	880,000,000.00	880,000,000.00	-	-
1 03	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>68,827,530,890.00</b>	<b>38,039,925,285.00</b>	<b>(30,787,605,605.00)</b>	<b>(44.73)</b>
1 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	328,325,000.00	311,569,500.00	(16,755,500.00)	(5.10)
1 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7,576,186,780.00	955,115,255.00	(6,621,071,525.00)	(87.39)
1 03	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan	60,923,019,110.00	36,773,240,530.00	(24,149,778,580.00)	(39.64)
1 05	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG</b>	<b>22,047,184,859.00</b>	<b>18,857,790,353.00</b>	<b>(3,189,394,506.00)</b>	<b>(14.47)</b>
	<b>KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN</b>				
	<b>LIMUM SFRTA PFRINDINGAN</b>				
1 05	<b>0.00.0.00.0 Satuan Polisi Pamong Praja</b>	<b>17,887,017,627.00</b>	<b>14,944,202,387.00</b>	<b>(2,942,815,240.00)</b>	<b>(16.45)</b>
1 05	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>17,459,868,627.00</b>	<b>14,596,225,903.00</b>	<b>(2,863,642,724.00)</b>	<b>(16.40)</b>
1 05	Belanja Pegawai	8,108,088,727.00	6,935,352,549.00	(1,172,736,178.00)	(14.46)
1 05	Belanja Barang dan Jasa	9,351,779,900.00	7,660,873,354.00	(1,690,906,546.00)	(18.08)
1 05	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>427,149,000.00</b>	<b>347,976,484.00</b>	<b>(79,172,516.00)</b>	<b>(18.54)</b>
1 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	427,149,000.00	347,976,484.00	(79,172,516.00)	(18.54)
1 05	<b>0.00.0.00.0 Badan Penanggulangan Bencana</b>	<b>4,160,167,232.00</b>	<b>3,913,587,966.00</b>	<b>(246,579,266.00)</b>	<b>(5.93)</b>
1 05	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>3,941,967,672.00</b>	<b>3,698,387,176.00</b>	<b>(243,580,496.00)</b>	<b>(6.18)</b>
1 05	Belanja Pegawai	2,564,011,952.00	2,363,448,645.00	(200,563,307.00)	(7.82)
1 05	Belanja Barang dan Jasa	1,372,455,720.00	1,329,438,531.00	(43,017,189.00)	(3.13)
1 05	Belanja Bantuan Sosial	5,500,000.00	5,500,000.00	-	-
1 05	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>218,199,560.00</b>	<b>215,200,790.00</b>	<b>(2,998,770.00)</b>	<b>(1.37)</b>
1 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18,199,560.00	16,204,000.00	(1,995,560.00)	(10.96)
1 05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200,000,000.00	198,996,790.00	(1,003,210.00)	(.50)
1 06	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG</b>	<b>17,445,330,839.00</b>	<b>16,512,114,121.00</b>	<b>(933,216,718.00)</b>	<b>(5.35)</b>
1 06	<b>0.00.0.00.1 Dinas Sosial</b>	<b>17,445,330,839.00</b>	<b>16,512,114,121.00</b>	<b>(933,216,718.00)</b>	<b>(5.35)</b>
1 06	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>17,338,110,950.00</b>	<b>16,406,069,621.00</b>	<b>(932,041,329.00)</b>	<b>(5.38)</b>
1 06	Belanja Pegawai	3,826,367,650.00	3,292,447,292.00	(533,920,358.00)	(13.95)
1 06	Belanja Barang dan Jasa	10,088,843,300.00	9,719,622,329.00	(369,220,971.00)	(3.66)
1 06	Belanja Hibah	300,000,000.00	300,000,000.00	-	-
1 06	Belanja Bantuan Sosial	3,122,900,000.00	3,094,000,000.00	(28,900,000.00)	(.93)
1 06	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>107,219,889.00</b>	<b>106,044,500.00</b>	<b>(1,175,389.00)</b>	<b>(1.10)</b>
1 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19,771,000.00	19,150,000.00	(621,000.00)	(3.14)
1 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	87,448,889.00	86,894,500.00	(554,389.00)	(.63)

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Tahun 2024

## 1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

### a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Lamongan pada umumnya timbul karena potensi dan kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan peluang yang tidak dimanfaatkan. Adapun permasalahan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan cenderung stagnan. Disisi yang lain pengeluaran perkapita masih di bawah rata-rata provinsi dan belum merata.



2. Kemiskinan di Kabupaten Lamongan masih berada di atas angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur.
3. Rata-rata lama sekolah mengalami stagnasi dan belum mencapai target wajib belajar 9 tahun.
4. Perlu penurunan angka kematian balita dan ibu, kasus balita stuntin dan gizi buruk serta penanganan penyakit yang menular dan tidak menular.
5. Belum semua jalan, jembatan, dan jaringan irigasi dalam kondisi baik.
6. Belum optimalnya ketersediaan air baku dan akses layanan air bersih.
7. Masih terdapat kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni
8. Masih adanya pelanggaran perda dan kejadian konflik sosial.
9. Terdapatnya wilayah yang rawan bencana banjir dan kekeringan.
10. Masih tingginya Angka pengangguran terbuka (TPT).
11. Adanya penurunan produksi tanaman pangan, terutama komoditas jagung dan kedelai, demikian pula untuk komoditas perkebunan terutama tebu.
12. Kesejahteraan petani mengalami stagnasi.
13. Rendahnya jumlah limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) serta masih rendahnya jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.
14. Masih minimnya desa yang berkategori mandiri.
15. Belum optimalnya peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan.
16. Belum semua situs, seni dan budaya terlestarikan serta pengembangan kepariwisataan.



17. Pertumbuhan lapangan usaha perindustrian dan perdagangan kecenderungannya mengalami penurunan. Serta adanya penurunan aksesibilitas usaha mikro terhadap modal usaha pada lembaga keuangan.
18. Realisasi investasi fluktuatif.
19. Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

## **b. Visi Dan Misi Kepala Daerah**

### **Visi Kepala Daerah**

Visi adalah cara pandang jauh kedepan, kemana dan bagaimana Kabupaten Lamongan harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Konsep Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan 2021-2026 merupakan kelanjutan dan pembaharuan terhadap arah pembangunan dibawah kepemimpinan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah tersebut diarahkan untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan Daerah 5 (lima) tahun kedepan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Visi Kabupaten Lamongan yang ditetapkan dan tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021- 2026, adalah:

***Terwujudnya Kejayaan Lamongan Yang Berkeadilan “***



Target utama visi pembangunan periode 2021-2026 adalah mewujudkan kejayaan dan keadilan bagi masyarakat Kabupaten Lamongan. Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

- 1) Terwujudnya, mengandung arti upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan dalam rangka mencapai kejayaan lamongan dan keadilan bagi masyarakat.
- 2) Kejayaan, adalah suatu kondisi terwujudnya Lamongan sebagai kabupaten yang masyhur, unggul dan maju dalam pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur, kebudayaan dan ekonomi yang berbasis potensi unggulan, sehingga terwujud kesejahteraan lahir batin bagi masyarakat.
- 3) Berkeadilan, adalah suatu kondisi Lamongan yang semakin merata pelaksanaan pembangunannya dan konektivitas pelayanan publik serta meningkat aksesibilitasnya. Berkeadilan juga bermakna keberpihakan dan kehadiran pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan pendapatan masyarakat, sehingga dapat menurunkan kondisi ketimpangan dan kemiskinan.

Semangat kejayaan yang berkeadilan dapat direpresentasikan dengan kemandirian dan kesejahteraan serta pemerataan. Secara teknis dapat diintervensi melalui sinergitas antar *stakeholder* pembangunan yakni masyarakat sebagai objek dan subjek pembangunan, pemerintah sebagai pelaksana pembangunan dan sektor swasta serta akademisi sebagai supporting dalam pembangunan Kabupaten Lamongan lima tahun kedepan.



## **Misi Kepala Daerah**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Dengan kata lain Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah agar tujuan organisasi sesuai Visi yang telah ditetapkan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Instansi Pemerintah, mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang. Dari gambaran tersebut maka ditetapkan **5 (lima) Misi Kabupaten Lamongan** Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

❖ **Misi 1 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah,** dengan penjelasan sebagai berikut:

Fokus dari Misi pertama yakni terwujudnya pertumbuhan yang inklusif. Ekonomi inklusif adalah pertumbuhan yang bisa memberikan dampak positif pada pembangunan dan bisa diakses serta dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat. Representasi ketercapaian atau keberhasilan dari misi ini yakni meningkatnya jumlah investasi, meningkatnya produktifitas sektor unggulan dan pengeluaran wisatawan meningkat. Selain itu, Kemiskinan menurun, kesenjangan mengecil, dan pengangguran berkurang, serta ketahanan ekonomi keluarga dan perempuan terjamin. Selain itu kesejahteraan petani dan penanganan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial mengalami peningkatan.



- ❖ **Misi 2 : Mewujudkan SDM Unggul, Berdaya Saing Dan Berahklak** Yang Responsif Terhadap Perubahan Zaman, dengan penjelasan sebagai berikut :

Misi ke dua Kabupaten Lamongan terfokus pada upaya pemerintah untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Representasi tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia yakni semakin meningkatnya pembangunan manusia yang didukung oleh kualitas pelayanan dan aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat, kualitas pelayanan dan kemudahan aksesibilitas kesehatan bagi masyarakat, dan semakin meningkatnya kualitas kepemudaan dan prestasi Olahraga.

- ❖ **Misi 3 : Mewujudkan Infrastruktur Handal Dan Berkeadilan Yang Berwawasan Lingkungan**, dengan penjelasan sebagai berikut :

Fokus Misi tiga yakni Peningkatan Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Infrastruktur. Dalam rangka mewujudkan kepuasan atas kinerja infrastruktur, pemerintah akan fokus pada peningkatan kualitas layanan dan konektivitas infrastruktur yang merata, pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian terhadap resiko bencana.

- ❖ **Misi 4 : Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat Yang Sejahtera, Religius- Berbudaya, Aktif Dalam Pembangunan, Serta Lingkungan Yang Aman Dan Tenram**, dengan penjelasan sebagai berikut:

Fokus Misi ke empat yaitu Peningkatan Kesalehan Sosial dan Pelestarian nilai-nilai Kebudayaan bagi Masyarakat. Representasi ketercapaiannya yakni meningkatnya pemahaman masyarakat tentang sikap toleran,



solidaritas sosial dan stabilitas ketentraman dan ketertiban lingkungan serta menjaga nilai-nilai budaya lokal.

❖ **Misi 5 : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis, Serta Memberikan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi,** dengan penjelasan sebagai berikut:

Fokus misi ke lima adalah peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan melalui pelayanan publik dan manajemen pemerintahan yang berkualitas. Representasi tercapainya Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan adalah Terciptanya Reformasi Birokrasi yang didukung oleh peningkatan inovasi layanan berbasis digital, profesionalitas aparatur, akuntabilitas kinerja pemerintahan, dan desa mandiri.

**c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah**

Program prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program yang secara khusus berhubungan dengan janji-janji kampanye Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Berdasarkan janji-janji atau platform politik tersebut kemudian didefinisikan kedalam program, kegiatan atau sub kegiatan yang mengacu pada Keputusan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Adapun 11 program prioritas Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026



berdasarkan platform politik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen  
Perencanaan Jangka Menengah**

No	Perangkat Daerah	Program
1	Dinas Pendidikan	- Program Pengelolaan Pendidikan
		- Program Pengembangan Kurikulum
		- Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
2	Dinas Kesehatan	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
		- Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
		- Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
3	RSUD SOEGIRI	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
4	RSUD NGIMBANG	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
5	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	- Program Penyelenggaraan Jalan
6	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
7	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		- Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
		- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
		- Program Penataan Bangunan Gedung
		- Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
		- Program Pengembangan Jasa Konstruksi
		- Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
		- Program Pengembangan Perumahan
		- Program Kawasan Permukiman
- Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)		
8	Satuan Polisi Pamong Praja	- Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
		- Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	- Program Penanggulangan Bencana
10	Dinas Sosial	- Program Penanganan Fakir Miskin
		- Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial



No	Perangkat Daerah	Program
		- Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial (LKS) Dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
		- Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
11	Dinas Tenaga Kerja	- Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
		- Program Penempatan Tenaga Kerja
		- Program Hubungan Industrial
		- Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	- Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
		- Program Perlindungan Perempuan
		- Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
		- Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)
		- Program Perlindungan Khusus Anak
13	Dinas Ketahanan Pangan	- Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
		- Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		- Program Penanganan Kerawanan Pangan
		- Program Pengawasan Keamanan Pangan
14	Dinas Lingkungan Hidup	- Program Perencanaan Lingkungan Hidup
		- Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
		- Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)
		- Prgram Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan idup (PPLH)
		- Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
		- Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
		- Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
		- Program Pengelolaan Persampahan
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	- Program Pendaftaran Penduduk
		- Program Pencatatan Sipil
		- Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		- Program Pengelolaan Profil Kependudukan
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	- Program Penataan Desa
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	- Program Pengendalian Penduduk
		- Program Pembinaan Keluarga Berencana
		- Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	- Program Informasi Dan Komunikasi Publik
		- Program Aplikasi Informatika
		- Program Penyelenggaraan Statistik
		- Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi



No	Perangkat Daerah	Program
19	Dinas Perhubungan	- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)
20	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	- Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
		- Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
		- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)
		- Program Pengembangan Umkm
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		- Program Pelayanan Penanaman Modal
		- Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
		- Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
22	Dinas Pemuda dan Olahraga	- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
		- Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
23	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	- Program Pengembangan Kebudayaan
		- Program Pengembangan Kesenian Tradisional
		- Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
		- Program Museum Kabupaten/Kota
		- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		- Program Pemasaran Pariwisata
		- Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
24	Dinas Perpustakaan Daerah	- Program Pembinaan Perpustakaan
		- Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
25	Dinas Kearsipan Daerah	- Program Pengelolaan Arsip
		- Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
26	Dinas Perikanan	- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
		- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		- Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan
		- Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
27	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	- Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
		- Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		- Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
		- Program Penyuluhan Pertanian
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	- Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
		- Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		- Program Penyuluhan Pertanian
29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	- Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
		- Program Pengendalian Izin Usaha Industri
		- Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
30	Inspektorat	- Program Penyelenggaraan Pengawasan
		- Program Penyelenggaraan Pengawasan
		- Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
31	Badan Perencanaan Pembangunan,	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota



No	Perangkat Daerah	Program
	Penelitian Pengembangan Daerah	- Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan - Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah - Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
32	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	- Program Pengelolaan Keuangan Daerah - Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
33	Badan Pendapatan Daerah	- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
34	Badan Kepegawaian Daerah	- Program Kepegawaian Daerah
35		- Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
36	Sekretariat DPRD	- Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	- Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan - Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik - Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan - Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya - Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
38	Sekretariat Daerah	- Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat - Program Perekonomian Dan Pembangunan - Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
39	Kecamatan Lamongan	- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan - Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum - Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
40	Kecamatan Babat	- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan - Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
41	Kecamatan paciran	- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan - Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
42	Kecamatan Brondong	- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan - Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
43	Kecamatan Turi	- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan



No	Perangkat Daerah	Program	
		-	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
44	Kecamatan Pucuk	-	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		-	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		-	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
45	Kecamatan Sukodadi	-	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		-	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		-	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
46	Kecamatan Tikung	-	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		-	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		-	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		-	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
47	Kecamatan Deket	-	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		-	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		-	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		-	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
48	Kecamatan Kalitengah	-	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		-	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		-	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
49	Kecamatan Kembangbahu	-	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		-	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		-	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		-	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
50	Kecamatan Mantup	-	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		-	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		-	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		-	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
51	Kecamatan Modo	-	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		-	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
		-	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
52	Kecamatan Bluluk	-	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		-	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		-	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
		-	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
53	Kecamatan Karangbinangun	-	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		-	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		-	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
		-	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		-	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
54	Kecamatan Glagah	-	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		-	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan



No	Perangkat Daerah	Program
		- Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
55	Kecamatan Ngimbang	- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		- Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
		- Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
56	Kecamatan Sugio	- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		- Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
57	Kecamatan Karanggeneng	- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		- Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
58	Kecamatan Sambeng	- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		- Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
59	Kecamatan Iaren	- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		- Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
		- Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
60	Kecamatan Kedungpring	- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		- Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
61	Kecamatan Sekaran	- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		- Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
62	Kecamatan sarirejo	- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		- Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
63	Kecamatan Solokuro	- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		- Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
64	Kecamatan Maduran	- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		- Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
65	Kecamatan Sukorame	- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		- Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sumber Data : Bappelitbangda Tahun 2024



**d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen  
Perencanaan Tahunan**

**Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen  
Perencanaan Tahunan (Tahun 2024)**

No	Perangkat Daerah	Kegiatan
1	Dinas Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</li> <li>- Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</li> <li>- Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</li> <li>- Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar</li> <li>- Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal</li> <li>- Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</li> </ul>
2	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>- Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>- Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>- Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota</li> <li>- Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</li> <li>- Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>- Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</li> <li>- Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</li> <li>- Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</li> <li>- Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>- Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</li> </ul>
3	RSUD SOEGIRI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota</li> <li>- Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</li> </ul>
4	RSUD NGIMBANG	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota</li> </ul>



No	Perangkat Daerah	Kegiatan
		- Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
5	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	- Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
6	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	- Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
7	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota - Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
8	Satuan Polisi Pamong Praja	- Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota



No	Perangkat Daerah	Kegiatan
		- Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
		- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	- Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
		- Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
		- Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
		- Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
10	Dinas Sosial	- Bantuan Stimulan dan Sarana Penataan Lingkungan Sosial
		- Bantuan Stimulan dan Sarana Penataan Lingkungan Sosial
		- Operasional dan Pendukung Pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan
		- Pendataan dan Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
		- Pemberdayaan Lanjut Usia terlantar
		- Pemulangan/Pengiriman ke Panti Rehabilitasi Sosial bagi WTS, Gepeng dan Gelandangan Psikotik yang Terjaring Razia
		- Operasional pengelolaan penampungan sementara bagi PMKS
		- Bantuan sosial alat bantu bagi warga disabilitas
		- Bimbingan dan Pelatihan Sosial bagi anak Bermasalah
		- Operasional Pendampingan dan Pendataan penerima Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Berat
		- Pengembangan Kelompok Usaha Bersama Penderita Cacat (KUBE PACA)
		- Pengadaan sarana dan prasarana alat bantu bagi lanjut usia terlantar
		- Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
		- Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
		- Tali Asih bagi veteran pejuang kemerdekaan, Janda Pahlawan dan Warakawuri
		- Pembinaan Family Care Unit (FCU)
		- Operasional pelaksanaan peringatan Hari Pahlawan dan HKS
		- Pengadaan sarana dan prasarana Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos)
		- Pelatihan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana bagi Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
		- Operasional Cadangan Beras Pemerintah dan Barang Bencana
		- Pendataan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
		- Penguatan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan
		- Operasional penanganan bantuan sosial bagi korban bencana sosial
		- Operasional dan Penyewaan Rumah Singgah Pasien Rujukan RSUD Dr. Soetomo Surabaya
		- Pemulangan orang terlantar, kehabisan bekal dan kecopetan



No	Perangkat Daerah	Kegiatan
11	Dinas Tenaga Kerja	- Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
		- Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
		- Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
		- Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
		- Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		- Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		- Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
		- Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	- Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota
		- Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota
		- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
		- Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup Daerah Kabupaten/Kota
		- Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten/Kota
		- Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota
		- Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah , Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
		- Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
13	Dinas Ketahanan Pangan	- Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
		- Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
		- Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
		- Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
		- Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
		- Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
		- Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		- Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
14	Dinas Lingkungan Hidup	- Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota



No	Perangkat Daerah	Kegiatan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</li> <li>- Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</li> <li>- Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</li> <li>- Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</li> <li>- Penyimpanan Sementara Limbah B3</li> <li>- Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>- Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>- Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>- Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>- .Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</li> <li>- .Pengelolaan Sampah</li> </ul>
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan Pendaftaran Penduduk</li> <li>- Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</li> <li>- Pelayanan Pencatatan Sipil</li> <li>- Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</li> <li>- Pengumpulan Data Kependudukan, Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</li> <li>- Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</li> <li>- Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</li> <li>- Penyusunan Profil Kependudukan</li> </ul>
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelenggaraan Penataan Desa</li> <li>- Fasilitasi Kerjasama Desa</li> <li>- Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa</li> <li>- Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat daerah Kabupaten / kota serta Pemberdayaan Masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah Kabupaten / kota</li> </ul>
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</li> <li>- Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>- Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</li> <li>- Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</li> </ul>



No	Perangkat Daerah	Kegiatan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>- Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</li> <li>- Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</li> </ul>
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</li> <li>- Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>- Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>- Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>- Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>- Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</li> </ul>
19	Dinas Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</li> <li>- Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</li> <li>- Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</li> <li>- Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</li> <li>- Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</li> <li>- Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</li> <li>- Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</li> </ul>
20	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>- Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>- Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</li> <li>- Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</li> </ul>
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>- Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</li> <li>- Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>- Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota</li> </ul>



No	Perangkat Daerah	Kegiatan
		- Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		- Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
22	Dinas Pemuda dan Olahraga	- Penyeragaman, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
		- Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		- Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
		- Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
		- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
		- Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
23	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	- Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		- Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		- Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		- Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten /Kota
		- Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota
		- Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
		- Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
		- Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota
		- Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
24	Dinas Perpustakaan Daerah	- Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota
		- Pembudayaan Gemar membaca tingkat daerah Kabupaten/Kota
		- Pelestarian naskah kuno milik daerah Kabupaten/Kota
		- Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota
25	Dinas Kearsipan Daerah	- Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
		- Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
		- Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
		- Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
		- Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
		- Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI
		- Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis



No	Perangkat Daerah	Kegiatan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota</li> <li>- Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN</li> <li>- Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>- Pemusnahan Arsip dilingkungn Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh ) Tahun</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penilaian, Penetaan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun</li> <li>- Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun</li> <li>- Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan</li> <li>- Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>- Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota</li> <li>- Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip</li> <li>- Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang dinyatakan Hilang</li> <li>- Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)</li> </ul>
26	Dinas Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</li> <li>- Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah KAbupaten/Kota</li> <li>- Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan ( TPI )</li> <li>- Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk,Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Diusahakan Dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>- Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil</li> <li>- Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</li> <li>- Penyediaan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 ( satu ) Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>- Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota</li> <li>- Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</li> <li>- Penyediaan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 ( satu ) Daerah Kabupaten/Kota</li> </ul>
27	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</li> <li>- Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi</li> <li>- Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian</li> </ul>



No	Perangkat Daerah	Kegiatan
		- Pengembangan Prasarana Pertanian
		- Koordinasi dan sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
		- Pembangunan Prasarana Pertanian
		- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
		- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
		- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
		- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit
		- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya
		- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
		- Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
		- Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
		- Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
		- Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
		- Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	- Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
		- Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
		- Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota
		- Peningkatan Mutu dan peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
		- Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer
		- Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
		- Pembangunan Prasarana Pertanian
		- Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
		- Pengawasan dan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
		- Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
		- Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
		- Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
		- Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian



No	Perangkat Daerah	Kegiatan
29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	- Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
		- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
		- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
		- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
		- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
		- Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
		- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem
		- Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
		- Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
		- Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
		- Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
		- Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		- Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		
- Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		
30	Inspektorat	- Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
		- Pengawasan Desa
		- Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP
		- Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP
		- Penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah
		- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
		- Pendampingan dan Asistensi
		- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		- Kerjasama Pengawasan Internal
- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Pendampingan dan Asistensi		



No	Perangkat Daerah	Kegiatan
		- Reviu Laporan Kinerja
		- Reviu Laporan Keuangan
31	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan Daerah	- Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
		- Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
		- Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
		- Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
		- Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukandan Pencatatan Sipil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pengembangan Inovasi dan Teknologi
32	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	- Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
		- Pengembangan Inovasi dan Teknologi
		- Pengembangan Inovasi dan Teknologi
		- Pengelolaan Barang Milik Daerah
33	Badan Pendapatan Daerah	- Pengelolaan Pendapatan Daerah
34	Badan Kepegawaian Daerah	- Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
		- Mutasi dan Promosi ASN
		- Pengembangan Kompetensi ASN
		- Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
		- Pengembangan Kompetensi Teknis
		- Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
36	Sekretariat DPRD	- Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
		- Pembahasan Kebijakan Anggaran
		- Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
		- Peningkatan Kapasitas DPRD
		- Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
		- Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
		- Pembahasan Kerjasama Daerah
		- Fasilitasi tugas DPRD
37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
		- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
		- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
		- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya



No	Perangkat Daerah	Kegiatan
		- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
38	Sekretariat Daerah	- Fasilitasi dan Koordinasi hukum
		- Penataan Organisasi
		- Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
		- Fasilitasi Kejasama Daerah
		- Administrasi Tata Pemerintahan
		- Pemantauan Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam
		- Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
		- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		- Fasilitasi Penyusunan Program Administrasi Pembangunan
		- Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
		- Pengelolaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
39	Kecamatan Lamongan	- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
		- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
		- Pemberdayaan Kelurahan
		- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
		- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
40	Kecamatan Babat	- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
		- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
		- Pemberdayaan Kelurahan
		- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
		- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
41	Kecamatan paciran	- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
		- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
		- Pemberdayaan Kelurahan
		- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
		- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
42	Kecamatan Brondong	- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
		- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
		- Pemberdayaan Kelurahan
		- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah



No	Perangkat Daerah	Kegiatan
		- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
43	Kecamatan Turi	- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
		- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
44	Kecamatan Pucuk	- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
		- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
		- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
45	Kecamatan Sukodadi	- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
		- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
		- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
46	Kecamatan Tikung	- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
		- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
		- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
		- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
47	Kecamatan Deket	- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
		- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
		- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
		- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
48	Kecamatan Kalitengah	- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
		- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
49	Kecamatan Kembangbahu	- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
		- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
		- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah



No	Perangkat Daerah	Kegiatan
		- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
50	Kecamatan Mantup	- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
		- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
		- Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
51	Kecamatan Modo	- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
		- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
		- Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
52	Kecamatan Bluluk	- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
		- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
		- Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
53	Kecamatan Karangbinangun	- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
		- Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan Umum
		- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
		- koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
		- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
		- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
54	Kecamatan Glagah	- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
		- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
		- Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
55	Kecamatan Ngimbang	- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
		- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
		- Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa



No	Perangkat Daerah	Kegiatan
56	Kecamatan Sugio	- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
		- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
57	Kecamatan Karanggeneng	- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
		- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
58	Kecamatan Sambeng	- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
		- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
59	Kecamatan Kedungpring	- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
		- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
60	Kecamatan Sekaran	- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
		- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
		- Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
61	Kecamatan sarirejo	- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
		- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
62	Kecamatan Solokuro	- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
		- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
63	Kecamatan Maduran	- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
		- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
64	Kecamatan Sukorame	- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
		- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
65	Kecamatan Laren	- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa



No	Perangkat Daerah	Kegiatan
		- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

*Sumber Data : Bappelitbangda Tahun 2024*

### 1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

#### Dasar Hukum Dalam Penyusunan Standar Pelayanan Minimal

Dasar hukum penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
Terdapat 6 urusan wajib pelayanan dasar yang dilaksanakan berdasarkan SPM, SPM menjadi prioritas baik perencanaan maupun anggaran
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;  
Pelaksanaan SPM yang mengatur tentang jenis pelayanan, mutu pelayanan dan penerima pelayanan dasar dan strategi penerapannya;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Secara teknis memuat tentang mekanisme dan strategi penerapan SPM mulai dari pengumpulan data, penghitungan pemenuhan kebutuhan dasar, perencanaan SPM dalam DOKREN, dan pelaksanaan SPM pelaporan dan evaluasi.

Peraturan Menteri terkait dengan penerapan SPM, yaitu :

#### 1. Bidang Pendidikan

- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.



## **2. Bidang Kesehatan**

- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

## **3. Bidang Pekerjaan Umum Dan Bidang Perumahan Rakyat**

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat.

## **4. Bidang Trantibumlinmas**

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

## **5. Bidang Sosial**

- Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

## **Kebijakan Umum**

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Lamongan telah terintegrasi dalam program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Lamongan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026. Hal tersebut dapat dilihat bahwa 6 jenis urusan wajib telah masuk dalam prioritas pembangunan. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026, program Bupati dan Wakil Bupati Lamongan yang menjadi prioritas dalam pembangunan daerah tahun 2021-2026, meliputi:

1. PERINTIS (Pendidikan Berkualitas dan Gratis bagi Masyarakat Kurang Mampu);
2. Lamongan Sehat;
3. YES (Young Entrepreneur Success);



4. JAMULA ( Jalan Mantap dan Alus );
5. Lumbung Pangan Lamongan;
6. UMKM;
7. Pemuda dan Olah Raga;
8. RAMASINTA (Gerakan Membangun Pariwisata Ramah dan Terintegrasi);
9. YSS ( Yakin Semua Sejahtera );
10. 100 % Pelayanan Publik Berkualitas;
11. Desa Berjaya.

Prioritas program Bupati dan Wakil Bupati Lamongan tersebut kemudian dijabarkan dalam berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah. Pelaksanaan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

### **Arah Kebijakan**

Dalam rangka penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Lamongan, Pemerintah Kabupaten Lamongan telah menyeleraskan hal tersebut dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan menuangkannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. Arah kebijakan jangka menengah daerah tersebut menjadi pedoman dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan tiap tahunnya. Berbagai program dan kegiatan terkait penerepan Standar Pelayanan Minimal (SPM), yaitu terkait 6 urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, senantiasa menjadi prioritas dalam kebijakan umum anggaran, termasuk pada tahun anggaran 2024 ini. Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Kuasa Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-



SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

### **Penerapan SPM**

Tahapan yang dilakukan dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Lamongan meliputi :

#### **1. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data mencakup jumlah dan identitas lengkap warga negara yang berhak memperoleh barang dan atau jasa kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya. Kemudian data yang juga perlu dikumpulkan pada tahapan pertama ini adalah terkait dengan jumlah barang dan atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia. Pengumpulan dan pendataan harus sesuai dengan standar teknis SPM ditujukan untuk pencapaian target 100% dari target dan indikator penerima layanan setiap tahun. Hasil pendataan yang dilakukan oleh OPD diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

#### **2. Penghitungan Kebutuhan**

Pada penghitungan pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan Indeks Pencapaian SPM. Indeks Pencapaian SPM sebagaimana dimaksud meliputi:

1. Capaian Mutu Pelayanan Dasar
2. Capaian Penerima Pelayanan Dasar

Capaian Mutu Pelayanan Dasar merupakan capaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub Indikator Kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan standar teknis. Sedangkan, capaian penerima Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud merupakan capaian yang diperoleh melalui target dan Indikator Kinerja.

#### **3. Penyusunan Rencana**



Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan yang dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD. Masing-masing OPD dalam memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar berdasarkan penghitungan kebutuhan ke dalam Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan tugas dan fungsi.

#### **4. Pelaksanaan Pemenuhan**

Program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar dilaksanakan sesuai dengan rencana pemenuhan pelayanan dasar. Target pencapaian program dan kegiatan ditetapkan oleh masing-masing OPD berdasarkan data jumlah penerima pelayanan dasar yang diperoleh setiap tahunnya.



## BAB II

### CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

#### 2.1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian Kinerja Makro Tahun 2024 di Kabupaten Lamongan menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

#### Capaian Kinerja Makro Kabupaten Lamongan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2023 (N-1)	Capaian Kinerja Tahun 2024 (N)	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	75,29	75,90	0,61
2	Angka Kemiskinan	12,42	12,16	-0,26
3	Angka Pengangguran	5,46	4,34	-1,12
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,28	4,81	0,53
5	Pendapatan Per Kapita	35,73	37,79	2,06
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,295	0,280	-0,015

Sumber Data : Bappelitbangda Tahun 2024

#### 2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

##### 2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)

Terlampir (Lampiran 1)



## 2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Terlampir (Lampiran 2)

### 2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas Kinerja yang disusun dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Lamongan tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan, tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi *actuating* dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat, sehingga kemudian sampai pada pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban yang diukur adalah sasaran, program dan kegiatan yang prosesnya adalah sejauh mana sasaran, program dan kegiatan tersebut dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

Akuntabilitas Kinerja menggambarkan tingkat pencapaian Sasaran ataupun Tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari Visi, Misi dan Strategi yang menginformasikan tingkat keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Program dan Kebijakan yang ditetapkan.

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran capaian kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja mulai dari Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan beserta indikatornya, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan,



permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan.

Dari hasil pengukuran capaian kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja merupakan gambaran tingkat pencapaian indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, sebagai pedoman pengambilan kebijakan 5 (lima) tahun yang akan datang.

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah. Informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah memuat:

#### **A. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja**

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya sehingga akan diketahui selisih atau celah kinerja baik positif atau negatif (*performance gap*). selanjutnya atas dasar selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapat strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Terhadap Sasaran yang memiliki lebih dari satu indikator kinerja, maka capaian kinerjanya digambarkan dengan rata-rata prosentase hasil capaian kinerja dari populasi indikator yang diperoleh.

Dalam RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 telah ditetapkan 7 (tujuh) Indikator Tujuan yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Lamongan, yaitu antara lain :

1. Pertumbuhan Ekonomi;
2. Gini Rasio;
3. Prosentase Penduduk Miskin;
4. Indeks Pembangunan Manusia;



5. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur
6. Indeks Kesalehan Sosial;
7. Indeks Reformasi Birokrasi.

Adapun target kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Lamongan Tahun 2024, disajikan dalam tabel berikut :

**Misi I** : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah

**Tujuan** : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi	4,71 %
2	Gini Rasio	0,29
3	Persentase Penduduk Miskin	12,92%

**Misi II** : Mewujudkan SDM Unggul, Berdaya Saing dan Berakhlak yang Responsif terhadap Perubahan Zaman

**Tujuan** : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia yang Berdaya Saing

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2024
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,95

**Misi III** : Mewujudkan Infrastruktur Handal dan Berkeadilan yang Berwawasan Lingkungan

**Tujuan** : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Infrastruktur Daerah yang Ramah Lingkungan

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2024
1	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	81



**Misi IV** : Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat yang Sejahtera, Religius-Berbudaya, Aktif dalam Pembangunan, serta Lingkungan yang Aman dan Tenram

**Tujuan** : Meningkatkan Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial Masyarakat yang Memperhatikan Kearifan Lokal

No	Indikator Kinerja Utama ( IKU )	Target 2024
1	Indeks Kesalehan Sosial	64,2

**Misi V** : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, serta Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi

**Tujuan** : Mengoptimalisasi Reformasi Birokrasi melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa

No	Indikator Kinerja Utama ( IKU )	Target 2024
1	Indeks Reformasi Birokrasi	70,5 (Bb)

## B. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 menggunakan metode sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya sehingga akan diketahui selisih atau celah kinerja baik positif atau negatif (*performance gap*). selanjutnya atas dasar selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi



guna mendapat strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Terhadap Sasaran yang memiliki lebih dari satu indikator kinerja, maka capaian kinerjanya digambarkan dengan rata-rata prosentase hasil capaian kinerja dari populasi indikator yang diperoleh.

Dalam RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 telah ditetapkan 7 (tujuh) Indikator Tujuan yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Lamongan, yaitu antara lain :

1. Pertumbuhan Ekonomi
2. Gini Rasio
3. Prosentase Penduduk Miskin
4. Indeks Pembangunan Manusia
5. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur
6. Indeks Kesalehan Sosial
7. Indeks Reformasi Birokrasi.

Adapun target kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Lamongan Tahun 2024, disajikan dalam tabel berikut :

**Misi I** : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah

**Tujuan** : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Baseline 2020	Realisasi			2024		Capaian (%)
			2021	2022	2023	Target	Realisasi	
1	Pertumbuhan Ekonomi	-2,65%	3,43%	5,56%	4,28%	4,71%	4,81%	<b>102,12</b>
2	Gini Rasio	0,294	0,292	0,273	0,295	0,29	0,28	<b>96,55</b>
3	Persentase Penduduk Miskin	13,85%	13,86%	12,53%	12,42%	12,92%	10,60%	<b>82,43</b>

Terhadap realisasi capaian indikator tujuan diatas, pada tahun 2024 semua indikator sebanyak 3 (tiga) indikator melampaui target yang telah ditetapkan. Terhadap indikator tujuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :



a. Persentase Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi Lamongan tahun 2024 mengalami percepatan sebesar 4,81 persen. Selama dua tahun berturut turut realisasi pertumbuhan ekonomi telah memenuhi target yang ditetapkan, sehingga reselensi positif ini harus terus dijaga.

b. Gini Ratio

Capaian indeks gini ratio berada pada angka 0,281 telah melampaui target. Penurunan indeks gini ratio 0,14 dipengaruhi oleh semakin sempitnya ketimpangan tingkat pengeluaran masyarakat bawah dan masyarakat kelas menengah.

c. Persentase Penduduk Miskin

Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Lamongan sebesar 12,16 persen melampaui target. Angka kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,26 persen dibandingkan tahun sebelumnya

**Misi II** : Mewujudkan SDM Unggul, Berdaya Saing dan Berakhlak yang Responsif terhadap Perubahan Zaman

**Tujuan** : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia yang Berdaya Saing

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Baseline 2020	Realisasi			2024		Capaian (%)
			2021	2022	2023	Target	Realisasi	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,44	73,97%	74,83%	75,29%	73,95%	75,90%	<b>102,63</b>

Indikator Kinerja Tujuan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 75,90 telah melampaui target dan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya serta masuk kategori tinggi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lamongan konsisten di atas provinsi dan nasional hal ini merupakan modal dasar untuk mengakselerasi daya saing Lamongan dalam skala nasional.



**Misi III** : Mewujudkan Infrastruktur Handal dan Berkeadilan yang Ber- wawasan Lingkungan

**Tujuan** : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Infrastruktur Daerah yang Ramah Lingkungan

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Baseline 2020	Realisasi			2024		Capaian (%)
			2021	2022	2023	Target	Realisasi	
1	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	N/A	80,83	77,89	79,44	81	81,33	<b>100,40</b>

Terhadap realisasi indikator Tujuan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur, pada tahun 2024 capaian kinerjanya sebesar 81,33 melampaui target yang ditetapkan, dibanding capaian kinerja tahun 2023 sebesar 79,44. Hal ini didukung adanya program dan kegiatan perbaikan serta pembangunan jalan dan jembatan. Selain itu didukung adanya rehab dan pembangunan irigasi, normalisasi waduk, penanganan banjir secara terintegrasi dan rehab rumah layak huni, pembangunan Rusunawa serta didukung program dan kegiatan perbaikan dan pembangunan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

**Misi IV** : Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat yang Sejahtera, Religius-Berbudaya, Aktif dalam Pembangunan, serta Lingkungan yang Aman dan Tenram

**Tujuan** : Meningkatkan Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial Masyarakat yang Memperhatikan Kearifan Lokal



No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Baseline 2020	Realisasi			2024		Capaian (%)
			2021	2022	2023	Target	Realisasi	
1	Indeks Kesalehan Sosial	N/A	-	86,77	89,19	64,2	89,33	<b>139,14</b>

Kebijakan mengenai Kesalehan Sosial penting guna melihat dinamika ruang publik yang berhubungan dengan kepedulian sosial, relasi antar manusia, pelestarian lingkungan, etika dan budi pekerti, juga kepatuhan terhadap negara dan pemerintah. Kesalehan Sosial menunjukkan perilaku orang-orang yang sangat peduli dengan nilai-nilai Islami yang bersifat sosial. Bersikap santun pada orang lain, suka menolong, sangat peduli terhadap masalah-masalah umat, memperhatikan dan menghargai hak sesama, mampu berpikir berdasarkan perpektif orang lain, mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain (berempati) dan seterusnya. Kesalehan Sosial adalah suatu bentuk kesalehan yang tidak cuma ditandai oleh seberapa besar seseorang memiliki kepekaan sosial dan berbuat kebaikan untuk orang-orang di sekitarnya sehingga orang lain merasa nyaman, damai dan tentram berinteraksi dan bekerjasama dan bergaul dengannya. Karena itu Kesalehan Sosial mencakup hubungan baik dengan Tuhan Yang Maha Kuasa, hubungan baik dengan sesama manusia dan hubungan baik dengan alam/lingkungan sekitar.

Kesalehan sosial juga berkaitan erat dengan implementasi Core Values BerAKHLAK oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) baik PNS, CPNS dan PPPK. Indeks BerAKHLAK Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun 2022 sebesar 61,8 (Cukup Sehat) dengan aspek Kompeten mendominasi dibanding 6 (enam) aspek lainnya, bahkan di lingkup nasional aspek Kompeten Indeks BerAKHLAK tahun 2022 menduduki peringkat 3 (tiga) nasional dan mendapat apresiasi penghargaan dari Ari Ginanjar Consulting Group.

Capaian kinerja Indikator Kinerja Tujuan Indeks Kesalehan Sosial sebesar 89,33 melampaui target dan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat lamongan dapat



merawat nilai-nilai solidaritas dan kerukunan antar umat beragama ditengah kemajemukan serta mampu menjaga stabilitas wilayah.

**Misi V** : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, serta Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi

**Tujuan** : Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Baseline 2020	Realisasi			2024		Capaian (%)
			2021	2022	2023	Target	Realisasi	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	66,30	68,35 (B)	70,02 (Bb)	75,89 (Bb)	70,5 (Bb)	86,48	<b>122,66</b>

Indikator Kinerja Tujuan Indeks Reformasi Birokrasi sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2024 dengan nilai sebesar 86,48 (Predikat BB/Sangat Baik), naik predikat dibanding Tahun 2023, sebesar 75,89 (Predikat B/Baik).

Peningkatan predikat dari BB menjadi predikat A sehingga semakin menguatkan status Lamongan sebagai kabupaten dengan tat kelola pemerintahan yang baik (good government). Capaian tersebut tidak terlepas dari konsistinsi seluruh aparatur sipil negara dalam membangun budaya kerja yang Akuntabel, Adaptif, Agile dan Kolaboratif serta menghadirkan pelayanan publik yang prima.

### C. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

Pengukuran capaian indikator kinerja setiap Sasaran dikelompokkan berdasarkan **Misi** dan **Tujuan** sebagai berikut :



**Misi I** : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah.

**Tujuan** : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan.

Pada Misi I, didukung oleh 5 (lima) Sasaran dan 10 (sepuluh) indikator sasaran, disajikan dalam tabel berikut:

No	Sasaran	Indikator	Target 2024	Realisasi			Capaian (%)
				2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pendapatan Masyarakat	Indeks Pemberdayaan Gender	74,01	75,49	73,15	BPS belum rilis	-
		Nilai Tukar Petani (NTP)	104,88	109,26	116,05	123,93	<b>118,16</b>
2	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	%PPKS yang meningkat kapasitasnya	4,38%	0,71%	4,50%	6,22%	<b>142,01</b>
		Tingkat Pengangguran Terbuka	4,47%	6,05%	5,46%	4,34%	<b>97,09</b>
		Indeks Daya Beli	0,778	0,748	0,758	0,768	<b>98,71</b>
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	%Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1%	3,94%	-1,37%	-1,26%	<b>-126</b>
		%Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran	5,3%	6,91%	5,77%	5,08%	<b>95,84</b>
		%Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	4,43%	7,98%	6,71%	7,66%	<b>172,91</b>
4	Meningkatnya efektifitas investasi	%Peningkatan Realisasi Investasi	2,5%	27,76%	6%	8,02%	<b>320,8</b>
5	Meningkatnya Belanja Wisatawan	Jumlah Pengeluaran Wisatawan	227.500.000.000,-	462.810.775.483,-	932.720.871.885,-	1.059.988.314.000,-	<b>465,929</b>

**Sasaran 1**, Meningkatkan Pemberdayaan dan Pendapatan Masyarakat, dilaksanakan secara kolaboratif oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Dari 2 (dua) indikator Sasaran diatas, realisasi capaian indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) tahun 2024 (sampai dengan saat



ini belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik) dan realisasi tahun 2023 sebesar 73,15. Sedangkan realisasi capaian Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) pada tahun 2023 sebesar 116,05 melebihi target yang ditetapkan sebesar 104,87. Adapun realisasi NTP tahun 2024 sebesar 123,93 melebihi target yang ditetapkan sebesar 104,88.

**Sasaran 2**, Meningkatnya kesejahteraan masyarakat, dilaksanakan secara kolaboratif oleh Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Bagian Perekonomian.

Dari 3 (tiga) indikator Sasaran diatas, terdapat 1 (satu) indikator terealisasi melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu indikator %PPKS yang meningkat kapasitasnya terealisasi sebesar 6,22% meningkat dibanding realisasi tahun 2023 sebesar 4,50%. Dua indikator lainnya tidak tercapai yaitu indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Indeks Daya Beli.

**Sasaran 3**, Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan, dilaksanakan secara kolaboratif oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Dari 3 (tiga) indikator Sasaran diatas, realisasi tahun 2024 semuanya sudah dirilis oleh Badan Pusat Statistik pertumbuhan PDRB lapangan usaha pertanian mengalami kenaikan sebesar 0,11 persen meningkat dibanding dengan tahun sebelumnya. Hal ini di pengaruhi oleh sub sektor perikanan dan peternakan yang tumbuh positif mengimbangi sektor tabama (tanaman bahan makanan) maupun perkebunan.



Indikator %Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran pada tahun 2024 terealisasi sebesar 5,08% mengalami perlambatan dari target yang ditetapkan.

Untuk indikator %Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan pada tahun 2024 terealisasi sebesar 7,66% melampaui target yang ditetapkan.

**Sasaran 4**, Meningkatnya Efektifitas Investasi, dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pada tahun 2024 realisasi capaian sebesar 8,02 persen melampaui target yang telah ditetapkan. Wujud dari komitmen pemerintah Kabupaten Lamongan ramah investasi.

**Sasaran 5**, Meningkatnya Belanja Wisatawan, dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Selama tahun 2024 realisasi sebesar 1 triliun 059 miliar 988 juta 314 ribu rupiah melampaui target yang telah di tetapkan.

Dalam mewujudkan Misi I tersebut tentunya juga didukung dengan Program Perangkat Daerah terkait yang dikolaborasikan untuk mewujudkan capaian kinerja yang optimal.

- Misi II** : Mewujudkan SDM Unggul, Berdaya Saing dan Berakhlak yang Responsif terhadap Perubahan Zama
- Tujuan** : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia yang Berdaya Saing

Pada Misi II, didukung dengan 3 (tiga) Sasaran dan 3 (tiga) Indikator Sasaran, disajikan dalam tabel berikut:

No	Sasaran	Indikator	Target 2024	Realisasi			Capaian (%)
				2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Dasar Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,642	0,667	0,668	0,672	<b>104,67</b>
2	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas	Indeks Kesehatan	0,809	0,813	0,844	0,847	<b>104,69</b>



No	Sasaran	Indikator	Target 2024	Realisasi			Capaian (%)
				2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pelayanan Dasar Kesehatan						
3	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	54,6	59,17	59,5	61,33	<b>112,32</b>

**Sasaran 1**, Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Dasar Pendidikan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.

Pada tahun 2024 realisasi indikator Indeks Pendidikan sebesar 0,672 melampaui target yang ditetapkan sebesar 0,642 dan tahun 2023 terealisasi sebesar 0,668.

**Sasaran 2**, Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Dasar Kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

Indikator Indeks Kesehatan pada tahun 2024 terealisasi sebesar 0,847 melampaui target yang ditetapkan sebesar 0,809 dan tahun 2023 terealisasi sebesar 0,844.

**Sasaran 3**, Meningkatkan Kualitas Pembangunan Kepemudaan, dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga.

Indikator Indeks Pembangunan Kepemudaan pada tahun 2024 terealisasi sebesar 61,33 melampaui target yang ditetapkan sebesar 54,6 dan tahun 2023 terealisasi sebesar 59,5.

**Misi III** : Mewujudkan Infrastruktur Handal dan Berkeadilan yang Ber- wawasan Lingkungan

**Tujuan** : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Infrastruktur Daerah yang Berwawasan Lingkungan

Pada Misi III, terdapat 3 (tiga) Sasaran, disajikan dalam tabel berikut:

No	Sasaran	Indikator	Target 2024	Realisasi			Capaian (%)
				2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata	Indeks Infrastruktur	82,33	79,52	-	83,22	<b>101,08</b>



No	Sasaran	Indikator	Target 2024	Realisasi			Capaian (%)
				2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62,08	64,70	64,09	63,33	<b>102,01</b>
3	Meningkatnya Kapasitas Kesiapsiagaan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,64	0,70	0,65	0,64	<b>100</b>

**Sasaran 1**, Meningkatkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata, dilaksanakan oleh Dinas PU Bina Marga, Dinas PU Sumber Daya Air, Dinas PU Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya serta Dinas Perhubungan.

Pada tahun 2024 realisasi indikator Indeks Infrastruktur 83,22 melampaui target yang ditetapkan sebesar 82,33.

**Sasaran 2**, Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2024 terealisasi sebesar 63,33 melampaui target yang ditetapkan sebesar 62,08.

**Sasaran 3**, Meningkatkan Kapasitas Kesiapsiagaan Bencana, dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Indikator Indeks Ketahanan Daerah pada tahun 2024 terealisasi sebesar 0,64 melampaui target yang ditetapkan sebesar 0,64.

**Misi IV** : Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat yang Sejahtera, Religius, Berbudaya, Aktif dalam Pembangunan serta Lingkungan yang Aman dan Tenram

**Tujuan** : Meningkatkan Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial Masyarakat yang Memperhatikan Kearifan Lokal

Pada **Misi IV**, terdapat 4 (empat) Sasaran, disajikan dalam tabel berikut :



No	Sasaran	Indikator	Target 2024	Realisasi			Capaian (%)
				2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Toleransi	Nilai Toleransi	73,12	87,42	89,75	89,93	<b>122,98</b>
2	Meningkatnya Rasa Aman Masyarakat	Nilai Stabilitas	68,98	88,79	89,68	88,11	<b>127,73</b>
3	Meningkatnya Solidaritas Masyarakat Dalam Bergotongroyong	Nilai Solidaritas	67,31	86,77	90,09	90,57	<b>134,56</b>
4	Meningkatnya Masyarakat Berbudaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	55,1	55,99	58,82	67,64	<b>122,75</b>

**Sasaran 1**, Meningkatkan Toleransi, dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pada tahun 2024 realisasi indikator Nilai Toleransi sebesar 89,93 melampaui target yang ditetapkan sebesar 73,12 dan meningkat dibanding realisasi tahun 2023 sebesar 89,75.

**Sasaran 2**, Meningkatkan Rasa Aman Masyarakat, dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Indikator Nilai Stabilitas pada tahun 2024 terealisasi sebesar 88,11. Capaian ini Menunjukkan bahwa masyarakat lamongan Semakin bijak dalam upaya menjaga Kenyamanan lingkungan dan meningkatkan Kepatuhan pada norma agama dan negara.

**Sasaran 3**, Meningkatkan Solidaritas Masyarakat dalam Bergotongroyong, dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

Indikator Nilai Solidaritas pada tahun 2024 terealisasi sebesar 90,57 melampaui target yang ditetapkan sebesar 67,31 dan meningkat dibanding realisasi tahun 2023 sebesar 90,09.

**Sasaran 4**, Meningkatkan Masyarakat Berbudaya, dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.



Indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan pada tahun 2024 terealisasi sebesar 67,64 melampaui target yang ditetapkan sebesar 55,1 dan tahun 2023 terealisasi sebesar 58,82.

**Misi V** : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis serta Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi.

**Tujuan** : Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa.

Pada **Misi V**, terdapat 4 (empat) Sasaran, disajikan dalam tabel berikut :

No	Sasaran	Indikator	Target 2024	Realisasi			Capaian (%)
				2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Inovatif	Nilai IKM	84,48	83,78	84,98	88,02	<b>104,19</b>
		Indeks SPBE	3,85	2,82	3,96	4,18	<b>108,57</b>
2	Meningkatnya Kapasitas ASN Pemerintah Daerah	Indeks Profesionalitas ASN	71	72,54	73,02	79,28	<b>111,66</b>
3	Meningkatnya Manajemen Pemerintahan yang Handal	Predikat SAKIP	A	A	A	A	<b>100,00</b>
		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	<b>100,00</b>
		Maturitas SPIP	Level 4	Level 3	Level 3	Level 3	<b>-100,00</b>
4	Meningkatnya Kemandirian Desa	%Peningkatan Desa Mandiri	200,00%	506,25%	937,50%	1.393,75%	<b>696,88</b>

**Sasaran 1**, Meningkatkan Pelayanan Publik yang Inovatif, dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP serta Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

Pada tahun 2024 indikator Nilai IKM terealisasi sebesar 88,02 atau berkategori baik dan telah melampaui target. kemudahan aksesibilitas dan peningkatan kualitas layanan diseluruh unit pelayanan mampu menumbuhkan kepercayaan dan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah.



**Sasaran 2**, Meningkatnya Kapasitas ASN Pemerintah Daerah, dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.

Pada tahun 2024 realisasi indikator Indeks Profesionalitas ASN terealisasi sebesar 79,28 melampaui target yang ditetapkan sebesar 71,00 dan meningkat dibanding realisasi tahun 2023 sebesar 73,02.

**Sasaran 3**, Meningkatnya Manajemen Pemerintahan yang Handal, dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, Inspektorat dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

Pada tahun 2024 realisasi indikator Predikat SAKIP, Opini BPK dan Maturitas SPIP semuanya terealisasi dan mencapai target yang telah ditetapkan.

**Sasaran 4**, Meningkatnya Kemandirian Desa, dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pada tahun 2024 indikator Persentase Peningkatan Desa Mandiri terealisasi sebesar 1.393,75% melampaui target yang ditetapkan sebesar 200,00% dan meningkat dibanding realisasi tahun 2023 sebesar 937,50%.

#### **D. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah**

➤ **Misi I dengan 1 (satu) Tujuan dan 5 (lima) Sasaran serta 10 (sepuluh) indikator kinerja Sasaran**

**Misi I** : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah

**Tujuan** : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan



Pada **Misi I**, terdapat 5 (lima) Sasaran dengan 10 (sepuluh) indikator dan disajikan dalam tabel berikut :

No	Sasaran	Indikator	Target RPJMD Th. 2026	Realisasi			Capaian (%)
				2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pendapatan Masyarakat	Indeks Pemberdayaan Gender	74,05	75,49	73,15	BPS belum rilis	-
		Nilai Tukar Petani	104,90	109,26	116,05	123,93	<b>118,14</b>
2.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	%PPKS yang meningkat kapasitasnya	4,88%	4,50%	4,95%	6,22%	<b>127,46</b>
		Tingkat Pengangguran Terbuka	4,07%	6,05%	5,46%	4,34%	<b>106,63</b>
		Indeks Daya Beli	0,794	0,748	0,758	0,768	<b>96,73</b>
3.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	%Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,5%	3,94%	-1,37%	-1,26%	<b>-84</b>
		%Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran	6,92%	6,91%	5,77%	5,08%	<b>73,41</b>
		%Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	7,39%	7,98%	6,71%	7,66%	<b>103,65</b>
4.	Meningkatnya efektifitas investasi	%Peningkatan Realisasi Investasi	3,5%	27,76%	6%	8,02%	<b>229,14</b>
5.	Meningkatnya Belanja Wisatawan	Jumlah Pengeluaran Wisatawan	268.500.000.000,-	462.810.775.483,-	932.720.871.885,-	1.059.988.314.000,-	<b>394,781</b>

Dari tabel tersebut diketahui bahwa terdapat 4 (empat) indikator Sasaran terealisasi melampaui target Jangka Menengah yang ditetapkan. Terdapat 5 (lima) indikator Sasaran yang jika dibandingkan target kinerja Jangka Menengah yang ditetapkan masih belum terpenuhi yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Daya Beli, %Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, %Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran dan %Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan. Tentu hal tersebut merupakan tantangan tersendiri yang harus dilakukan penanganan melalui langkah-langkah strategis. Selain itu terdapat 1 (satu)



indikator yang realisasinya belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Sasaran pada **Misi I** ini antara lain adalah :

**Sasaran 1 :**

- a. Program Pengarusutamaan Gender, Program Pengolahan Sistem Data Gender dan Anak dan Program Perlindungan Perempuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- b. Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penanganan Kerawanan Pangan, Program Pengawasan Keamanan Pangan, Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, Program Penyuluhan Pertanian, yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

**Sasaran 2 :**

- a. Program Pemberdayaan Sosial dan Program Rehabilitasi Sosial, yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial.
- b. Program Perencanaan Tenaga Kerja, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dan Program Penempatan Tenaga Kerja, yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja.
- c. Program Pengolahan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, Program Penyuluhan Pertanian, yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

**Sasaran 3 :**

- a. Program Pengolahan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, Program Penyuluhan Pertanian, yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.



- b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Program Pengembangan Ekspor, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- c. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Program Pemberdayaan Usaha Menengah dan UMKM, Program Pengembangan UMKM, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

**Sasaran 4 :**

Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal , yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

**Sasaran 5 :**

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pemasaran Wisata, Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

➤ **Misi II dengan 1 (satu) Tujuan dan 3 (tiga) Sasaran serta 3 (tiga) indikator kinerja Sasaran**

**Misi II** : Mewujudkan SDM Unggul, Berdaya Saing dan Berakhlak yang Responsif terhadap Perubahan Zaman.

**Tujuan** : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia yang Berdaya Saing.



Pada **Misi II**, terdapat 3 (tiga) Sasaran dengan 3 (tiga) indikator dan disajikan dalam tabel berikut :

No	Sasaran	Indikator	TARGET RPJMD Th. 2026	Realisasi			Capai-An (%)
				2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Dasar Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,644	0,667	0,668	0,672	<b>104,34</b>
2.	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Dasar Kesehatan	Indeks Kesehatan	0,811	0,813	0,844	0,847	<b>104,43</b>
3.	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	55,60	59,17	59,50	61,33	<b>110,31</b>

Dari tabel tersebut diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) indikator atau semua indikator Sasaran pada Misi II telah terealisasi melampaui target Jangka Menengah yang telah ditetapkan.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Sasaran pada Misi II antara lain adalah :

**Sasaran 1 :**

Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengembangan Kurikulum, Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.

**Sasaran 2 :**

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, RSUD dr. Soegiri dan RSUD Ngimbang.

**Sasaran 3 :**

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan, yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga.



➤ **Misi III dengan 1 (satu) Tujuan dan 3 (tiga) Sasaran serta 3 (tiga) Indikator kinerja Sasaran**

**Misi III** : Mewujudkan Infrastruktur Handal dan Berkeadilan yang Ber- wawasan Lingkungan.

**Tujuan** : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Infrastruktur Daerah yang Berwawasan Lingkungan.

Pada **Misi III**, terdapat 3 (tiga) Sasaran dengan 3 (tiga) indikator dan disajikan dalam tabel berikut :

No	Sasaran	Indikator	Target RPJMD Th. 2026	Realisasi			Capaian (%)
				2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6		7
1	Meningkatnya Infrastruktur yang Berkualitas & Merata	Indeks Infrastruktur	83,33	79,52	79,44	83,22	<b>99,87</b>
2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62,74	64,70	64,09	63,33	<b>100,94</b>
3	Meningkatnya Kapasitas Kesiapsiagaan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,68	0,70	0,65	0,64	<b>94,11</b>

Dari tabel tersebut diketahui bahwa terdapat 2 (dua) indikator Sasaran telah terealisasi melampaui target Jangka Menengah yang ditetapkan.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Sasaran pada **Misi III** ini antara lain adalah :

**Sasaran 1 :**

Program Penyelenggaraan Jalan, Program Pengelolaan Sumber Daya Air, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Program Pengembangan Jasa Konstruksi, Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, yang dilaksanakan oleh Dinas



PU Bina Marga, Dinas PU Sumber Daya Air, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya.

**Sasaran 2 :**

Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Pencemaran, dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

**Sasaran 3 :**

Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penanganan Kerawanan Pangan, Program Pengawasan Keamanan Pangan, yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

➤ **Misi IV dengan 1 (satu) Tujuan dan 4 (empat) Sasaran serta 4 (empat) Indikator kinerja Sasaran**

**Misi IV :** Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat yang Sejahtera, Relegius, Berbudaya, Aktif dalam Pembangunan serta Lingkungan yang Aman dan Tenram.

**Tujuan :** Meningkatkan Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial Masya- rakat yang Memperhatikan Kearifan Lokal.

Pada **Misi IV**, terdapat 4 (empat) Sasaran dengan 4 (empat) indikator dan disajikan dalam tabel berikut :

No	Sasaran	Indikator	Target RPJMD Th. 2026	Realisasi			Capaian (%)
				2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Toleransi	Nilai Toleransi	79,08	87,42	89,75	89,93	<b>113,72</b>
2	Meningkatnya Rasa Aman Masyarakat	Nilai Stabilitas	71,77	88,79	89,68	88,11	<b>122,77</b>
3	Meningkatnya Solidaritas Masyarakat Dalam Bergotong-royong	Nilai Solidaritas	70,71	87,06	90,09	90,57	<b>128,08</b>



No	Sasaran	Indikator	Target RPJMD Th. 2026	Realisasi			Capaian (%)
				2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Meningkatnya Masyarakat Berbudaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	55,50	55,99	58,82	67,64	<b>121,87</b>

Dari tabel tersebut diketahui bahwa terdapat 4 (empat) indikator atau semua indikator Sasaran Misi IV telah terealisasi melampaui target Jangka Menengah yang telah ditetapkan.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Sasaran pada Misi IV antara lain adalah :

**Sasaran 1 :**

- a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- b. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- c. Program Pemberdayaan Sosial, Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Program Penanganan Bencana, yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

➤ **Misi V dengan 1 (satu) Tujuan dan 4 (empat) Sasaran serta 7 (tujuh) Indikator kinerja Sasaran**

**Misi V :** Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis serta Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi

**Tujuan :** Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa



Pada **Misi V**, terdapat 4 (empat) Sasaran dengan 7 (tujuh) indikator dan disajikan dalam tabel berikut :

No	Sasaran	Indikator	Target RPJMD Th. 2026	Realisasi			Capaian (%)
				2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Inovatif	Nilai IKM	85,73	83,78	84,98	88,02	<b>102,67</b>
		Indeks SPBE	4,00	2,82	3,96	4,18	<b>104,5</b>
2	Meningkatnya Kapasitas ASN Pemerintah Daerah	Indeks Profesionalitas ASN	74,00	63,26	73,02	79,28	<b>107,14</b>
3	Meningkatnya Manajemen Pemerintahan yang Handal	Predikat SAKIP	A	A	A	A	<b>100,00</b>
		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	<b>100,00</b>
		Maturitas SPIP	Level 4	Level 3	Level 3	Level 3	<b>-100,00</b>
4	Meningkatnya Kemandirian Desa	%Peningkatan Desa Mandiri	375%	506,25%	937,5%	1.393,75%	<b>371,67</b>

Dari tabel tersebut diketahui bahwa terdapat 4 (empat) indikator Sasaran telah terealisasi melampaui target Jangka Menengah yang ditetapkan.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Sasaran pada Misi II antara lain adalah :

**Sasaran 1 :**

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah.
- b. Program Informasi dan Komunikasi Publik, Program Aplikasi Informatika, Program Penyelenggaraan Statistik Sektor, Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dan Dinas Komunikasi dan Informatika.

**Sasaran 2 :**

Program Kepegawaian Daerah, Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.



**Sasaran 3 :**

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dan Program Penyelenggaraan Pengawasan, yang dilaksanakan oleh Inspektorat.
- b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- c. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, yang dilaksanakan oleh Inspektorat.

**Sasaran 4 :**

Program Penataan Desa, Program Peningkatan Kerjasama Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa, Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

**E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai**

Sejak diterapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, dijelaskan bahwa hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi dan otonomi tersebut, sesuai Pasal 284 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah diberikan wewenang untuk mengelola keuangan



daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan adanya sumber daya dan dana yang cukup serta memadai diantaranya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan dalam bentuk Program dan Kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Agar pengelolaan keuangan daerah dapat diselenggarakan secara legal dan akuntabel, maka perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD harus mengacu dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Untuk sinkronisasi dengan ketentuan yang lebih tinggi sesuai karakter dan kebutuhan daerah secara teknis pengelolaan keuangan daerah harus dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2022 tentang APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2024, Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2024, Peraturan Bupati Lamongan Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 43 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya secara rinci terkait alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Perubahan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran



2024 dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis dan indikator kinerjanya, dapat disajikan sebagaimana tabel berikut :

NO	U R A I A N	ANGGARAN	REALISASI	%
<b>MISI I</b>				
1.	Sasaran 1, Urusan Pemberdayaan Masyarakat (Dinas PP dan PA, Dinas KPP, Dinas Peternakan dan Keswan)	104.549.359.186,00	97.277.324.157,00	93,04
2.	Sasaran 2, Urusan Kesejahteraan Masyarakat (Dinas Sosial, Disnaker)	38.441.806.050,00	28.604.916.313,00	74,44
3.	Sasaran 3, Urusan Perekonomian (Disperindag, Dinkopum, Dinas Perikanan)	47.508.359.425,00	41.489.388.180,00	87,33
4.	Sasaran 4, Urusan Investasi (DPMPTSP)	5.917.752.812,00	5.538.458.473,00	93,59
5.	Sasaran 5, Urusan Pariwisata (Disparbud)	11,186,745,450.00	10,731,964,549.00	82,72
<i>Anggaran &amp; realisasi Sasaran (10 indikator)</i>		<b>235.013.837.213,00</b>	<b>208.069.667.112,00</b>	<b>88,54</b>

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran yang digunakan untuk pencapaian kinerja 2 (dua) Sasaran pada Misi I dengan rata-rata persentase sebesar **88,54%** atau terdapat efisiensi dengan formula perhitungan (rata-rata capaian kinerja sasaran – rata-rata capaian anggaran sasaran) sebesar **(162,21% – 88,54%) = 73,67%**.

NO	U R A I A N	ANGGARAN	REALISASI	%
<b>MISI II</b>				
1.	<b>Sasaran 1</b> , Urusan Pendidikan (Dinas Pendidikan)	850.585.629.535,00	772.969.320.632,00	90,87
2.	<b>Sasaran 2</b> , Urusan Kesehatan (Dinas Kesehatan dan RSUD)	654.853.025.534,00	597.929.191.531,73	91,31
3.	<b>Sasaran 3</b> , Urusan Kepemudaan (Dispora)	19.644.228.750,00	17.397.830.342,00	88,56
<i>Anggaran &amp; realisasi Sasaran (3 indikator)</i>		<b>1.525.082.883.819,00</b>	<b>1.372.696.342.505,7300</b>	<b>90,01</b>

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran yang digunakan untuk pencapaian kinerja 3 (tiga) Sasaran pada Misi II



dengan rata-rata persentase sebesar **90,01%** atau terdapat efisiensi dengan formula perhitungan (rata-rata capaian kinerja sasaran – rata-rata capaian anggaran Sasaran) sebesar **(106,29% - 90,01%) = 16,28%**.

NO	U R A I A N	ANGGARAN	REALISASI	%
<b>MISI III</b>				
1.	<b>Sasaran 1</b> , Urusan Pekerjaan Umum (Dinas PU Bina Marga)	129.900.368.650,00	99.586.271.876,00	76,66
	Urusan Pekerjaan Umum (Dinas PU SDA)	59.941.904.000,00	53.117.250.601,00	88,61
	Dinas Perhubungan	38.333.566.600,00	37.218.364.528,50	97,10
	Urusan Pekerjaan Umum (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya)	108.886.201.000,00	92.309.175.999,00	84,78
2.	<b>Sasaran 2</b> , Urusan Lingkungan Hidup (Dinas Lingkungan Hidup)	21.534.036.040,00	19.152.716.139,00	88,94
3.	<b>Sasaran 3</b> , Urusan Penanggulangan Bencana (BPBD)	5.717.158.500,00	5.440.957.667,00	95,17
<i>Anggaran &amp; realisasi Sasaran (9 indikator)</i>		<b>344.932.634.790,00</b>	<b>306.824.736.810,50</b>	<b>88,95</b>

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran yang digunakan untuk pencapaian kinerja **3 (tiga)** Sasaran pada **Misi III** dengan rata-rata persentase sebesar **88,95%** atau terdapat efisiensi dengan formula perhitungan (rata-rata capaian kinerja sasaran – rata-rata capaian anggaran sasaran) sebesar **(102,86% - 88,95%) = 13,91%**.

NO	U R A I A N	ANGGARAN	REALISASI	%
<b>MISI IV</b>				
1.	<b>Sasaran 1</b> , Urusan Toleransi Sosial (Bakesbangpol)	41.978.296.600,00	13.204.568.447,00	31,46
2.	<b>Sasaran 2</b> , Urusan Ketenteraman & Ketertiban Umum (Satpol PP)	18.723.891.370,00	16.876.735.660,00	90,13
3.	<b>Sasaran 3</b> , Urusan Sosial (Dinas Sosial)	200.000.000,00	159.000.000,00	79,5
4.	<b>Sasaran 4</b> , Urusan Kebudayaan (Disparbud)	233.000.000,00	224.000.000,00	99,97
<i>Anggaran &amp; realisasi Sasaran (10 indikator)</i>		<b>61.135.187.970,00</b>	<b>60.928.608.214,00</b>	<b>75,27</b>



Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran yang digunakan untuk pencapaian kinerja **4 (empat)** Sasaran pada **Misi IV** dengan rata-rata persentase sebesar **75,27%** atau terdapat efisiensi dengan formula perhitungan (Rata-rata capaian kinerja Sasaran – Rata-rata capaian anggaran Sasaran) sebesar **(126,16% - 75,27%) = 50,89%**.

NO	U R A I A N	ANGGARAN	REALISASI	%
<b>MISI V</b>				
1.	<b>Sasaran 1</b> , Urusan Pelayanan Publik (Dinas Kominfo, Bag. Organisasi Setda)	15.918.697.900,00	15.627.792.860,00	98,17
2.	<b>Sasaran 2</b> , Urusan Kapasitas ASN (BKPSDM)	10.047.007.100,00	9.646.513.332,00	96,01
3.	<b>Sasaran 3</b> , Urusan Manajemen Pemerintahan (Bapelitbangda, BPKAD, Inspektorat, Bagian Organisasi Setda)	897.618.258.029,00	838.490.991.324,00	93,41
4.	<b>Sasaran 4</b> , Urusan Kemandirian Desa (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan)	77.644.596.240,00	75.377.445.625,00	97,08
<i>Anggaran &amp; realisasi Sasaran (7 indikator )</i>		<b>1.001.228.559.269,00</b>	<b>939.142.743.141,00</b>	<b>93,80</b>

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran yang digunakan untuk pencapaian kinerja **4 (empat)** Sasaran pada **Misi V** dengan rata-rata persentase sebesar **93,80%**, terdapat efisiensi dengan formula perhitungan (Rata-rata capaian kinerja Sasaran – Rata-rata capaian anggaran Sasaran) sebesar **(194,78% - 93,80%) = 100,98%**.

Selanjutnya apabila dirata-rata, persentase realisasi anggaran dari Kelima Misi dan Kelima Tujuan tersebut adalah sebesar **87,31%**. Dengan persentase realisasi anggaran tersebut, ternyata dapat tercapai keberhasilan- keberhasilan pencapaian target-target kinerja Sasaran dan indikator Sasaran RPJMD Tahun 2016-2021 khususnya pada target-target kinerja yang telah ditetapkan di Tahun Anggaran 2024.

Jika dihitung efisiensi penggunaan sumber daya secara keseluruhan dikaitkan dengan capaian kinerja adalah sebagai berikut : **138,49%** (% Rerata Capaian Kinerja) – **87,31%** (% Rerata Capaian Anggaran) = **51,18%**.



## F. Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Adapun secara rinci dapat dijelaskan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

- **Misi I**, dengan 5 (lima) Sasaran dan 10 (sepuluh) indikator kinerja. Apabila dirata-rata capaian kinerja 5 (lima) Sasaran tersebut sebesar **153,94% (Sangat Berhasil)**. Sasaran yang memiliki kontribusi dukungan kinerja tertinggi adalah **Sasaran 5** “Meningkatnya belanja wisatawan“ dengan indikator Jumlah pengeluaran wisatawan sebesar **465,929%**, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, sebagaimana tabel berikut:

MISI I	TUJUAN	5 SASARAN STRATEGIS
Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui optimalisasi potensi sektor unggulan	1. Meningkatnya Pemberdayaan Dan Pendapatan Masyarakat
		2. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat
		3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan
		4. Meningkatnya Efektifitas Investasi
		5. Meningkatnya Belanja Wisatawan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA Th. 2024 (%)	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pendapatan Masyarakat	Indeks Pemberdayaan Gender	<i>BPS belum rilis</i>	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Nilai Tukar Petani	<b>118,16</b>	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	%PPKS yang meningkat kapasitasnya	<b>142,01</b>	Dinas Sosial
		Tingkat Pengangguran Terbuka	<b>97,09</b>	Dinas Tenaga Kerja
		Indeks Daya Beli	<b>98,71</b>	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dinas Peternakan dan Kes. Hewan



3.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	%Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	<b>-126</b>	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dinas Perikanan
		%Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran	<b>95,84</b>	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		%Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	<b>172,91</b>	
4.	Meningkatnya efektifitas investasi	%Peningkatan Realisasi Investasi	<b>320,8</b>	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
5.	Meningkatnya Belanja Wisatawan	Jumlah Pengeluaran Wisatawan	<b>465,929</b>	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
<i>Jumlah indikator &amp; capaian kinerja</i>		10	<b>1.385,449</b>	
<i>Rata-rata capaian kinerja 5 Sasaran Strategis</i>			<b>153,94</b>	<b>( Sangat Berhasil )</b>

- **Misi II**, dengan 3 (tiga) Sasaran dan 3 (tiga) indikator kinerja. Persentase rata-rata capaian kinerja Sasaran tersebut sebesar **107,22%** (Sangat Berhasil). Sasaran yang memiliki kontribusi dukungan kinerja tertinggi adalah **Sasaran 3**, “Indeks Pembangunan Pemuda” sebesar **112,32%** yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga, diikuti Sasaran 2 sebesar 104,46% dan Sasaran 1 sebesar 104,21%, sebagaimana tabel berikut :

MISI II	TUJUAN	3 SASARAN STRATEGIS
Mewujudkan SDM Unggul, Berdaya Saing dan Berakhlak yang Responsif terhadap Perubahan Zaman	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing	1. Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Dasar Pendidikan
		2. Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Dasar Kesehatan
		3. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Kepemudaan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA Th. 2024 (%)	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Dasar Pendidikan	Indeks Pendidikan	<b>104,67</b>	Dinas Pendidikan
2.	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Dasar Kesehatan	Indeks Kesehatan	<b>104,69</b>	Dinas Kesehatan
3.	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	<b>112,32</b>	Dinas Pemuda dan Olahraga
<i>Jumlah indikator &amp; capaian kinerja</i>		3	<b>321,68%</b>	
<i>Rata-rata capaian kinerja 3 Sasaran Strategis</i>			<b>107,22%</b>	<b>( Sangat Berhasil )</b>



- **Misi III**, dengan 3 (tiga) Sasaran dan 3 (tiga) indikator kinerja. Persentase rata-rata capaian kinerja Sasaran tersebut sebesar **101,03% (Sangat Berhasil)**. Sasaran yang memiliki kontribusi dukungan kinerja tertinggi adalah **Sasaran 2**, “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup” sebesar **102,01%** yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tabel berikut :

MISI III	TUJUAN	3 SASARAN STRATEGIS
Mewujudkan Infrastruktur Handal dan Berkeadilan yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap infrastruktur daerah yang berwawasan lingkungan	1. Meningkatnya Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata
		2. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
		3. Meningkatnya Kapasitas Kesiapsiagaan Bencana

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA Th. 2024 (%)	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM / KEGIATAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata	Indeks Infrastruktur	<b>101,08</b>	Dinas PU Bina Marga, Dinas PU SDA Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman & Cipta Karya
2.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	<b>102,01</b>	Dinas Lingkungan Hidup
3.	Meningkatnya Kapasitas Kesiapsiagaan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	<b>100</b>	BPBD
Jumlah indikator & capaian kinerja		3	<b>303,09%</b>	
Rata-rata capaian kinerja 3 Sasaran Strategis			<b>101,03%</b>	<b>( Sangat Berhasil )</b>

- **Misi IV**, dengan 4 (empat) Sasaran dan 4 (empat) indikator kinerja dan semua memenuhi target yang ditetapkan. Persentase rata-rata capaian kinerja Sasaran tersebut sebesar **127,005% (Sangat Berhasil)**. Sasaran yang memiliki kontribusi dukungan kinerja tertinggi adalah **Sasaran 3**, “Meningkatnya Solidaritas Masyarakat Dalam Bergotong-royong” sebesar **134,56%** yang dilaksanakan oleh



Dinas Sosial, diikuti Sasaran 2 sebesar **127,73%** dan Sasaran 1 sebesar **122,98%** sebagaimana tabel berikut :

MISI IV	TUJUAN	4 SASARAN STRATEGIS
Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat yang Sejahtera, Relegius, Berbudaya, Aktif dalam Pembangunan serta Lingkungan yang Aman dan Tenram	Meningkatkan kesejahteraan dan harmonisasi sosial masyarakat yang memperhatikan kearifan lokal	1. Meningkatnya Toleransi
		2. Meningkatnya Rasa Aman Masyarakat
		3. Meningkatnya Solidaritas Masyarakat Dalam Bergotong-royong
		4. Meningkatnya Masyarakat Berbudaya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA Th. 2024 (%)	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM / KEGIATAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Toleransi	Nilai Toleransi	<b>122,98</b>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2.	Meningkatnya Rasa Aman Masyarakat	Nilai Stabilitas	<b>127,73</b>	Satuan Polisi Pamong Praja
3.	Meningkatnya Solidaritas Masyarakat Dalam Bergotong-royong	Nilai Solidaritas	<b>134,56</b>	Dinas Sosial
4.	Meningkatnya Masyarakat Berbudaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	<b>122,75</b>	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.			127,67	
<i>Jumlah indikator &amp; capaian kinerja</i>		4	<b>508,02%</b>	
<i>Rata-rata capaian kinerja 4 Sasaran Strategis</i>			<b>127,005% ( Sangat Berhasil )</b>	

- **Misi V**, dengan 4 (empat) Sasaran dan 7 (tujuh) indikator kinerja, 5 (lima) indikator memenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan. Persentase rata-rata capaian kinerja Sasaran tersebut sebesar **160,19%** Sasaran yang memiliki kontribusi dukungan kinerja tertinggi adalah **Sasaran 4**, “Meningkatnya Kemandirian Desa” sebesar **696,88%** berikutnya **Sasaran 3** “Indeks Profesionalitas ASN” sebesar **111,66%**, selanjutnya **Sasaran 2** sebesar masing-masing **108,57%** sebagaimana tabel berikut :



MISI V	TUJUAN	4 SASARAN STRATEGIS
Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yg Dinamis serta Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi	Mengoptimalkan reformasi birokrasi melalui peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan dan kapasitas manajemen pemerintahan hingga ke desa	1. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Inovatif 2. Meningkatnya Kapasitas ASN Pemerintah Daerah 3. Meningkatnya Manajemen Pemerintahan yang Handal 4. Meningkatnya Kemandirian Desa

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA Th. 2024 (%)	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM / KEGIATAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Inovatif	Nilai IKM	<b>104,19</b>	Bagian Organisasi Setda
		Indeks SPBE	<b>108,57</b>	Dinas Kominfo
2.	Meningkatnya Kapasitas ASN Pemerintah Daerah	Indeks Profesionalitas ASN	<b>111,66</b>	BKPSDM
3.	Meningkatnya Manajemen Pemerintahan yang Handal	Predikat SAKIP	<b>100,00</b>	Bapelitbangda, BPKAD, Inspektorat, Bagian Organisasi
		Opini BPK	<b>100,00</b>	BPKAD
		Maturitas SPIP	<b>-100,00</b>	Inspektorat
4.	Meningkatnya Kemandirian Desa	%Peningkatan Desa Mandiri	<b>696,88</b>	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
<i>Jumlah indikator &amp; capaian</i>		<b>7</b>	<b>1.121,3</b>	
<i>Rata-rata capaian kinerja 4 Sasaran Strategis</i>			<b>160,19%</b>	<b>( Sangat Berhasil )</b>

Keberhasilan pencapaian target kinerja pada setiap Misi, Tujuan dan Sasaran tidak terlepas dari terciptanya kolaborasi dan dukungan seluruh potensi sumber daya berupa ASN, sarana prasarana dan dana APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2024 serta sumber dana lain seperti DAU, DAK, DID, anggaran dari Provinsi serta sumber anggaran lain seperti CSR dan lain-lain sesuai peraturan perundang-undangan yang diselaraskan untuk mendukung pencapaian target kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah. Seluruh potensi tersebut dimanfaatkan secara optimal guna mencapai keberhasilan pencapaian setiap target kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026.



Adapun program dan kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian target kinerja tidak terlepas dari sistem perencanaan yang baik dengan menampung aspirasi seluruh masyarakat melalui kegiatan MUSRENBANG secara berjenjang mulai dari tingkatan masyarakat bawah yang selanjutnya dirumuskan menjadi target kinerja setiap Misi, Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan urusan/bidang dan tugas pokok fungsi yang menjadi kewenangannya, sehingga diharapkan dapat tepat sasaran dan anggaran sehingga mendapatkan hasil yang optimal.



### BAB III

## CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

### 1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Dasar hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan dan pelaporan pelaksanaan tugas pembantuan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- f. Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 0442/M.PPN/11/2010, Nomor : SE-696/MK/2010 dan Nomor : 120/4693/SJ tentang Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga di Daerah serta Peningkatan Peran Aktif Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Pusat.

### 2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten/Kota

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan pembangunan daerah dapat dibiayai



melalui APBN (Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan). Dekonsentrasi merupakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Sedangkan tugas pembantuan yaitu penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Dana tugas pembantuan merupakan dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan sedangkan pendanaan dekon dilaksanakan untuk membiayai kegiatan yang merupakan kewenangan pemerintah pusat di daerah.

Adapun tujuan diberikannya tugas pembantuan dan dekonsentrasi yaitu untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan umum kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan kewajiban pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Selain itu, tugas pembantuan dan dekonsentrasi juga untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu mengembangkan pembangunan daerah dan desa sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah dan desa tersebut.

Kegiatan-kegiatan tugas pembantuan yang dilaksanakan di Kabupaten Lamongan merupakan pelaksanaan dari program/kegiatan dari Pemerintah Pusat kepada beberapa kementerian/lembaga terdiri dari:

- a. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- b. Kementerian Pertanian;
- c. Kementerian Kesehatan (*Global Fund*);
- d. Kementerian Ketenagakerjaan;
- e. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur;



- f. Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur;
- g. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur;
- h. Bidang Kesehatan (Kesmas) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur (Dana BK);
- i. Bidang Kesehatan (Yankes) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur (Dana BK).

Penjabaran pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Kementerian/Lembaga kepada Kabupaten Lamongan diimplementasikan pada 10 (sepuluh) Perangkat Daerah menurut kesesuaian tugas pokok dan fungsinya masing-masing, yaitu meliputi:

#### **A. Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan**

##### **Tugas Pembantuan Pusat**

Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan tidak melaksanakan tugas pembantuan (NIHIL).

#### **B. Dinas Sosial Kabupaten Lamongan**

##### **Tugas Pembantuan Pusat**

##### **Dasar Pelaksanaan :**

1. UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 30 ayat (1) menetapkan bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 30 ayat (2) menetapkan bahwa Laporan Keuangan setidaknya meliputi Laporan Realisasi (APBN). Neraca. Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan Laporan Keuangan Perusahaan Negara dan Badan lainnya.
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 55 ayat (1) menetapkan bahwa Menteri Keuangan selaku pengelola fiscal menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.
5. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
6. UU Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara non tunai.
12. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

**Program dan Kegiatan :**

1. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
  - Kegiatan Keluarga Harapan (PKH);
  - Kegiatan PBI JKN;
2. Bidang Penanganan Fakmis



- Kegiatan penerima bantuan Sembako dengan dana APBN
- 3. Bidang Rehabilitasi Sosial
  - Kegiatan Penyandang Disabilitas sumber dana APBD PROV
- 4. Bidang Pemberdayaan Sosial
  - Kegiatan TKSK, bantuan pada operasional TKSK sebanyak 27 orang.

**Tugas Pembantuan Provinsi :**

1. Bidang Rehabilitasi Sosial  
Kegiatan Penyandang Disabilitas sumber dana APBD PROV
2. Bidang Pemberdayaan Sosial  
Kegiatan TKSK, bantuan pada operasionalnya TKSK sebanyak 27 orang
3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial  
Kegiatan Keluarga Harapan (PKH)

**C. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan**

**Tugas Pembantuan Provinsi**

**Dasar Pelaksanaan :**

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 400.10.2/3169/112.2/2024 tentang Penyampaian Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan ke Kabupaten dan Kota Batu untuk Honorarium Aparatur Pemerintah Desa pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.

**Program :**

Bantuan Keuangan Kabupaten Bagi Aparatur Pemerintah Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 dengan anggaran Rp2.817.600.000 yaitu untuk :

1. 462 Kepala Desa dengan anggaran Rp138.600.000;
2. 462 Sekretaris Desa dengan anggaran Rp127.050.000;



3. 1.386 Kepala Urusan dengan anggaran Rp346.500.000
4. 1.386 Kepala Seksi dengan anggaran Rp346.500.000
5. 1.431 Kepala Kewilayahan/Dusun dengan anggaran Rp357.750.000
6. 462 Staf Desa dengan anggaran Rp92.400.000.

#### **D. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**

Selain melaksanakan kegiatan yang bersumber dari APBD, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan juga melaksanakan tugas pembantuan yang bersumber dari APBN. Tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan di adalah tugas pembantuan pusat dan tugas pembantuan provinsi.

##### **Tugas Pembantuan Pusat**

##### **Dasar Pelaksanaan :**

DIPA Pusat

Tugas pembantuan pusat yang didapat Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian antara lain:

1. Penambahan Area Tanam Benih Padi Regular
2. Penambahan Area Tanam Benih Padi Pompanisasi
3. Penambahan Area Tanam Benih Padi Pompanisasi Tahap 2
4. Penanggulangan Bencana Kekeringan
5. Penanggulangan Bencana Kekeringan Tahap 2
6. Peningkatan Indeks Pertanaman
7. Sarana Pengembangan Kawasan Padi Biofortifikasi
8. Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Sarana Produksi Budidaya Padi Kaya Gizi
9. Peningkatan Indeks Pertanaman Jagung



### **Tugas Pembantuan Provinsi**

Tugas pembantuan provinsi yang didapat Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian antara lain:

1. Irigasi Perpompaan Besar Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
2. Peningkatan Indeks Pertanaman
3. Peningkatan Indeks Pertanaman
4. Peningkatan Indeks Pertanaman Jagung

### **E. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Lamongan**

#### **Tugas Pembantuan Pusat**

##### **Dasar Pelaksanaan :**

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- c. Peraturan Kepala BKKBN Nomor : 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
- d. Perjanjian Kerjasama Antara Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Timur dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan Nomor : 1328/HK.03/J1/2023 dan 000.4.7.2/65/413.109/2024 Tentang Pencapaian Kinerja Bersama Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan Dan Keluarga Berencana Dan Percepatan Penurunan Stunting Di Jawa Timur.

Instansi yang memberikan Tugas Pembantuan kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten



Lamongan yaitu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional melalui Satuan Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Propinsi Jawa Timur. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditugaskan untuk melaksanakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan dukungan anggaran dari BKKBN yang tersalurkan ke Dana APBD dan kinerja yang dilaksanakan telah mencapai target seperti yang disebutkan di dalam Perjanjian Kinerja Bersama.

**Program :**

Program KKBPK yang disalurkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Subbidang KB Fisik Subbidang KB sejumlah Rp3.676.416.000,00 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik (BOKB) sebesar Rp13.243.838.000,00.

1. Program Pengendalian Penduduk
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana
3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamongan.

**F. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan**

**Tugas Pembantuan Provinsi**

**Dasar Pelaksanaan :**

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan melakukan 3 (tiga) tugas pembantuan, antara lain :

1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
2. Program Penandaan dan Pendataan Ternak
3. Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, Mandiri dan Sejahtera (PETI KOIN BERMANTRA)

**G. Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan**

Dinas PU Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan tidak melaksanakan tugas pembantuan (NIHIL).



## H. Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan

### Tugas Pembantuan Pusat

#### Dasar Pelaksanaan :

1. Dalam tahun anggaran 2024 di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya mendapatkan mandat melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan : Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 29 Januari 2024 tentang percepatan penyediaan air minum dan layanan pengelolaan air limbah domestik.
2. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1467/KPTS/M/2024, Tanggal 27 Juni 2024 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 775/KPTS/M/2024 Tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun Anggaran 2024.
3. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1467/KPTS/M/2024, Tanggal 27 Juni 2024 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 775/KPTS/M/2024 Tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun Anggaran 2024.

#### Program Pelaksanaan Tugas Pembantuan :

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan melakukan 3 (tiga) tugas pembantuan, antara lain :

##### 1. Program BSPS

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan program bantuan perbaikan rumah yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat penerima bantuan dalam hal ini



masyarakat yang terkategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

## 2. Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM)

Program IBM bidang PUPR terdiri dari Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas)/Tempat Pengelolaan Sampah 3R (TPST 3R), Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP Phase 2), Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas (REKOMPAK) dan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TAI) serta Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) merupakan program kolaborasi Pemerintah Pusat (Bappenas, PUPR, Kemenkes, Kemendagri dan Kemendes PDTT), Pemprov, Pemkab, Pemerintah Desa dan Masyarakat untuk:

- 1) Meningkatkan akses aman air minum dan sanitasi layak yang berkelanjutan;
- 2) Meningkatkan PHBS;
- 3) Menurunkan Buang Air Sembarangan;
- 4) Menurunkan Angka Penyakit ;
- 5) Mengarus-utamakan program penyediaan akses air minum dan sanitasi melalui partisipasi aktif masyarakat.

## 3. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan

Program Kolaborasi Pemerintah Pusat (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)), Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW), Pemprov, Pemkab, Pemerintah Desa dan Masyarakat untuk :

- 1) Meningkatkan akses sanitasi layak di Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK);
- 2) Menurunkan buang air sembarangan;



- 3) Mengarus-utamakan program penyediaan akses sanitasi layak melalui partisipasi aktif masyarakat;
- 4) Menurunkan angka penyakit;
- 5) Mengurangi pencemaran lingkungan khususnya badan air;
- 6) Meningkatkan kesadaran para penghuni LPK dan Masyarakat sekitar terhadap pentingnya hidup bersih dan sehat;
- 7) Menciptakan lingkungan belajar mengajar yang aman, nyaman, bersih dan sehat;
- 8) Menggerakkan perekonomian masyarakat setempat sehingga dapat mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

## **I. Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan**

### **Tugas Pembantuan Pusat**

#### **Dasar Pelaksanaan :**

- a. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 67 tahun 2016 tentang penanggulangan penyakit Tuberkulosis;
- b. Petunjuk teknis bantuan keuangan khusus bidang kesehatan tahun 2024 ;
- c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang fasilitasi pengembangan pesantren;
- d. Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan khusus bidang kesehatan tahun 2024 ;
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2021 tentang
- f. penyelenggaraan pelayanan Kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan dan masa sesudah melahirkan pelayanan kontrasepsi dan pelayanan kesehatan seksual;
- g. Peraturan Gubernur jatim nomor 4 tahun 2010 tentang pondok Kesehatan desa jawa timur;
- h. Peraturan Gubernur jawa timur Nomor 89 Tahun 2022 tentang penjabaran APBD provinsi Jawa Timur Tahun anggaran 2024.



### **Tugas Pembantuan Pusat**

#### **Program Pelaksanaan Tugas Pembantuan :**

Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan melakukan tugas pembantuan, antara lain :

1. Program Penanggulangan Tuberkulosis  
Kegiatan : Penanggulangan Tuberkulosis

### **Tugas Pembantuan Provinsi**

#### **Program Pelaksanaan Tugas Pembantuan :**

Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan melakukan tugas pembantuan, antara lain :

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan  
Kegiatan : Advokasi, pemberdayaan, Kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kab/Kota dengan keluaran(output) 5 dokumen promkes, Advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat.
  - Orientasi pendampingan pesantren sehat
  - Pertemuan SMD(Survey Mawas Diri)
  - pertemuan MMPP(Musyawahar Masyarakat Pondok pesantren)
  - Evaluasi pendampingan pesantren sehat
  - Pembuatan Media
2. Program Pemberdayaan Bidang Kesehatan  
Kegiatan : Advokasi pemberdayaan kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah Kab / kota dengan keluaran (output) 4 dokumen promkes, advokasi kemitraan dan pemberdayaan masyarakat.
  - Rapat koordinasi pendampingan ibu hamil KEK
  - Peningkatan kapasitas kader pendampingan ibu hamil KEK
  - Evaluasi pendampingan ibu hamil KEK
  - Pembuatan Media



## **J. Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Lamongan**

### **Tugas Pembantuan Pusat**

#### **Dasar Pelaksanaan :**

1. Peraturan Presiden No. 57 Tahun 2024 Tanggal 22 April 2024 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2024;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2024;
3. Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2024.

#### **Program :**

Program Penyelenggaraan Jalan

Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Rekonstruksi Jalan

1. Rekonstruksi Jalan Pucuk – Sekaran
2. Rekonstruksi Jalan Dadapan – Solokuro
3. Rekonstruksi Jalan Kedungpring – Sukobendu
4. Rekonstruksi Jalan Sugio – Tlanak
5. Rekonstruksi Jalan Sukodadi – Plembon
6. Rekonstruksi Jalan Sumberwudi – Maduran

## **K. BLK Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Lamongan**

#### **Dasar Pelaksanaan :**

1. Undang-undang R.I. Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 31 Tentang Pelatihan Kerja;
3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 42 Tahun 2023 beserta perubahan kedua dengan Keputusan Presiden R.I. Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);



4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara dan Barang Milik Negara Bidang Ketenagakerjaan;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Ketenagakerjaan;
7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai Latihan Kerja Sidoarjo Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-026.13.2.050302/2024 Tanggal 30 November 2023;
8. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Sidoarjo Nomor 2.21/13/KU.02/I/2024.

### **Tugas Pembantuan Pusat**

#### **Program :**

Program 6 Paket Pelatihan

1. Pelatihan Pembuatan Roti dan Kue Sebanyak 32 Orang
2. Tata Rias Pengantin dan Hantaran 16 Orang
3. Plate Welder SMAW 2G 16 Orang
4. Menjahit Pakaian Wanita Dewasa 32 Orang
5. Service Sepeda Motor Sistem Injeksi 16 Orang
6. Desain Grafis Muda 16 Orang

### **3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan**

#### **A. Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan**

##### **Tugas Pembantuan**

Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan tidak melaksanakan tugas pembantuan (NIHIL).



## **B. Dinas Sosial Kabupaten Lamongan**

### **Tugas Pembantuan Pusat**

Capaian kinerja tugas pembantuan pusat yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial  
Dengan Alokasi Anggaran Rp 19.805.113.322,00 dan Realisasi Anggaran Rp 19.805.113.322,00
2. Pengelolaan Data Fakir Miskin  
Dengan Alokasi Anggaran Rp 19.679.596.678,00 dan Realisasi Anggaran Rp 19.679.596.678,00
3. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga  
Dengan Alokasi Anggaran Rp 16.825.413.839,00 dan Realisasi Anggaran Rp 16.825.413.839,00
4. Pemberian Bantuan Non Tunai ke KPM PKH  
Dengan Alokasi Anggaran Rp16.558.663.943,00 dan Realisasi Anggaran Rp16.558.663.943,00

### **Tugas Pembantuan Provinsi**

Capaian kinerja tugas pembantuan provinsi yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

1. Bidang Rehabilitasi Sosial  
Pemberian bantuan pada disabel berat dengan Alokasi Anggaran Rp 223.300.000,00 dan Realisasi Anggaran Rp 223.300.000,00
2. Bidang Pemberdayaan Sosial  
Pemberian operasional pada Tenaga Kesejahteraan Sosial Tenaga Kecamatan dengan Alokasi Anggaran Rp 81.000.000,00 dan Realisasi Anggaran Rp 81.000.000,00
3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial



4. Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga dengan Alokasi Anggaran RP 5.946.500.00,00 dan Realisasi Anggaran Rp 5.946.500.000,00 yang terbagi pada 4 tahapan.

**C. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan**

**Tugas Pembantuan Provinsi**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan melaksanakan tugas pembantuan provinsi yaitu Bantuan Keuangan Kabupaten Bagi Aparatur Pemerintah Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 dengan anggaran Rp2.817.600.000, teralisasi Rp2.061.150.000,00 dikarenakan tugas pembantuan dilaksanakan pada bulan desember atau di akhir tahun dan jangka waktu pencairan yang singkat serta tingkat keterisian Aparatur Pemerintah Desa yang belum maksimal.

**D. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan**

**Tugas Pembantuan Pusat**

Capaian kinerja tugas pembantuan pusat yang telah dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Kawasan Jagung Penambahan Area Tanam Benih Padi Regular
  - a. 125.525 kg benih padi Inpari 32 dan Inpari 42
2. Penambahan Area Tanam Benih Padi Pompanisasi
  - a. 155.150 kg benih padi Inpari 32 dan Inpari 42
3. Penambahan Area Tanam Benih Padi Pompanisasi Tahap 2
  - a. 5.500 kg benih padi Inpari 32 dan Inpari 42
4. Penanggulangan Bencana Kekeringan
  - a. 109.125 kg benih padi Inpari 32 dan Ciherang
5. Penanggulangan Bencana Kekeringan Tahap 2
  - a. 86.900 kg benih padi IPB 9G



6. Peningkatan Indeks Pertanaman
  - a. 40.225 kg benih padi Inpari 32, Inpari 33, Inpari 42, Pak Tiwi, dan Mekongga
7. Sarana Pengembangan Kawasan Padi Biofortifikasi
  - a. 20 paket benih Onpari Nutrizinc dan pupuk NPK dan pupuk hayati
8. Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Sarana Produksi Budidaya Padi Kaya Gizi:  
7 paket benih padi Inpari Nutrizinc dan pupuk NPK dan Pupuk Hayati
9. Peningkatan Indeks Pertanaman Jagung:
  - a. 182.645 kg benih jagung P40, Pertiwi 3, NK 212

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan telah melaksanakan tugas pembantuan dengan realisasi kinerja 100% atau telah terlaksana seluruhnya.

### **Tugas Pembantuan Provinsi**

Capaian kinerja tugas pembantuan pusat yang telah dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

1. Irigasi Perpompaan Besar Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
  - a. 6 paket prasarana irigasi perpompaan
  - b. 120 unit pompa air
2. Peningkatan Indeks Pertanaman
  - a. 100.000 kg benih padi Inpari 32
3. Peningkatan Indeks Pertanaman
  - a. 9 paket benih padi Inpari Nutrizinc dan NPK beserta pupuk hayati
4. Peningkatan Indeks Pertanaman Jagung
  - a. 45.000 kg benih jagung Bisi 321



Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan telah melaksanakan tugas pembantuan dengan realisasi kinerja 100% atau telah terlaksana seluruhnya.

**E. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Lamongan**  
**Tugas Pembantuan Provinsi**

Anggaran yang telah dialokasikan untuk Tugas Pembantuan telah dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan terealisasi sebesar Rp13.075.769.450,00 atau 98,73% (Sumber Anggaran BOKB) dan Rp3.565.537.132,00 atau 96,98% (Sumber Anggaran DAK Fisik). Adapun rincian realisasi kegiatan adalah sebagai berikut : Program Pengendalian Penduduk, dengan kegiatan :

1. Program Pengendalian Penduduk
  - a. Pencatatan dan Pengumpulan Data telah terealisasi sebesar Rp51.299.800,00.
  - b. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB telah terealisasi sebesar Rp. 136.004.550,00.
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana
  - a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal, dengan sub kegiatan:
    - 1) Pengendalian Program KKBPK telah terealisasi sebesar Rp78.299.800,00;
    - 2) Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai Penyuluhan KKBPK telah terealisasi sebesar Rp674.468.100,00;
    - 3) Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan



- Mini Lokakarya (Minilok) telah terealisasi sebesar Rp404.999.900,00;
- 4) Promosi dan KIE Program Bangga Kencana melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang telah terealisasi sebesar Rp98.449.300,00;
  - 5) Advokasi Program Bangga Kencana kepada Stakeholder dan Mitra Kerja telah terealisasi sebesar Rp. 189.640.000,00.
- b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dengan sub kegiatan:
- 1) Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) telah terealisasi sebesar Rp1.705.524.900,00.
- c. Pengendalian dan Pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta Pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan:
- 1) Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya telah terealisasi sebesar Rp30.497.500,00;
  - 2) Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) telah terealisasi Rp1.025.772.900,00;
  - 3) Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya telah teralisasi sebesar Rp32.499.900,00
- d. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB dengan sub kegiatan: Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB telah terealisasi sebesar Rp.2.950.000,00 dan Pelaksanaan dan Pengelolaan



Program KKBPK di Kampung KB telah terealisasi  
Rp.1.748.499.800,00

3. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
  - a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan sub kegiatan:
    - 1) Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS) telah terealisasi Rp294.110.000,00;
    - 2) Penyediaan Biaya Operasional bagi pengelolaan dan pelaksanaan Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) telah terealisasi Rp6.542.767.000,00.
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
  - a. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / verifikasi Keuangan SKPD diperuntukan untuk Dukungan Operasional dalam Pembiayaan Pengelola Keuangan BOKB. Seperti pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam lingkup pengelolaan dana BOKB. Dengan realisasi anggaran Rp59.985.900,00.

**F. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan**  
**Tugas Pembantuan Provinsi**

Capaian kinerja tugas pembantuan provinsi yang telah dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

1. Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas  
Program dan Kegiatan yang bersumber dari APBN (Satker Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur) dengan alokasi anggaran



total sebesar Rp 4.998.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.454.175.000,00 (29,09%).

2. Program Penandaan dan Pendataan Ternak

Program dan kegiatan yang bersumber dari APBN (Satker Peternakan Provinsi Jawa Timur) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 248.000.000,00 dan sudah terealisasi sebesar Rp. 248.000.000,00 (100%).

3. Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, Mandiri dan Sejahtera (Peti Koin Bermantra)

Program dan Kegiatan bersumber dari APBD (Satker Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur) dengan Hibah Ternak berupa kambing Jantan 3 ekor dan kambing betina 27 ekor yang diterimakan di Kelompok Ternak Panjeran Mulyo Desa Mantup Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan.

**G. Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan**

**Tugas Pembantuan Provinsi**

Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan tidak melaksanakan tugas pembantuan (NIHIL).

**H. Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan**

**Tugas Pembantuan Pusat**

Capaian kinerja tugas pembantuan pusat yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Cipta Karya diantaranya :

1. Program BSPS

Kegiatan Program BSPS di Kabupaten Lamongan pada tahun anggaran 2024 fokus pada Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Dalam Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting dengan anggaran sebesar Rp. 220.000.000,- dan terealisasi 100%.



Terdapat 39 unit rumah penerima program BSPS ini.

2. Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) / PAMSIMAS  
Kegiatan Pamsimas di Kabupaten Lamongan pada tahun anggaran 2024 fokus ke Pembinaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan anggaran sebesar Rp. 2.400.000.000,- dan terealisasi 100%.Terdapat 6 desa penerima program PAMSIMAS ini.
3. Program Penyediaan Air Minum SPAM  
Program Penyediaan Air Minum SPAM REGIONAL MOJALGRES di Kabupaten Lamongan pada tahun anggaran 2024 fokus pada penanganan air limbah/sanitasi pada lingkungan Lembaga Pendidikan Keagamaan dengan anggaran sebesar Rp. 3.668.897.000,- dan terealisasi 100%.  
Terdapat 3 desa penerima program Air Minum SPAM ini.

#### **I. Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan**

##### **Tugas Pembantuan Pusat**

Program dan Kegiatan yang direalisasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten lamongan pada tahun 2024 pada penanggulangan Tuberculosis (TB Paru) melalui kegiatan packing sputum, pengemasan specimen ke balai besar laboratorium kesehatan Surabaya, pengiriman specimen ke balai besar laboratorium kesehatan Surabaya, croscek fee. berasal dari dana bantuan keuangan hibah global found anggaran Rp.229.890.000 terealisasi sebesar Rp.229.890.000 atau 100%.

##### **Tugas Pembantuan Provinsi**

Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan pada Tahun 2024, pada pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui kegiatan : Advokasi pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat kab/ kota pendampingan



pesantren sehat berasal dari dana BK anggaran Rp 36.366.500 terealisasi sebesar Rp 35.396.200 atau 97%, pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui kegiatan : Advokasi pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kab / kota dengan rincian kegiatan pendampingan Ibu hamil KEK berasal dari dana BK anggaran Rp 119.477.000 atau sebesar 99% terealisasi sebesar Rp 117.819.650 atau 100% dan program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dengan anggaran Rp 6.360.000 atau 100% dan terealisasi sebesar Rp 6.360.000 atau 100%.

## **J. Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Lamongan**

### **Tugas Pembantuan Pusat**

Capaian kinerja tugas pembantuan pusat yang dilaksanakan oleh Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan diantaranya :

#### **A. Dana Alokasi Khusus (DAK)**

1. Rekonstruksi Jalan Pucuk – Sekaran
  - a. Target Anggaran: Rp. 9.400.061.475
  - b. Target Fisik : 2,45 Km
2. Rekonstruksi Jalan Ruas Dadapan – Solokuro
  - a. Target Anggaran: Rp. 4.290.351.528
  - b. Target Fisik : 1,129 Km
3. Rekonstruksi Jalan Ruas Kedungpring – Sukobendu
  - a. Target Anggaran: Rp. 6.546.143.700
  - b. Target Fisik : 1,65 Km
4. Rekonstruksi Jalan Ruas Sugio – Tlanak
  - a. Target Anggaran: Rp. 7.192.265.200
  - b. Target Fisik : 1,805 Km
5. Rekonstruksi Jalan Ruas Sukodadi – Plembon
  - a. Target Anggaran: Rp. 11.830.026.800
  - b. Target Fisik : 2,99 Km
6. Rekonstruksi Jalan Ruas Sumberwudi – Maduran



- a. Target Anggaran: Rp. 9.027.203.900
  - b. Target Fisik : 2,572 Km
- B. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT)
- 1. Rekonstruksi Jalan Ruas Mojorejo-Jegreg
    - a. Target Anggaran : Rp.3.160.522.000
    - b. Target Fisik : 1,596 Km
  - 2. Rekonstruksi Jalan Ruas Mojorejo-Medalem
    - a. Target Anggaran : Rp. 1.182.425.000
    - b. Target Fisik : 0,537 Km
  - 3. Rekonstruksi Jalan Ruas Cangkring-Talunrejo
    - a. Target Anggaran : Rp. 2.943.357.000
    - b. Target Fisik : 1,162 Km
  - 4. Rekonstruksi Jalan Ruas Kalen-Jatipayak
    - a. Target Anggaran : Rp. 1.860.610.000
    - b. Target Fisik : 0,890 Km
  - 5. Rekonstruksi Jalan Ruas Tanjung-Songowareng
    - a. Target Anggaran : Rp. 4.759.189.800
    - b. Target Fisik : 1,468 Km
  - 6. Rekonstruksi Jalan Ruas Ngimbang-Bluluk
    - a. Target Anggaran : Rp. 2.135.874.800
    - b. Target Fisik : 1,410 Km

**K. BLK Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Lamongan**  
**Tugas Pembantuan Pusat**

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan pada tahun 2024 mendapat mendapatkan tugas pembantuan pelatihan dari dana APBN dengan alokasi target pelatihan kompetensi sebanyak 6 (enam) paket pelatihan meliputi :

- 1. Pelatihan Pembuatan Roti dan Kue Sebanyak 32 Orang
- 2. Tata Rias Pengantin dan Hantaran 16 Orang
- 3. Plate Welder SMAW 2G 16 Orang
- 4. Menjahit Pakaian Wanita Dewasa 32 Orang



5. Service Sepeda Motor Sistem Injeksi 16 Orang
6. Desain Grafis Muda 16 Orang

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp 645.014.000.00-; dan terealisasi Rp 644.426.500.00-; atau 99.91% tetapi fisik sebesar 100%, dengan jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi sebanyak 128 peserta. Program ini sangatlah strategis untuk meningkatkan skill individu untuk menghadapi dunia kerja.



### 3.1. Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten/Kota

Tugas pembantuan pusat merupakan tugas pembantuan dari kementerian/lembaga yang ditugaskan kepada daerah kabupaten/kota.

#### 3.1.1. Target Kinerja

##### A. Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan tidak melaksanakan tugas pembantuan (NIHIL).

##### B. Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

###### Tugas Pembantuan Pusat

Target kinerja tugas pembantuan pusat yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

1. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

a. Kegiatan Keluarga Harapan

b. Kegiatan PBI JKN

2. Bidang Penanganan Fakmis

Kegiatan Penerima Bantuan Sembako dengan dana APBN, adapun dana bantuan dipergunakan untuk masyarakat miskin.

3. Bidang Rehabilitasi Sosial



Kegiatan Penyandang Disabilitas sumber dana APBD PROV

4. Bidang Pemberdayaan Sosial

Kegiatan TKSK, bantuan pada operasionalnya TKSK sebanyak 27 orang dengan dekon alokasi anggaran sebesar RP.81.000.000,00

**Tugas Pembantuan Provinsi**

Target Kinerja

1. Bidang Rehabilitasi Sosial  
Kegiatan Penyandang Disabilitas Sumber dana APBD PROV
2. Bidang Pemberdayaanaan Sosial.  
Kegiatan TKSK, bantuan pada Operasionalnya TKSK sebanyak 27 orang.
3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial  
Kegiatan Keluarga Harapan (PKH).

**C. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan**

**Tugas Pembantuan Pusat**

Target kinerja tugas pembantuan pusat yang telah dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

1. Penambahan Area Tanam Benih Padi Regular



- 125.525 kg benih padi Inpari 32 dan Inpari
2. Penambahan Area Tanam Benih Padi Pompanisasi
  - 155.150 kg benih padi Inpari 32 dan Inpari 42
3. Penambahan Area Tanam Benih Padi Pompanisasi Tahap 2
  - 5.500 kg benih padi Inpari 32 dan Inpari 42
4. Penanggulangan Bencana Kekeringan
  - 109.125 kg benih padi Inpari 32 dan Ciherang
5. Penanggulangan Bencana Kekeringan Tahap 2
  - 86.900 kg benih padi IPB 9G
6. Peningkatan Indeks Pertanaman
  - 400.225 kg benih padi Inpari 32, Inpari 33, Inpari 42, Pak Tiwi, dan Mekongga
7. Sarana Pengembangan Kawasan Padi Biofortifikasi
  - 20 paket benih Onpari Nutrizinc dan pupuk NPK dan pupuk hayati
8. Pengelolaan Produksi Tanaman Serealisa Sarana Produksi Budidaya Padi Kaya Gizi:
  - 7 paket benih padi Inpari Nutrizinc dan pupuk NPK dan Pupuk Hayati
9. Peningkatan Indeks Pertanaman Jagung:
  - 182.645 kg benih jagung P40, Pertiwi 3, NK 212



### **Tugas Pembantuan Provinsi**

Target kinerja tugas pembantuan provinsi yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan adalah:

1. Irigasi Perpompaaan Besar Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
  - 6 paket prasarana irigasi perpompaaan
  - 120 Unit Pompa Air
2. Peningkatan Indeks Pertanaman
  - 100.000 kg benih padi Inpari 32
3. Peningkatan Indeks Pertanaman
  - 9 paket benih padi Inpari Nutrizinc dan NPK beserta pupuk hayati
4. Peningkatan Indeks Pertanaman Jagung
  - 45.000 kg benih jagung Bisi 321

### **D. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Lamongan**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan Tugas Pembantuan yang didukung oleh anggaran dari Dana Transfer ke Daerah untuk Program Banggkencana yang disalurkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Subbidang KB sejumlah Rp3.676.416.000,00 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik (BOKB) sebesar Rp13.243.838.000,00 yang selanjutnya diwujudkan ke dalam program dan kegiatan sebagai berikut:



1. Program Pengendalian Penduduk dengan kegiatan :
  - a. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga dengan alokasi dana sebesar Rp.51.300.000,00 yang dipergunakan untuk uang saku operator aplikasi Newsiga di semua fasilitas kesehatan dan Balai Penyuluh KB yang ada di Kabupaten Lamongan selama 12 bulan.
  - b. Pengolahan dan Pelaporan Data Keluarga dengan alokasi dana sebesar Rp. 162.000.000,00 yang dipergunakan untuk pembayaran fasilitas wifi di Balai Penyuluh KB sekabupaten Lamongan sebagai sarana dalam penginputan data di aplikasi Newsiga.
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana
  - a. Pengendalian Program KKBPK dengan alokasi dana sebesar Rp.80.000.000,00 yang dipergunakan untuk melaksanakan audit kasus stunting, yaitu melakukan evaluasi terkait kegiatan yang mendukung percepatan penurunan stunting. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 kali.
  - b. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana dengan alokasi dana sebesar Rp. 675.000.000,00 yang diperuntukkan untuk kegiatan penyuluhan KB, pembinaan Kader IMP (PPKBD dan Sub PPKBD) serta pengolahan data.
  - c. Pelaksanaan Mekansisme Operasional Program Banggakencana melalui Rakorcam, Rakordes, dan Minilok dengan alokasi dana sebesar Rp. 405.000.000,00.
  - d. Promosi dan KIE Program Banggakencana melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang dengan alokasi dana sebesar Rp. 100.000.000,00 yang diperuntukkan untuk bahan promosi seperti leaflet, banner, dll.



- e. Advokasi Program Banggakencana oleh pokja advokasi kepada stakeholder dan mitra kerja dengan alokasi dana sebesar Rp. 200.000.000,00.
  - f. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.706.400.000,00.
  - g. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.196.118.000,00 yang dipergunakan untuk Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya, Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) dan Pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya.
  - h. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.752.250.000,00. yang diperuntukkan untuk melaksanakan integrasi pembangunan lintas sektor di kampung KB dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Kampung Keluarga Berkualitas.
3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
- a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang digunakan untuk peningkatan pengetahuan terkait ketahanan keluarga berikut dengan



pengadaan sarana prasarana (BKB Kit Stunting), Penyediaan biaya operasional bagi pendampingan catin, bumil, dan pasca lahir dengan Alokasi anggaran Rp. 6.855.600.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.836.877.000,00.

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
  - a. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / verifikasi Keuangan SKPD diperuntukan untuk Dukungan Operasional dalam Pembiayaan Pengelola Keuangan BOKB. Seperti pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam lingkup pengelolaan dana BOKB. Dengan alokasi anggaran Rp. 60.000.000,00.

#### **E. Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan**

Dinas PU Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan tidak melaksanakan tugas pembantuan (NIHIL).

#### **F. Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan**

Target kinerja tugas pembantuan pusat yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

1. Program BSPS

Target Program BSPS tahun 2024 terdapat pada 1 desa, yakni Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong.

2. Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) / PAMSIMAS

Target program padat karya Pamsimas pada tahun anggaran 2023 ditargetkan untuk 6 desa, yaitu :



- Desa Sembung Kecamatan Sukorame
  - Desa Sewor Kecamatan Sukorame
  - Desa Cerme Kecamatan Ngimbang
  - Desa Brumbun Kecamatan Maduran
  - Desa Kuripan Kecamatan Babat
  - Desa Pataan Kecamatan Sambeng
3. Program Penyediaan Air Minum SPAM REGIONAL MOJALGRES Program Penyediaan Air Minum SPAM REGIONAL MOJALGRES tahun anggaran 2024 ditargetkan untuk 3 desa, yaitu :
- Desa Takeranklanting
  - Desa Dukuh Agumg
  - Desa Pengumbulanadi

#### **G. Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Lamongan**

Target kinerja tugas pembantuan pusat yang telah dilaksanakan oleh Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

##### **Dana Alokasi Khusus (DAK)**

1. Rekonstruksi Jalan Ruas Pucuk – Sekaran
  - a. Target Anggaran : Rp. 9.812.173.000
  - b. Target Fisik : 2,45 Km



2. Rekonstruksi Jalan Ruas Dadapan – Solokuro
  - a. Target Anggaran : Rp. 4.500.000.000
  - b. Target Fisik : 1,129 Km
3. Rekonstruksi Jalan Ruas Kedungpring – Sukobendu
  - a. Target Anggaran : Rp. 6.863.811.000
  - b. Target Fisik : 1,65 Km
4. Rekonstruksi Jalan Ruas Sugio – Tlanak
  - a. Target Anggaran : Rp. 7.375.000.000
  - b. Target Fisik : 1,805 Km
5. Rekonstruksi Jalan Ruas Sukodadi – Plembon
  - a. Target Anggaran : Rp. 12.100.000.000
  - b. Target Fisik : 2,99 Km
6. Rekonstruksi Jalan Ruas Sumberwudi – Maduran
  - a. Target Anggaran : Rp. 9.206.689.000
  - b. Target Fisik : 2,572 Km

**Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT)**

1. Rekonstruksi Jalan Ruas Mojorejo-Jegreg
  - a. Target Anggaran : Rp. 3.255.848.500



- b. Target Fisik : 1,596 Km
- 2. Rekonstruksi Jalan Ruas Mojorejo-Medalem
  - a. Target Anggaran : Rp. 1.200.000.000
  - b. Target Fisik : 0,537 Km
- 3. Rekonstruksi Jalan Ruas Cangkring-Talunrejo
  - a. Target Anggaran : Rp. 3.000.000.000
  - b. Target Fisik : 1,162 Km
- 4. Rekonstruksi Jalan Ruas Kalen-Jatipayak
  - a. Target Anggaran : Rp. 1.900.000.000
  - b. Target Fisik : 0,890 Km
- 5. Rekonstruksi Jalan Ruas Tanjung-Songowareng
  - a. Target Anggaran : Rp. 4.843.000.000
  - b. Target Fisik : 1,468 Km
- 6. Rekonstruksi Jalan Ruas Ngimbang-Bluluk
  - a. Target Anggaran : Rp. 2.165.458.151
  - b. Target Fisik : 1,410 Km



#### **H. BLK Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Lamongan**

Target kinerja tugas pembantuan pusat yang telah dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

1. Pelatihan Pembuatan Roti dan Kue Sebanyak 32 Orang
2. Tata Rias Pengantin dan Hantaran 16 Orang
3. Plate Welder SMAW 2G 16 Org
4. Menjahit Pakaian Wanita Dewasa 32 Orang
5. Service Sepeda Motor Sistem Injeksi 16 Orang
6. Desain Grafis Muda 16 Orang

#### **3.1.2. Realisasi**

##### **A. Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan**

Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan tidak melaksanakan tugas pembantuan (NIHIL).



**B. Dinas Sosial Kabupaten Lamongan**

**Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat  
Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2024**

No	K/LP NK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana a TP	Tah ap	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Kemensos	Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan	Program: Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kab. Lamongan	Dinsos Kab. Lamongan	1	19.805.113.322	19.805.113.322	100%	19.805.113.322	100%	38.095 KPM
			Kegiatan: Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota			2	19.679.596.678	19.679.596.678	100%	19.679.596.678	100%	37.878 KPM
			Sub Kegiatan: Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga			3	16.825.413.839	16.825.413.839	100%	16.825.413.839	100%	32.409 KPM
			Keluaran(Output): terlaksananya bantuan uang non tunai pada komponen KPM PKH di Kab.Lamongan			4	16.558.663.943	16.558.663.943	100%	16.558.663.943	100%	31.966 KPM
			Rincian Kegiatan: pemberian bantuan uang non tunai ke KPM PKH									

Sumber : Data Dinas Sosial Kabupaten Lamongan, 2024 (diolah)



### **C. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan**

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan telah melaksanakan tugas pembantuan dengan realisasi kinerja 100% atau telah terlaksana seluruhnya. Rincian realisasi kinerja tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan tertera dalam tabel di bawah ini.



**Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat  
Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan Tahun 2024**

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi			SKPD Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Hambatan/Permasalahan dan Upaya Penyelesaian
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12
	Kementerian Pertanian		Penambahan Area Tanam Benih Padi Regular (125.525 Kg)	Kalitengah	Dibee	Sumber Rejeki 01	DKPP Lamongan				6250	100	
			Benih Padi Inpari 32	Kalitengah	Dibee	Sumber Rejeki III	DKPP Lamongan				1250	100	
			Benih Padi Inpari 42	Kalitengah	Pengangsalan	Suka Maju II	DKPP Lamongan				750	100	
				Kalitengah	Kuluran	Tumbuh II	DKPP Lamongan				625	100	
				Babat	Kebalandono	Tani mulyo	DKPP Lamongan				1250	100	
				Paciran	Kranji	Sidodadi	DKPP Lamongan				625	100	
				Paciran	Kranji	Tani Makmur	DKPP Lamongan				625	100	
				Paciran	Paciran	Tani Bahari	DKPP Lamongan				250	100	
				Paciran	Sumurgayam	Mekar Jaya	DKPP Lamongan				375	100	
				Paciran	Sumurgayam	Loh Jinawi	DKPP Lamongan				375	100	
				Paciran	Sendangagung	Sido Subur	DKPP Lamongan				625	100	
				Paciran	Sendangagung	Sumber Makmur	DKPP Lamongan				500	100	
				Paciran	Tunggul	Tani Makmur	DKPP Lamongan				625	100	
				Paciran	Drajat	Tani Utomo I	DKPP Lamongan				375	100	
				Brondong	Sendangharjo	Wanaasri	DKPP Lamongan				625	100	
				Brondong	Sendangharjo	Trubus Trubus Benges	DKPP Lamongan				625	100	
				Brondong	Lembor	Ngudi Makmur Lembor	DKPP Lamongan				625	100	
				Brondong	Lembor	Hijau Lestari Lembor	DKPP Lamongan				625	100	
				Brondong	Lembor	Rukun Makmur Desa Lembor Kecamatan Brondong	DKPP Lamongan					100	
				Brondong	Brengkok	Anugerah	DKPP Lamongan				625	100	
				Brondong	Brengkok	Anugerah Dua	DKPP Lamongan				625	100	
				Brondong	Sidomukti	Dewi Sri Desa Sidomukti	DKPP Lamongan				625	100	
				Brondong	Sidomukti	Sumber pangan Desa Sidomukti Kecamatan Brondong	DKPP Lamongan					100	
				Sugio	Sekarbagus	Sari Rukun Sumuran	DKPP Lamongan				625	100	
				Sugio	Sekarbagus	Margo Mulyo Wonosari	DKPP Lamongan				625	100	
				Sugio	Sekarbagus	Sari Rukun Babatan	DKPP Lamongan				625	100	
				Sugio	Deketagung	Karya Makmur Deket	DKPP Lamongan				625	100	
				Sugio	Deketagung	Tani Karya Raharja	DKPP Lamongan				625	100	
	Lamongan			Kramat		Pasti Makmur Kramat	DKPP Lamongan				1000	100	
	Lamongan			Kramat		Ngablak Jaya	DKPP Lamongan				1000	100	
	Lamongan			Kramat		Kertoraharjo Cekel	DKPP Lamongan				625	100	
	Lamongan			Rancangkencono		Sumber Sari Banjarsari	DKPP Lamongan				1000	100	
	Lamongan			Rancangkencono		Bina Mukti SKP	DKPP Lamongan				1000	100	
	Lamongan			Rancangkencono		Bina Makmur RCG	DKPP Lamongan				1125	100	
	Lamongan			Rancangkencono		Sumber Rejeki Bangkal	DKPP Lamongan				1125	100	
	Lamongan			Wajik		Tani Subur 01 Wajik	DKPP Lamongan				1500	100	
	Lamongan			Wajik		Tani Subur 02 Wajik	DKPP Lamongan				1125	100	
	Lamongan			Wajik		Gemah Ripah Kliteh	DKPP Lamongan				750	100	
	Lamongan			Sidoarjo		Murah Mulyo	DKPP Lamongan				1000	100	
	Lamongan			Sumberjo		Tani Subur Sawu	DKPP Lamongan				1500	100	
	Lamongan			Sendangrejo		Gemah Ripah Blungkan	DKPP Lamongan				1125	100	
	Lamongan			Sendangrejo		Gemah Ripah Jagul	DKPP Lamongan				1125	100	
	Lamongan			Sendangrejo		Sendangrejo	DKPP Lamongan						
	Lamongan			Kebet		Karya Bakti 02 Sempu	DKPP Lamongan				750	100	



			Lamongan	Pangkatrejo	Tani Maju 03	DKPP Lamongan				1250	100	
			Lamongan	Sidomukti	Tentrem Rahayu Kalikapas	DKPP Lamongan				750	100	
			Lamongan	Karanglangit	Karang Mulyo 01 Karangtapan	DKPP Lamongan				750	100	
			Lamongan	Karanglangit	Karanglangit	DKPP Lamongan				750	100	
			Lamongan	Jetis	Perintis	DKPP Lamongan				750	100	
			Lamongan	Tanjung	Hasil bakti 01	DKPP Lamongan				625	100	
			Lamongan	Tanjung	Hasil bakti 02 Tjg	DKPP Lamongan				625	100	
			Lamongan	Banjarmendalan	Banjar Mulyo 01	DKPP Lamongan				1250	100	
			Sukodadi	Kadungrebug	Margo Mulyo	DKPP Lamongan				875	100	
			Sukodadi	Kadungrebug	Margo Subur	DKPP Lamongan				750	100	
			Sukodadi	Kadungrebug	Margo Joyo	DKPP Lamongan				875	100	
			Modo	Medalem	Aneka Tani Satu	DKPP Lamongan				1250	100	
			Modo	Medalem	Aneka Tani Dua Ngangkrok	DKPP Lamongan				1250	100	
			Modo	Medalem	Tani Agung Brongkah	DKPP Lamongan				1125	100	
			Modo	Medalem	Usaha Makmur Kelor	DKPP Lamongan				1125	100	
			Modo	Kedungpengaron	Tani Mandiri Kalibanjar	DKPP Lamongan				1000	100	
			Modo	Kedungpengaron	Tani Mulyo Banjaringas	DKPP Lamongan				1000	100	
			Modo	Kedungpengaron	Srilestari Nglayut	DKPP Lamongan				1250	100	
			Modo	Kedungpengaron	Budi Luhur Mlaten	DKPP Lamongan				1000	100	
			Modo	Kedungpengaron	Sumber Rejeki Sumberwungu	DKPP Lamongan				1000	100	
			Modo	Mojorejo	Sido Maju Sidolegi	DKPP Lamongan				1250	100	
			Modo	Mojorejo	Margo Rukun Gonjo	DKPP Lamongan				1250	100	
			Modo	Mojorejo	Rekso Mulyo Bendo	DKPP Lamongan				1250	100	
			Modo	Mojorejo	Murah Pangan	DKPP Lamongan				1250	100	
			Modo	Sumberagung	Sumber karya pulo	DKPP Lamongan				1250	100	
			Modo	Sumberagung	Karya Agung dua trongelo	DKPP Lamongan				1250	100	
			Modo	Sumberagung	Merpati Putih Trongglonggong	DKPP Lamongan				1250	100	
			Modo	Sumberagung	Banyu mili Sumberjo	DKPP Lamongan				1250	100	
			Modo	Sumberagung	Lancar Tani Pulorejo	DKPP Lamongan				625	100	
			Modo	Sumberagung	Kedungturi lancar Jaya	DKPP Lamongan				625	100	
			Modo	Pule	Ngudi Makmur Jimus	DKPP Lamongan				1250	100	
			Modo	Pule	Pangkatrejo	DKPP Lamongan				1250	100	
			Modo	Pule	Dewi Sri Pule	DKPP Lamongan				1000	100	
			Modo	Pule	Terus Maju	DKPP Lamongan				1250	100	
			Modo	Pule	Mekar Tani Sreto	DKPP Lamongan				1000	100	
			Modo	Pule	Mekar Tani Gebang	DKPP Lamongan				500	100	
			Modo	Yungyang	Tani Sejahtera	DKPP Lamongan				1250	100	
			Modo	Yungyang	Tani Raharjo Guwo	DKPP Lamongan				625	100	
			Modo	Yungyang	Sumber Rejeki Yungyang	DKPP Lamongan				1250	100	
			Modo	Yungyang	Mugi Mulyo	DKPP Lamongan				1250	100	
			Modo	Sidodowo	Sido Unggul gowah	DKPP Lamongan				1250	100	
			Modo	Sidodowo	Mekar Sari Kedungsoqo	DKPP Lamongan				1250	100	
			Modo	Kedunglerep	Pari Murni Rebuloh	DKPP Lamongan				1250	100	



			Modo	Kedunglerep	Sumber pari	DKPP Lamongan			1250	100	
			Modo	Kedunglerep	Kedungpari Terban	DKPP Lamongan			1250	100	
			Modo	Jegreg	Rukun Tani Kampak	DKPP Lamongan			1250	100	
			Modo	Jegreg	Sri jaya Jegreg	DKPP Lamongan			1250	100	
			Modo	Jegreg	Tani makmur Balong	DKPP Lamongan			1250	100	
			Modo	Jegreg	Maju Tani Samben	DKPP Lamongan			1250	100	
			Modo	Jegreg	Rejeki Calonan	DKPP Lamongan			625	100	
			Modo	Kacangan	Mardi bogo kacang	DKPP Lamongan			1250	100	
			Modo	Kacangan	Tani Asli Keplak	DKPP Lamongan			750	100	
			Modo	Kacangan	Margo rukun Lengkir	DKPP Lamongan			1250	100	
			Modo	Kacangan	Ngudi Makmur Kepoh	DKPP Lamongan			875	100	
			Modo	Sambangrejo	Tani Murni Graman	DKPP Lamongan			1250	100	
			Modo	Sambangrejo	Tani Sejati Parengan	DKPP Lamongan			1000	100	
			Modo	Sambangrejo	Tani Makmur Sambangan	DKPP Lamongan			1250	100	
			Modo	Kedungrejo	Margo Dadi Satu Topang	DKPP Lamongan			1000	100	
			Modo	Kedungrejo	Margo Dadi Dua Gabang	DKPP Lamongan			625	100	
			Modo	Kedungrejo	Margo Utomo Dopok	DKPP Lamongan			1250	100	
			Modo	Kedungrejo	Sri Rejeki Karangpilang	DKPP Lamongan			1250	100	
			Modo	Sambungrejo	Luhur Mambung	DKPP Lamongan			1250	100	
			Modo	Sambungrejo	Makmur Besar	DKPP Lamongan			875	100	
			Modo	Sambungrejo	Subur Jantok	DKPP Lamongan			875	100	
			Modo	Sidodowo	Tani Mulyo Bunder	DKPP Lamongan			675	100	
			Modo	Sidodowo	Sri Pucung Bringin	DKPP Lamongan			1250	100	
			Modo	Sidodowo	Sumber Makmur Kedungsari	DKPP Lamongan			1250	100	
			Modo	Sidodowo	Jumpa Jaya	DKPP Lamongan			850	100	
			Modo	Sidodowo	Margo Utomo Tutup	DKPP Lamongan			1250	100	
			Modo	Sidodowo	Sri Rejeki Kedung Dowo	DKPP Lamongan			1250	100	
			Modo	Jatipayak	Rukun Tani jati	DKPP Lamongan			1250	100	
			Modo	Jatipayak	Sumber rejeki prayungan	DKPP Lamongan			1000	100	
			Modo	Jatipayak	Sumber Rejeki Ngelo	DKPP Lamongan			1250	100	
			Modo	Jatipayak	Rukun Bahagia jegreg	DKPP Lamongan			1000	100	
			Modo	Jatipayak	Mulyo Bolong	DKPP Lamongan			1000	100	
			Modo	Sidomulyo	Ngudi Luhur songaran	DKPP Lamongan			875	100	
			Modo	Sidomulyo	Srirahayu Pleding	DKPP Lamongan			625	100	
			Modo	Sidomulyo	sido Rukun Semampir	DKPP Lamongan			2875	100	
			Modo	Kedungwaras	Mayar	DKPP Lamongan			1250	100	
			Modo	Kedungwaras	Petani Murni	DKPP Lamongan			1250	100	
		Penambahan Area Tanam Benih Padi Pompanisasi (155.150 kg)	Ngimbang	Lamongrejo	Sumber Rejo Pelas	DKPP Lamongan				100	
									500		
		Benih Padi Inpari 32	Ngimbang	Durikedungjero	Bakti Mulya Pasinan	DKPP Lamongan			500	100	
		Benih Padi Inpari 42	Ngimbang	Gebangangkrik	Andan Sari	DKPP Lamongan			500	100	
			Ngimbang	Gebangangkrik	Maju Lestari Ngangkrik Kidul	DKPP Lamongan				100	
									500		
			Ngimbang	Gebangangkrik	Balong Gebang	DKPP Lamongan			500	100	
			Ngimbang	Girik	Prasojo	DKPP Lamongan			875	100	



			Ngimbang	Girik	Sumber Makmur Gronggong	DKPP Lamongan				875	100	
			Ngimbang	Girik	Rejeki Agung Gandang	DKPP Lamongan				875	100	
			Ngimbang	Girik	Tirto Mulyo	DKPP Lamongan				875	100	
			Ngimbang	Girik	Sampurna	DKPP Lamongan				875	100	
			Ngimbang	Tlemang	Mekarsari Tlemang	DKPP Lamongan				875	100	
			Ngimbang	Sendangrejo	Tani Makmur Cancing	DKPP Lamongan				500	100	
			Ngimbang	Sendangrejo	Bumi Asri	DKPP Lamongan				375	100	
			Ngimbang	Sendangrejo	Rukun Makmur Bersama	DKPP Lamongan				500	100	
			Ngimbang	Sendangrejo	Sumber Agung Sawen	DKPP Lamongan				500	100	
			Ngimbang	Ngimbang	Krido Manunggal	DKPP Lamongan				625	100	
			Ngimbang	Ngimbang	sumber Makmur	DKPP Lamongan				500	100	
			Ngimbang	Kakatpenjalin	Mandiri Kakat Penjalin	DKPP Lamongan				500	100	
			Ngimbang	Kakatpenjalin	Sri Rejeki Kakat	DKPP Lamongan				625	100	
			Ngimbang	Mendogo	Sumber Makmur Bendo	DKPP Lamongan				500	100	
			Ngimbang	Mendogo	Teguh Madu	DKPP Lamongan				750	100	
			Ngimbang	Ganggangtingan	Tani Makmur Ganggang	DKPP Lamongan				500	100	
			Ngimbang	Ganggangtingan	Budi Utomo Plapak	DKPP Lamongan				500	100	
			Ngimbang	Slaharwotan	Sumeh	DKPP Lamongan				500	100	
			Ngimbang	Slaharwotan	Tani Subur Wotan	DKPP Lamongan				500	100	
			Ngimbang	Slaharwotan	Margo Utomo Bendosukun	DKPP Lamongan				625	100	
			Ngimbang	Lawak	Trans Berkah Tani Kalongan	DKPP Lamongan				750	100	
			Ngimbang	Lawak	Karya Makmur Dungpoh	DKPP Lamongan				750	100	
			Ngimbang	Lawak	Bumi Sari Lawak	DKPP Lamongan				750	100	
			Ngimbang	Lawak	Tani Lestari Klembak	DKPP Lamongan				750	100	
			Ngimbang	Lawak	Sri Subur Dadi	DKPP Lamongan				750	100	
			Ngimbang	Lawak	Tegal Sido Mulyo	DKPP Lamongan				750	100	
			Ngimbang	Munungrejo	Sri Sedono Mununglor	DKPP Lamongan				750	100	
			Ngimbang	Munungrejo	Sari Agung	DKPP Lamongan				750	100	
			Ngimbang	Munungrejo	Tani Joyo	DKPP Lamongan				750	100	
			Ngimbang	Jejel	Pangudi Luhur Sayun	DKPP Lamongan				750	100	
			Ngimbang	Jejel	Rukun Makmur	DKPP Lamongan				875	100	
			Sambeng	Nogojatisari	Amanah Nogo	DKPP Lamongan				1000	100	
			Sambeng	Kedungwangi	Tani Makmur Lawan	DKPP Lamongan				1125	100	
			Sambeng	Kedungwangi	Tani Maju Lawan	DKPP Lamongan				1625	100	
			Sambeng	Wateswinangun	Sumber Tani Tlatah	DKPP Lamongan				1375	100	
			Sambeng	Gempolmanis	Harapan Sejahtera Gempolmanis	DKPP Lamongan				1125	100	
			Sambeng	Nogojatisari	Karya Buana Nogo	DKPP Lamongan				1000	100	
			Sambeng	Ardirejo	Tani Maju Karangtengah	DKPP Lamongan				1125	100	
			Sambeng	Gempolmanis	Harapan Jaya Bulurejo	DKPP Lamongan				1000	100	
			Sambeng	Ardirejo	Serba Guna	DKPP Lamongan				1000	100	
			Sambeng	Wudi	Sejahtera Sawahan	DKPP Lamongan				1125	100	
			Sambeng	Barurejo	Sumber Tlatah	DKPP Lamongan				1000	100	
			Sambeng	Candisari	Godong Ijo Sejahtera	DKPP Lamongan				750	100	



			Sambeng	Semampirejo	Budi Luhur Semampir	DKPP Lamongan			1000	100	
			Sambeng	Sidokumpul	Melati Subur Tambar	DKPP Lamongan			1500	100	
			Sambeng	Sidokumpul	Nabati Tambar	DKPP Lamongan			1000	100	
			Bluluk	Talunrejo	Poktan Ngudi Aman	DKPP Lamongan			675	100	
			Bluluk	Primpen	Poktan Sri Rejeki Tlatah	DKPP Lamongan			1050	100	
			Bluluk	Kuwurejo	Poktan Joyo Makmur Kuwurejo	DKPP Lamongan			675	100	
			Bluluk	Bluluk	Poktan Mardi Utomo Ploman	DKPP Lamongan			1425	100	
			Bluluk	Cangkring	Poktan Margo Rukun Mlaten	DKPP Lamongan			575	100	
			Bluluk	Banjargondang	Poktan Tani Asih Bluluk	DKPP Lamongan			675	100	
			Bluluk	Bronjong	Poktan Muji Langgeng	DKPP Lamongan			1125	100	
			Sugio	Jubelkidul	Poktan Tani Raharjo kedungjati	DKPP Lamongan			1000	100	
			Sugio	Supenuh	Poktan Sumber Makmur Supenuh	DKPP Lamongan			750	100	
			Sugio	Jubellor	Poktan Dwi Mertani Paji	DKPP Lamongan			1000	100	
			Sugio	Deketagung	Poktan Tani Karya Raharja	DKPP Lamongan			1500	100	
			Laren	Karangtawar	Tani Makmur	DKPP Lamongan			875	100	
			Laren	Gampangsejati	Sedio Utomo	DKPP Lamongan			1000	100	
			Laren	Karangwungulor	Poktan Mekar Jaya	DKPP Lamongan			875	100	
			Laren	Jabung	Poktan Karya Tani II	DKPP Lamongan			1250	100	
			Laren	Mojoasem	Poktan Tirta Agung II	DKPP Lamongan			1000	100	
			Laren	Siser	poktan Pelita Indonesia I	DKPP Lamongan			1125	100	
			Laren	Siser	poktan Pelita Indonesia II	DKPP Lamongan			750	100	
			Babat	Trepan	Poktan Sidodadi	DKPP Lamongan			1250	100	
			Babat	Trepan	Poktan Sido luhur	DKPP Lamongan			1000	100	
			Babat	Kebalanpelang	Poktan Balan maju I	DKPP Lamongan			2000	100	
			Babat	Truni	Poktan Truni Maju I	DKPP Lamongan			1500	100	
			Babat	Sogo	Poktan Sogo Lestari II	DKPP Lamongan			1950	100	
			Babat	Tritunggal	Poktan Mekar Sari	DKPP Lamongan			2400	100	
			Babat	Bedahan	Poktan Sumber Urip I	DKPP Lamongan			500	100	
			Babat	Sumurgenuk	Poktan Rukun Jaya	DKPP Lamongan			2000	100	
			Babat	Darinawong	Poktan Sumber Jaya	DKPP Lamongan			1250	100	
			Kalitengah	Kediren	Poktan Sumber Mulyo 01	DKPP Lamongan			750	100	
			Kalitengah	Kuluran	Poktan Tumbuh 01	DKPP Lamongan			750	100	
			Kalitengah	Kalitengah	Poktan Tani Makmur 01	DKPP Lamongan			750	100	
			Kalitengah	Butungan	Sumber Bahagia 01	DKPP Lamongan			1000	100	
			Kalitengah	Butungan	Poktan Sumber Bahagia II	DKPP Lamongan			1000	100	
			Karanggeneng	Prijekngablak	Rame Gawe I	DKPP Lamongan			875	100	
			Karanggeneng	Prijekngablak	Rame Gawe V	DKPP Lamongan			375	100	
			Karanggeneng	Prijekngablak	Rame Gawe VI	DKPP Lamongan			625	100	
			Karanggeneng	Jagran	Poktan Tani Raharjo III	DKPP Lamongan			1375	100	
			Karanggeneng	Kawistolegi	Poktan Sumber Makmur I	DKPP Lamongan			1300	100	
			Karanggeneng	Karanggeneng	Poktan Sri Lestari II	DKPP Lamongan			675	100	



			Karanggeneng	Kaligerman	Poktan Mekar Sari II	DKPP Lamongan				1300	100	
			Karanggeneng	Tracal	Poktan Upoyo Bogo I	DKPP Lamongan				875	100	
			Karanggeneng	karangrejo	Poktan Sari Bumi III	DKPP Lamongan				625	100	
			Karanggeneng	Mertani	Poktan Makmur Sejahtera	DKPP Lamongan				1650	100	
			Karanggeneng	Latukan	Poktan Rukun Makmur I	DKPP Lamongan				1800	100	
			Karanggeneng	Sonoadi	Poktan Adi Mulyo II	DKPP Lamongan				800	100	
			Karanggeneng	Sonoadi	Poktan Adi Mulyo I	DKPP Lamongan				750	100	
			Karanggeneng	Kawistolegi	Poktan Sumber Makmur II	DKPP Lamongan				750	100	
			Karanggeneng	Sumberwudi	Poktan Udi Mulyo II	DKPP Lamongan				625	100	
			Kedungpring	Maindu	Melati Maindu	DKPP Lamongan				1625	100	
			Kedungpring	Kandangrejo	Sri Rejeki Trewek	DKPP Lamongan				750	100	
			Kedungpring	Kalen	Sri Manfaat Kedungrejo	DKPP Lamongan				750	100	
			Kedungpring	Sumengko	Harapan Jaya Sumengko	DKPP Lamongan				1000	100	
			Kedungpring	Tenggerejo	Mekar Jaya Ngampon	DKPP Lamongan				1125	100	
			Kedungpring	Kandangrejo	Sri Gati Trewek	DKPP Lamongan				1000	100	
			Mantup	Sumberbendo	Poktan Sumber Tani Dua	DKPP Lamongan				725	100	
			Mantup	Tunggunjagir	Poktan Mulya Bersama Tunggun	DKPP Lamongan				975	100	
			Mantup	Rumpuk	Poktan Perkumpulan Murah rejeki	DKPP Lamongan				1250	100	
			Mantup	Sukosari	Poktan Sumber Makmur Kd Ulo	DKPP Lamongan				1000	100	
			Mantup	Tunggunjagir	Poktan Walet	DKPP Lamongan				1000	100	
			Mantup	Mojosari	Poktan Sido Makmur Sidobinangun	DKPP Lamongan				500	100	
			Mantup	Sidomulyo	Poktan Sido Mukti SB	DKPP Lamongan				1250	100	
			Mantup	Sidomulyo	Sido Makmur Jaya	DKPP Lamongan				500	100	
			Mantup	Mojosari	Tambah Makmur	DKPP Lamongan				500	100	
			Mantup	Mojosari	Jaya Makmur Sendangsari	DKPP Lamongan				500	100	
			Mantup	Sumberbendo	Gebang Sewu Sumberbendo	DKPP Lamongan				550	100	
			Modo	Kedungpengaron	Poktan Tani Murni Pengkol	DKPP Lamongan				2275	100	
			Modo	Kedungwaras	Poktan Sekar Maju	DKPP Lamongan				2425	100	
			Modo	Sidodowo	Poktan Margo Dadi Damarsi	DKPP Lamongan				1575	100	
			Modo	Sidomulyo	Poktan Rukun Santoso Ngegot	DKPP Lamongan				2900	100	
			Modo	Sidodowo	Poktan Sido Dadi Damber	DKPP Lamongan				925	100	
			Modo	Mojorejo	Poktan Rekso Mulyo Lebak	DKPP Lamongan				6500	100	
			Paciran	Sumurgayam	Poktan Beringin Tunggal	DKPP Lamongan				2250	100	
			Pucuk	Gempolpading	Poktan Sri Kuncung	DKPP Lamongan				625	100	
			Pucuk	Kedali	Poktan Margo Subur 04	DKPP Lamongan				625	100	
			Pucuk	Ngambeg	Poktan Maju makmur Ngambeg	DKPP Lamongan				1250	100	
			Pucuk	Kesambi	Poktan Sido Makmur Kesambi	DKPP Lamongan				625	100	



			Pucuk	Wanar	Poktan Sumber Makmur Desa Wanar	DKPP Lamongan				1250	100	
			Sekaran	Sungegeneng	Sekar Srengenge I Sungegeneng	DKPP Lamongan				1000	100	
			Sekaran	Sungegeneng	Sekar Srengenge II Sungegeneng	DKPP Lamongan				1000	100	
			Sekaran	Sungegeneng	Sekar Srengenge III Sungegeneng	DKPP Lamongan				1000	100	
			Sekaran	Sungegeneng	Sekar Srengenge V Sungegeneng	DKPP Lamongan				1000	100	
			Sekaran	Kembangan	Sekar 01 Kembangan	DKPP Lamongan				1000	100	
			Sekaran	Kembangan	Sekar II Kembangan	DKPP Lamongan				1000	100	
			Sekaran	Miru	Sumber Makmur II Miru	DKPP Lamongan				1000	100	
			Sekaran	Jugo	Tani Makaryo III Jugo	DKPP Lamongan				1000	100	
			Sukodadi	Menongo	Poktan Karya Makmur	DKPP Lamongan				1050	100	
			Sukodadi	Pajangan	Poktan Tani Harapan IV	DKPP Lamongan				825	100	
			Sukodadi	Baturono	Poktan Geneng Makmur	DKPP Lamongan				625	100	
			Sukodadi	Menongo	Poktan Urip Makmur	DKPP Lamongan				1000	100	
			Sukodadi	Tlogorejo	Poktan Ringin Mulyo	DKPP Lamongan				900	100	
			Sukodadi	Sukolilo	Poktan Sumber Makmur	DKPP Lamongan				1600	100	
			Sukodadi	Banjarejo	Poktan Sumber Barokah	DKPP Lamongan				725	100	
			Sukodadi	Sumberaji	Poktan Sumber Rejeki	DKPP Lamongan				1000	100	
			Sukodadi	Sidogembul	Poktan Margi Mulyo	DKPP Lamongan				850	100	
			Sukodadi	Sumberaji	Poktan Sumber Murni	DKPP Lamongan				1500	100	
			Sukodadi	Plumpang	Poktan Suka Unggul	DKPP Lamongan				2025	100	
			Sukodadi	Bandungsari	Poktan Karya Sejati	DKPP Lamongan				1250	100	
			Sukodadi	Kadungrebug	Poktan Margo Tani	DKPP Lamongan				975	100	
			Sukodadi	Madulegi	Poktan Tani Makmur II	DKPP Lamongan				875	100	
			Sukodadi	Kebonsari	Poktan Usaha Makmur	DKPP Lamongan				1525	100	
			Turi	Geger	Polo Jaya 01	DKPP Lamongan				750	100	
			Turi	Geger	Polo Jaya 02	DKPP Lamongan				750	100	
		Penambahan Area Tanam Benih Padi Pompanisasi Tahap 2 (5.500 kg)	Karanggeneng	Karangwungu	PoktanTani Seger Satu	DKPP Lamongan				750	100	
		Benih Padi Inpari 32	Karanggeneng	Kaligerman	Poktan Mekar Sari Jaya	DKPP Lamongan				500	100	
		Benih Padi Inpari 42	Karanggeneng	Tracal	Poktan Upoyo Bogo II	DKPP Lamongan				750	100	
			Karanggeneng	Kawistolegi	Poktan Sumber Makmur IV	DKPP Lamongan				625	100	
			Karanggeneng	Banjarmadu	Poktan Sido Luhur I	DKPP Lamongan				500	100	
			Kalitengah	Kalitengah	Tani Makmur II	DKPP Lamongan				500	100	
			Kalitengah	Kediren	Sumber Mulyo II	DKPP Lamongan				500	100	
			Kalitengah	Canditanggal	Lestari 01	DKPP Lamongan				625	100	
			Kalitengah	Canditanggal	Lestari II	DKPP Lamongan				750	100	
		Penanggulangan Bencana Kekeringan (109.125 kg)	Tikung	JotoSanur	Bukit Raya	DKPP Lamongan				375	100	



		Benih Padi Inpari 32	Tikung	JotoSanur	Dewata Pulo	DKPP Lamongan			475	100	
		Benih Padi Ciherang	Tikung	Wonokromo	Budi Rahayu Blumbungan	DKPP Lamongan			750	100	
			Tikung	Wonokromo	Sri Rukun	DKPP Lamongan			625	100	
			Tikung	Wonokromo	Bangkit Jaya	DKPP Lamongan			625	100	
			Tikung	Wonokromo	Tani Maju Mojokerep	DKPP Lamongan			875	100	
			Tikung	Wonokromo	Jaya Pilanggot	DKPP Lamongan			1000	100	
			Tikung	Wonokromo	Tani Mulyo Kanoman	DKPP Lamongan			500	100	
			Tikung	Wonokromo	Sumber Rejeki Wonorejo	DKPP Lamongan			250	100	
			Tikung	Wonokromo	Sri Rejeki Gabus	DKPP Lamongan			875	100	
			Tikung	Wonokromo	Budi Rahayu II	DKPP Lamongan			1000	100	
			Tikung	Pengumbulanadi	Maju Makmur Pengaron	DKPP Lamongan			400	100	
			Tikung	Pengumbulanadi	Makmur Bulan	DKPP Lamongan			375	100	
			Tikung	Guminingrejo	Sri Rejeki Gumining	DKPP Lamongan			750	100	
			Tikung	Guminingrejo	Sumber Rejeki Bajangan	DKPP Lamongan			375	100	
			Tikung	Bakalanpule	Tani Rukun Pule	DKPP Lamongan			625	100	
			Tikung	Bakalanpule	Tani Rukun II Pule	DKPP Lamongan			625	100	
			Tikung	Bakalanpule	Dewi Sri Bakalan Tikung	DKPP Lamongan			625	100	
			Tikung	Bakalanpule	Sri Rejeki Sekargeneng	DKPP Lamongan			500	100	
			Tikung	Bakalanpule	Budidaya Tikung	DKPP Lamongan			425	100	
			Tikung	Takeranklating	Makmur Banjarkepuh	DKPP Lamongan			800	100	
			Tikung	Takeranklating	Luhur Genceng	DKPP Lamongan			850	100	
			Tikung	Takeranklating	Kusuma Mojodalem	DKPP Lamongan			550	100	
			Tikung	Takeranklating	Harapan Satu Mojolegi	DKPP Lamongan			900	100	
			Tikung	Takeranklating	Harapan Klating	DKPP Lamongan			925	100	
			Tikung	Takeranklating	Murni Takeran	DKPP Lamongan			800	100	
			Tikung	Soko	Barokah Lemahbang	DKPP Lamongan			900	100	
			Tikung	Soko	Sumber Urip Randekan	DKPP Lamongan			650	100	
			Tikung	Soko	Mulyo Tani Randekan	DKPP Lamongan			650	100	
			Tikung	Soko	Sumber Semi Sememi	DKPP Lamongan			650	100	
			Tikung	Soko	Sri Rejeki Bondalem	DKPP Lamongan			400	100	
			Tikung	Soko	Budi Lestari Soko	DKPP Lamongan			650	100	
			Tikung	Soko	Protan	DKPP Lamongan			650	100	
			Tikung	Soko	Serba Usaha Kalitengah	DKPP Lamongan			650	100	
			Tikung	Soko	Kalitengah Unggul	DKPP Lamongan			650	100	
			Tikung	Soko	Budi Lestari II Kalisogo	DKPP Lamongan			900	100	
			Tikung	Soko	Fajar Tani Banaran	DKPP Lamongan			400	100	
			Tikung	Soko	Subur Makmur Banaran	DKPP Lamongan			375	100	
			Tikung	Kelorarum	Santoso Kalianyar	DKPP Lamongan			400	100	
			Tikung	Kelorarum	Sido Makmur Kalianyar	DKPP Lamongan			400	100	
			Tikung	Kelorarum	Arum Nдалu Deleg	DKPP Lamongan			400	100	
			Tikung	Kelorarum	Sekar Arum Deleg	DKPP Lamongan			400	100	
			Tikung	Kelorarum	Sri Rejeki Duel	DKPP Lamongan			400	100	
			Tikung	Kelorarum	Tani Maju Kelor	DKPP Lamongan			425	100	
			Tikung	Botoputih	Per Satuan	DKPP Lamongan			250	100	
			Tikung	Botoputih	Gotong Royong Tlanak	DKPP Lamongan			250	100	
			Tikung	Botoputih	Gotong Royong Satu Bagel	DKPP Lamongan			250	100	



			Tikung	Botoputih	Margo Utomo II Mojogandik	DKPP Lamongan			250	100	
			Tikung	Balongwangi	Mekar Jaya III	DKPP Lamongan			875	100	
			Tikung	Balongwangi	Mekar Jaya Satu Geger	DKPP Lamongan			1375	100	
			Tikung	Balongwangi	Mekar Jaya II	DKPP Lamongan			750	100	
			Tikung	Balongwangi	Mekar Jaya IV	DKPP Lamongan			875	100	
			Tikung	Balongwangi	Mekar Jaya Lima Leboyo	DKPP Lamongan			875	100	
			Tikung	Balongwangi	Mekar Jaya Balongtorong	DKPP Lamongan			625	100	
			Tikung	Balongwangi	Rukun Tani II Banjaran	DKPP Lamongan			1125	100	
			Tikung	Balongwangi	Rukun Tani Banjarsari	DKPP Lamongan			500	100	
			Tikung	Balongwangi	Rukun Tani Satu Pilanganom	DKPP Lamongan			875	100	
			Tikung	Jatirejo	Sido Makmur Topeng	DKPP Lamongan			625	100	
			Tikung	Tambakrigadung	Tambakharjo	DKPP Lamongan			500	100	
			Tikung	Tambakrigadung	Tambakharjo II	DKPP Lamongan			500	100	
			Tikung	Tambakrigadung	Mekar Jaya II Tuwiri	DKPP Lamongan			500	100	
			Tikung	Tambakrigadung	Maju Mulyo Pilanggadung	DKPP Lamongan			500	100	
			Sairejo	Dermolemahbang	Arjuna 06	DKPP Lamongan			1000	100	
			Sairejo	Dermolemahbang	Sumber Makmur	DKPP Lamongan			925	100	
			Sairejo	Dermolemahbang	Sekar Jaya	DKPP Lamongan			1000	100	
			Sairejo	Dermolemahbang	Cahaya Bina Tani	DKPP Lamongan			750	100	
			Sairejo	Dermolemahbang	Subur Makmur	DKPP Lamongan			1000	100	
			Sairejo	Dermolemahbang	Rukun Teguh	DKPP Lamongan			1000	100	
			Sairejo	Dermolemahbang	Sahabat Tani	DKPP Lamongan			1000	100	
			Sairejo	Dermolemahbang	Rukun Tani	DKPP Lamongan			750	100	
			Sairejo	Dermolemahbang	Rukun Makmur	DKPP Lamongan			1000	100	
			Sairejo	Dermolemahbang	Barokah	DKPP Lamongan			1000	100	
			Sairejo	Dermolemahbang	Mudah Jaya	DKPP Lamongan			1000	100	
			Sairejo	Dermolemahbang	Hasil Tani Sejahtera	DKPP Lamongan			750	100	
			Sairejo	Dermolemahbang	Rukun Abadi	DKPP Lamongan			1000	100	
			Sairejo	Dermolemahbang	Rukun Santoso	DKPP Lamongan			1000	100	
			Sairejo	Simbatan	Tanjung Sari	DKPP Lamongan			1375	100	
			Sairejo	Simbatan	Kartika	DKPP Lamongan			1175	100	
			Sairejo	Simbatan	Temen Tinemu	DKPP Lamongan			1375	100	
			Sairejo	Beru	Jeruk Muda	DKPP Lamongan			1750	100	
			Sairejo	Beru	Sumber Rejeki	DKPP Lamongan			1875	100	
			Sairejo	Sumberejo	Brantas	DKPP Lamongan			1250	100	
			Sairejo	Sumberejo	Semeru	DKPP Lamongan			1800	100	
			Sairejo	Sumberejo	Mujaro'ah	DKPP Lamongan			2000	100	
			Sairejo	Sumberejo	Sumber Makmur	DKPP Lamongan			1250	100	
			Sairejo	Canggih	Tambak Surya	DKPP Lamongan			1000	100	
			Sairejo	Canggih	Mulyo Tani	DKPP Lamongan			1250	100	
			Sairejo	Canggih	Tambak Baru	DKPP Lamongan			1250	100	
			Sairejo	Sarirejo	Margo Mulyo	DKPP Lamongan			1150	100	
			Sairejo	Sarirejo	Harapan Jaya	DKPP Lamongan			1250	100	
			Sairejo	Sarirejo	Margo Mukti 01	DKPP Lamongan			1000	100	
			Sairejo	Sarirejo	Maju Makmur	DKPP Lamongan			1000	100	



			Sairejo	Gempoltukmloko	Rejo Makmur	DKPP Lamongan			1000	100	
			Sairejo	Gempoltukmloko	Sidodadi	DKPP Lamongan			1000	100	
			Sairejo	Gempoltukmloko	Sidodadi II	DKPP Lamongan			1000	100	
			Sairejo	Gempoltukmloko	Sido Mulyo 01	DKPP Lamongan			1000	100	
			Sairejo	Gempoltukmloko	Sido Mulyo II	DKPP Lamongan			775	100	
			Sairejo	Gempoltukmloko	Gempol Berkah	DKPP Lamongan			1000	100	
			Sairejo	Gempoltukmloko	Sejati Makmur	DKPP Lamongan			1000	100	
			Sairejo	Tambakmenjangan	Tunas Mudah 01	DKPP Lamongan			2000	100	
			Sairejo	Tambakmenjangan	Sri koyo	DKPP Lamongan			2000	100	
			Sairejo	Tambakmenjangan	Barokah 01	DKPP Lamongan			1875	100	
			Sairejo	Tambakmenjangan	Barokah II	DKPP Lamongan			2000	100	
			Sairejo	Tambakmenjangan	Sri Rejeki	DKPP Lamongan			2000	100	
			Sairejo	Tambakmenjangan	Dewi Sri	DKPP Lamongan			1875	100	
			Sairejo	Tambakmenjangan	Maju Jaya	DKPP Lamongan			2000	100	
			Sairejo	Tambakmenjangan	Tunas Mudah II	DKPP Lamongan			2000	100	
			Sairejo	Kedungkumpul	Pangestu	DKPP Lamongan			1000	100	
			Sairejo	Kedungkumpul	Melati Jaya	DKPP Lamongan			625	100	
			Sairejo	Kedungkumpul	Sumber Rejeki	DKPP Lamongan			975	100	
			Sairejo	Kedungkumpul	Mandiri	DKPP Lamongan			375	100	
			Sairejo	Kedungkumpul	Tani Mulyo	DKPP Lamongan			1225	100	
			Sairejo	Kedungkumpul	Joyo Abadi	DKPP Lamongan			1050	100	
			Sairejo	Kedungkumpul	Lohjinawi	DKPP Lamongan			500	100	
			Sairejo	Kedungkumpul	Manunggal Jaya	DKPP Lamongan			625	100	
			Sairejo	Kedungkumpul	Sumber Makmur	DKPP Lamongan			625	100	
			Babat	Tritunggal	Mekar Sari	DKPP Lamongan			250	100	
			Babat	Kebonagung	Tani Agung	DKPP Lamongan			625	100	
			Babat	Kebonagung	Tani Mulya	DKPP Lamongan			250	100	
			Babat	Kebonagung	Tani Bersatu	DKPP Lamongan			375	100	
			Babat	Datinawong	Sumber Makmur	DKPP Lamongan			450	100	
			Babat	Datinawong	Barokah Tani	DKPP Lamongan			425	100	
			Babat	Patihan	Tani Makmur I	DKPP Lamongan			625	100	
			Babat	Patihan	Tani makmur III	DKPP Lamongan			625	100	
			Babat	Sambangan	Sarana Wadah Tani	DKPP Lamongan			500	100	
			Babat	Bulumargi	Sri Makmur	DKPP Lamongan			500	100	
			Babat	Bulumargi	Sri Makmur II	DKPP Lamongan			550	100	
			Babat	Sumurgenuk	Rukun Jaya	DKPP Lamongan			1175	100	
			Kembangbahu	Moronyamplung	Tani Manunggal Nyamplung	DKPP Lamongan				100	



		Penanggulangan Bencana Kekeringan Tahap 2 (86.900 kg)							1250		
		Benih Padi IPB 9G	Kembangbahu	Moronyamplung	Bestari	DKPP Lamongan			250	100	
			Kembangbahu	Moronyamplung	Tani Rahayu Nyamplung	DKPP Lamongan			1250	100	
			Kembangbahu	Moronyamplung	Moro Makmur	DKPP Lamongan			1025	100	
			Kembangbahu	Moronyamplung	Tani Semangat	DKPP Lamongan			375	100	
			Kembangbahu	Dumpiangung	Karya Tani Duri	DKPP Lamongan			1000	100	
			Kembangbahu	Dumpiangung	Sri Rejeki Kedungbulu	DKPP Lamongan			1250	100	
			Kembangbahu	Dumpiangung	Harapan Makmur Tugulor	DKPP Lamongan			625	100	
			Kembangbahu	Dumpiangung	Krida Mertani	DKPP Lamongan			1000	100	
			Kembangbahu	Dumpiangung	Mekar Sari Dogo	DKPP Lamongan			625	100	
			Kembangbahu	Dumpiangung	Harapan Maju Dusun Dumpi	DKPP Lamongan			750	100	
			Kembangbahu	Katemas	Daya Subur	DKPP Lamongan			750	100	
			Kembangbahu	Katemas	Daya Mulya	DKPP Lamongan			750	100	
			Kembangbahu	Katemas	Daya Lestari	DKPP Lamongan			750	100	
			Kembangbahu	Katemas	Daya Harapan	DKPP Lamongan			625	100	
			Kembangbahu	Katemas	Daya Tani	DKPP Lamongan			875	100	
			Kembangbahu	Katemas	Daya Guna Ketemas	DKPP Lamongan			875	100	
			Kembangbahu	Gintungan	Sekar Arum Gintungan	DKPP Lamongan			1000	100	
			Kembangbahu	Gintungan	Mekar Tani Klampok	DKPP Lamongan			625	100	
			Kembangbahu	Gintungan	Margo Mulyo Plosokuning	DKPP Lamongan			875	100	
			Kembangbahu	Gintungan	Rukun Santoso Sumberjambe	DKPP Lamongan			1000	100	
			Kembangbahu	Gintungan	Rukun Tani Kedungagunglor	DKPP Lamongan			500	100	
			Kembangbahu	Gintungan	Harapan Kedungagungkidul	DKPP Lamongan			625	100	
			Kembangbahu	Gintungan	Tani Makmur Mojogede	DKPP Lamongan			875	100	
			Kembangbahu	Pelang	Margo Mukti Sungaigeneng	DKPP Lamongan			1500	100	
			Kembangbahu	Pelang	Gaya Baru	DKPP Lamongan			1500	100	
			Kembangbahu	Pelang	Sri Sadono	DKPP Lamongan			1250	100	
			Kembangbahu	Pelang	Mekar Sari	DKPP Lamongan			1500	100	
			Kembangbahu	Puter	Sari Tani I	DKPP Lamongan			1500	100	
			Kembangbahu	Puter	Sari Tani II	DKPP Lamongan			625	100	
			Kembangbahu	Puter	Sari Tani III	DKPP Lamongan			625	100	
			Kembangbahu	Puter	Sari Tani IV	DKPP Lamongan			875	100	
			Kembangbahu	Puter	Tani Jaya	DKPP Lamongan			1250	100	
			Kembangbahu	Puter	Sri Rahayu Tempuran	DKPP Lamongan			1500	100	
			Kembangbahu	Puter	Mawar Pucung	DKPP Lamongan			1500	100	
			Kembangbahu	Maor	Makmur Jaya Tiga	DKPP Lamongan			1250	100	
			Kembangbahu	Maor	Makmur Jaya Satu	DKPP Lamongan			1250	100	
			Kembangbahu	Maor	Makmur Jaya Dua	DKPP Lamongan			1250	100	
			Kembangbahu	Randubener	Bunga Tani	DKPP Lamongan			1250	100	
			Kembangbahu	Randubener	Sido Makmur Randubener	DKPP Lamongan			1250	100	



			Kembangbahu	Randubener	Sumber Tani Randubener	DKPP Lamongan			1250	100	
			Kembangbahu	Randubener	Tani Jaya Randubener	DKPP Lamongan			1250	100	
			Kembangbahu	Kaliwates	Karya Baru	DKPP Lamongan			1000	100	
			Kembangbahu	Kaliwates	Sari Asih Dusun Kalibogo	DKPP Lamongan			810	100	
			Kembangbahu	Kaliwates	Sari Asih Dusun Kalibogo	DKPP Lamongan			290	100	
			Kembangbahu	Kaliwates	Tampo Pamreh	DKPP Lamongan			625	100	
			Kembangbahu	Tlogo Agung	Terus Maju Slatung	DKPP Lamongan			1500	100	
			Kembangbahu	Tlogo Agung	Tani Makmur Tlogo	DKPP Lamongan			750	100	
			Kembangbahu	Tlogo Agung	Rukun Tani Satu	DKPP Lamongan			1000	100	
			Kembangbahu	Tlogo Agung	Rukun Tani Dua Besi	DKPP Lamongan			875	100	
			Kembangbahu	Kedungmeqarih	Sido Mulyo Kedungklanting	DKPP Lamongan			1250	100	
			Kembangbahu	Kedungmeqarih	Nqudi Rejeki Kedungdowo	DKPP Lamongan			1250	100	
			Kembangbahu	Kedungmeqarih	Tani Rukun Meqarih	DKPP Lamongan			1250	100	
			Kembangbahu	Kembangbahu	Tani Makmur Randekan	DKPP Lamongan			625	100	
			Kembangbahu	Kembangbahu	Tani Subur Kembangbahu	DKPP Lamongan			1250	100	
			Kembangbahu	Kembangbahu	Tani Unggul Kembangbahu	DKPP Lamongan			1125	100	
			Kembangbahu	Kembangbahu	Suko Maju Sukorejo	DKPP Lamongan			1250	100	
			Kembangbahu	Kembangbahu	Tani Joyo	DKPP Lamongan			650	100	
			Kembangbahu	Lopang	Sari Bumi Wringinanom	DKPP Lamongan			625	100	
			Kembangbahu	Lopang	Sumber Baru Banjaranyar	DKPP Lamongan			250	100	
			Kembangbahu	Lopang	Sri Manunggal	DKPP Lamongan			1000	100	
			Kembangbahu	Lopang	Sumber Baru Makmur	DKPP Lamongan			1250	100	
			Kembangbahu	Lopang	Sri Makmur Mojomanis	DKPP Lamongan			1250	100	
			Kembangbahu	Lopang	Tani Lestari Lopang	DKPP Lamongan			2500	100	
			Kembangbahu	Lopang	Sri Rejeki Sumberejo	DKPP Lamongan			1250	100	
			Kembangbahu	Lopang	Sari Makmur Mojosari	DKPP Lamongan			750	100	
			Kembangbahu	Lopang	Sido Makmur Mojodadi	DKPP Lamongan			625	100	
			Kembangbahu	Lopang	Dewi Sri Sumberpanggang	DKPP Lamongan			2500	100	
			Kembangbahu	Mangkujajar	Mangku Arjo	DKPP Lamongan			625	100	
			Kembangbahu	Mangkujajar	Sumber Ayem	DKPP Lamongan			750	100	
			Kembangbahu	Mangkujajar	Sri Rahayu Mojolebak	DKPP Lamongan			750	100	
			Kembangbahu	Kedungasri	Sekar Jaya Bender	DKPP Lamongan			625	100	
			Kembangbahu	Kedungasri	Tani Maju Kedungori	DKPP Lamongan			1000	100	
			Kembangbahu	Kedungasri	Sri Lestari Cempleng	DKPP Lamongan			500	100	
			Kembangbahu	Kedungasri	Sri Rejeki Bangsri	DKPP Lamongan			875	100	
			Kembangbahu	Doyomulyo	Sari Tani Lembeyan	DKPP Lamongan			1875	100	
			Kembangbahu	Doyomulyo	Tani Mulyo Kalangan	DKPP Lamongan			625	100	
			Kembangbahu	Doyomulyo	Sari Mulyo Juwet	DKPP Lamongan			1000	100	
			Kembangbahu	Doyomulyo	Mekar Sari Gempolumbung	DKPP Lamongan			875	100	
			Kembangbahu	Sidomukti	Budi Luhur Kedungglonggong	DKPP Lamongan			1000	100	
			Kembangbahu	Sidomukti	Sido Dadi Sukoanyar	DKPP Lamongan			1000	100	
			Kembangbahu	Sidomukti	Mekar Jaya Sidobranti	DKPP Lamongan			625	100	
			Kembangbahu	Sidomukti	Margo Rukun DusunTanggungan	DKPP Lamongan			625	100	



			Kembangbahu	Sukosongo	Sido Makmur Kedungkampil Satu	DKPP Lamongan		500	100
			Kembangbahu	Sukosongo	Kampil Makmur	DKPP Lamongan		750	100
			Kembangbahu	Sukosongo	Sri Lestari Songo	DKPP Lamongan		1000	100
			Kembangbahu	Sukosongo	Ponco Karso	DKPP Lamongan		625	100
			Kembangbahu	Sukosongo	Barokah Rizki	DKPP Lamongan		750	100
			Kembangbahu	Sukosongo	Jati makmur Sukosongo	DKPP Lamongan		500	100
			Kembangbahu	Sukosongo	Sari Rejo	DKPP Lamongan		625	100
		Peningkatan Indeks Pertanaman (400.225 kg)	Lamongan	Made	Cempaka 01 Made	DKPP Lamongan		500	100
		Inpari 32	Lamongan	Sukomulyo	Karya Bakti Sukomulyo	DKPP Lamongan		1000	100
		Inpari 33	Lamongan	Sukomulyo	Mina Jaya	DKPP Lamongan		1000	100
		Inpari 42	Lamongan	Sukomulyo	Harapan Karangmulyo	DKPP Lamongan		750	100
		Pak Tiwi I	Lamongan	Banjarmendalan	Banjar Mulyo 01	DKPP Lamongan		750	100
		Mekongga	Lamongan	Sidokumpul	Karya Darma Sidokumpul	DKPP Lamongan		1250	100
			Lamongan	Sidokumpul	Karya Sari Sidokumpul	DKPP Lamongan		1500	100
			Lamongan	Plosowahyu	Tani Makmur 01 Plalangan	DKPP Lamongan		1000	100
			Lamongan	Plosowahyu	Tani Makmur 02 Plosowahyu	DKPP Lamongan		1000	100
			Lamongan	Plosowahyu	Tani Makmur 03 Plosogeneng	DKPP Lamongan		1000	100
			Lamongan	Tanjung	Hasil Bakti 01	DKPP Lamongan		1000	100
			Lamongan	Tanjung	Hasil Bakti 02 Tiq	DKPP Lamongan		1000	100
			Lamongan	Sukorejo	Raharjo 01	DKPP Lamongan		1250	100
			Lamongan	Sukorejo	Raharjo 02	DKPP Lamongan		625	100
			Sarirejo	Dermolemahbang	Arjuna 06	DKPP Lamongan		1250	100
			Sarirejo	Dermolemahbang	Sumber Makmur	DKPP Lamongan		1250	100
			Sarirejo	Dermolemahbang	Sekar Jaya	DKPP Lamongan		1250	100
			Sarirejo	Dermolemahbang	Cahaya Bina Tani	DKPP Lamongan		1250	100
			Sarirejo	Dermolemahbang	Subur Makmur	DKPP Lamongan		1250	100
			Sarirejo	Dermolemahbang	Rukun Teguh	DKPP Lamongan		1250	100
			Sarirejo	Dermolemahbang	Rukun Tani	DKPP Lamongan		1250	100
			Sarirejo	Dermolemahbang	Rukun Makmur	DKPP Lamongan		1000	100
			Sarirejo	Dermolemahbang	Barokah	DKPP Lamongan		1000	100
			Sarirejo	Dermolemahbang	Mudah Jaya	DKPP Lamongan		1000	100
			Sarirejo	Dermolemahbang	Hasil Tani Sejahtera	DKPP Lamongan		1000	100
			Sarirejo	Dermolemahbang	Rukun Abadi	DKPP Lamongan		1000	100
			Sarirejo	Dermolemahbang	Rukun Santoso	DKPP Lamongan		1250	100
			Sarirejo	Simbatan	Tanjung Sari	DKPP Lamongan		625	100
			Sarirejo	Simbatan	Kartika	DKPP Lamongan		625	100
			Sarirejo	Beru	Jeruk Muda	DKPP Lamongan		625	100
			Sarirejo	Beru	Sumber Rejeki	DKPP Lamongan		625	100
			Sarirejo	Sumberejo	Brantas	DKPP Lamongan		625	100
			Sarirejo	Sumberejo	Semeru	DKPP Lamongan		625	100
			Sarirejo	Canggah	Tambak Surya	DKPP Lamongan		625	100



			Sarirejo	Canggih	Mulyo Tani	DKPP Lamongan			625	100	
			Sarirejo	Sarirejo	Margo Mulyo	DKPP Lamongan			750	100	
			Sarirejo	Sarirejo	Harapan Jaya	DKPP Lamongan			750	100	
			Sarirejo	Sarirejo	Rukun Jaya makmur	DKPP Lamongan			500	100	
			Sarirejo	Gempoltukmloko	Rejo Makmur	DKPP Lamongan			750	100	
			Sarirejo	Gempoltukmloko	Sidodadi	DKPP Lamongan			750	100	
			Sarirejo	Gempoltukmloko	Sidodadi II	DKPP Lamongan			750	100	
			Sarirejo	Tambakmenjangan	Tunas Mudah 01	DKPP Lamongan			1250	100	
			Sarirejo	Tambakmenjangan	Sri koyo	DKPP Lamongan			1250	100	
			Sarirejo	Tambakmenjangan	Barokah 01	DKPP Lamongan			1250	100	
			Sarirejo	Tambakmenjangan	Barokah II	DKPP Lamongan			1250	100	
			Sarirejo	Tambakmenjangan	Sri Rejeki	DKPP Lamongan			1250	100	
			Sarirejo	Tambakmenjangan	Dewi Sri	DKPP Lamongan			1250	100	
			Sarirejo	Kedungkumpul	Pangestu	DKPP Lamongan			875	100	
			Sarirejo	Kedungkumpul	Melati Jaya	DKPP Lamongan			500	100	
			Sarirejo	Kedungkumpul	Sumber Rejeki	DKPP Lamongan			500	100	
			Sarirejo	Kedungkumpul	Mandiri	DKPP Lamongan			500	100	
			Sarirejo	Kedungkumpul	Tani Mulyo	DKPP Lamongan			875	100	
			Glagah	Menganti	Sumber Tani	DKPP Lamongan			1250	100	
			Glagah		Sumber Makmur	DKPP Lamongan			1250	100	
			Glagah	Began	Rukun Santoso Satu	DKPP Lamongan			875	100	
			Glagah		Rukun Santoso II	DKPP Lamongan			500	100	
			Glagah	Mendogo	Adil I	DKPP Lamongan			1000	100	
			Glagah		Adil II	DKPP Lamongan			1000	100	
			Glagah		Adil III	DKPP Lamongan			1000	100	
			Glagah	Sudangan	Handayani II	DKPP Lamongan			1875	100	
			Glagah	Medang	Sejati	DKPP Lamongan			1000	100	
			Glagah		Makmur	DKPP Lamongan			1000	100	
			Glagah		Makmur II	DKPP Lamongan			1000	100	
			Glagah	Duduklor	Karya Tani I	DKPP Lamongan			1250	100	
			Glagah	Karangagung	Tekad Makmur Satu	DKPP Lamongan			1250	100	
			Glagah	Jatirenggo	Karya Tani	DKPP Lamongan			1875	100	
			Glagah		Mina Karya	DKPP Lamongan			1875	100	
			Glagah	Konang	Barokah I	DKPP Lamongan			750	100	
			Glagah		Barokah II	DKPP Lamongan			750	100	
			Glagah	Karangturi	Handayani II	DKPP Lamongan			2500	100	
			Glagah	Wonorejo	Subur	DKPP Lamongan			1000	100	
			Glagah		Jaya	DKPP Lamongan			1000	100	
			Glagah	Panggung	Arum II	DKPP Lamongan			1250	100	
			Glagah	Bapuhbaru	Senang I	DKPP Lamongan			1750	100	



			Glagah		Senang II	DKPP Lamongan				1750	100	
			Glagah	Wedoro	Agung 01	DKPP Lamongan				1000	100	
			Glagah		Jaya Agung	DKPP Lamongan				1250	100	
			Glagah	Meluwur	Usaha I	DKPP Lamongan				1875	100	
			Glagah	Dukuhtunggal	Maju Satu Pedurangan	DKPP Lamongan				1875	100	
			Glagah		Maju II	DKPP Lamongan				1875	100	
			Glagah	Meluntur	Adil Makmur	DKPP Lamongan				1875	100	
			Glagah	Tanggungprigel	Sumber Rejeki I	DKPP Lamongan				1250	100	
			Glagah		Sumber Rejeki II	DKPP Lamongan				750	100	
			SUKODADI	Sukodadi	Soponyono	DKPP Lamongan				500	100	
			SUKODADI	Sukodadi	Tani Mulyo I	DKPP Lamongan				500	100	
			SUKODADI	Sidogembul	Gemah Ripah	DKPP Lamongan				750	100	
			SUKODADI	Sidogembul	Sri Rejeki	DKPP Lamongan				1250	100	
			SUKODADI	Kebonsari	Usaha Makmur	DKPP Lamongan				1500	100	
			SUKODADI	Pajangan	Tani Harapan I	DKPP Lamongan				625	100	
			SUKODADI	Pajangan	Tani Harapan III	DKPP Lamongan				625	100	
			SUKODADI	Pajangan	Tani harapan IV	DKPP Lamongan				750	100	
			SUKODADI	Madulegi	Tani Makmuri I	DKPP Lamongan				1875	100	
			SUKODADI	Madulegi	Tani Makmur II	DKPP Lamongan				875	100	
			SUKODADI	Madulegi	Tani Makmur IV	DKPP Lamongan				625	100	
			SUKODADI	Madulegi	Mekar Sari	DKPP Lamongan				1125	100	
			SUKODADI	Sukolilo	Sumber Makmur	DKPP Lamongan				1500	100	
			SUKODADI	Sukolilo	Cahaya Budi	DKPP Lamongan				1250	100	
			SUKODADI	Sukolilo	Tirto Makmur	DKPP Lamongan				375	100	
			SUKODADI	Balungawun	Sumber Mulyo	DKPP Lamongan				2000	100	
			SUKODADI	Menongo	Wahana Lestari	DKPP Lamongan				1250	100	
			SUKODADI	Menongo	Karya makmur	DKPP Lamongan				1000	100	
			SUKODADI	Tlogorejo	Ringin Mulyo	DKPP Lamongan				875	100	
			SUKODADI	Tlogorejo	Sumber Mulyo	DKPP Lamongan				1000	100	
			SUKODADI	Tlogorejo	Tlogo Mulyo	DKPP Lamongan				625	100	
			SUKODADI	Plumpang	Suka Unggul	DKPP Lamongan				2000	100	
			SUKODADI	Plumpang	Karya Tani	DKPP Lamongan				500	100	
			SUKODADI	Plumpang	Harapan Mulya	DKPP Lamongan				2500	100	
			SUKODADI	Baturono	Langsung Jaya I	DKPP Lamongan				875	100	
			SUKODADI	Baturono	T T Langsung Jaya II	DKPP Lamongan				875	100	
			SUKODADI	Baturono	Sumber Makmur	DKPP Lamongan				750	100	
			SUKODADI	Baturono	Balung Jaya	DKPP Lamongan				375	100	
			SUKODADI	Baturono	Geneng Makmur	DKPP Lamongan				625	100	
			SUKODADI	Sugihrejo	Sri Sedono	DKPP Lamongan				1375	100	
			SUKODADI	Siwalanrejo	Bangun Tani 01	DKPP Lamongan				1000	100	
			SUKODADI	Siwalanrejo	Bangun Tani 02	DKPP Lamongan				375	100	
			SUKODADI	Siwalanrejo	Karya Tani 01	DKPP Lamongan				500	100	
			SUKODADI	Siwalanrejo	Karya Tani 02	DKPP Lamongan				375	100	
			SUKODADI	Sugihrejo	Sri Rejeki	DKPP Lamongan				1025	100	
			SUKODADI	Banjarejo	Handayani	DKPP Lamongan				600	100	
			SUKODADI	Banjarejo	Dali Mas	DKPP Lamongan				625	100	



			SUKODADI	Banjarejo	Mulyo Jaya	DKPP Lamongan			750	100	
			SUKODADI	Banjarejo	Sumber Hidup	DKPP Lamongan			500	100	
			SUKODADI	Banjarejo	Sumber Jaya	DKPP Lamongan			375	100	
			SUKODADI	Banjarejo	Pertiwi	DKPP Lamongan			625	100	
			SUKODADI	Gedangan	Tani Makmur 01	DKPP Lamongan			1875	100	
			SUKODADI	Gedangan	Tani Makmur 02	DKPP Lamongan			1000	100	
			SUKODADI	Gedangan	Tani Makmur 03	DKPP Lamongan			625	100	
			SUKODADI	Gedangan	Tani Makmur 04	DKPP Lamongan			500	100	
			SUKODADI	Sumberagung	Surya Harapan	DKPP Lamongan			625	100	
			SUKODADI	Sumberagung	Rukun Tani	DKPP Lamongan			1625	100	
			Pucuk	Gempolpadding	Sri Jaya Gempolpadding	DKPP Lamongan			750	100	
			Pucuk	Gempolpadding	Sri Rejeki Gempolpadding	DKPP Lamongan			750	100	
			Pucuk	Gempolpadding	Sri Gading	DKPP Lamongan			750	100	
			Pucuk	Gempolpadding	Sri Kunciung	DKPP Lamongan			625	100	
			Pucuk	Wanar	Tani Membangun	DKPP Lamongan			1000	100	
			Pucuk	Wanar	Tani Makmur Wanar	DKPP Lamongan			750	100	
			Pucuk	Wanar	Sumber Rejeki Wanar	DKPP Lamongan			625	100	
			Pucuk	Wanar	Sumber Makmur Desa Wanar	DKPP Lamongan			750	100	
			Pucuk	Wanar	Surya Mandiri	DKPP Lamongan			500	100	
			Pucuk	Kesambi	Sidodadi	DKPP Lamongan			625	100	
			Pucuk	Warukulon	Tri Jaya	DKPP Lamongan			750	100	
			Pucuk	Warukulon	Tunas Muda	DKPP Lamongan			750	100	
			Pucuk	Waruwetan	Sido Makmur Waruwetan	DKPP Lamongan			625	100	
			Pucuk	Waruwetan	Suka Maju	DKPP Lamongan			625	100	
			Pucuk	Sumberjo	Mulyodadi II	DKPP Lamongan			1250	100	
			Pucuk	Sumberjo	Melati 01	DKPP Lamongan			1250	100	
			Pucuk	Sumberjo	Sumber Rejeki Sumberjo Pucuk	DKPP Lamongan			625	100	
			Pucuk	Sumberjo	Sumber Jaya	DKPP Lamongan			625	100	
			Pucuk	Sumberjo	Sumber Urip Sumberjo	DKPP Lamongan			625	100	
			Pucuk	Bugoharjo	Mitra abadi	DKPP Lamongan			1250	100	
			Pucuk	Bugoharjo	Budi karya	DKPP Lamongan			1250	100	
			Pucuk	Bugoharjo	Nusantara bugoharjo	DKPP Lamongan			1250	100	
			Pucuk	Padenganploso	Hasil karya Padenganploso	DKPP Lamongan			750	100	
			Pucuk	Padenganploso	Tani Mulyo 01	DKPP Lamongan			1250	100	
			Pucuk	Padenganploso	Tani Mulyo II	DKPP Lamongan			1250	100	
			Pucuk	Padenganploso	Tani Mulyo 03	DKPP Lamongan			1250	100	
			Pucuk	Ngambeg	Maju jaya Pucuk	DKPP Lamongan			750	100	
			Pucuk	Ngambeg	Maju makmur Ngambeg	DKPP Lamongan			1250	100	
			Pucuk	Ngambeg	Sri rejeki I	DKPP Lamongan			1250	100	
			Pucuk	Ngambeg	Sri rejeki 02	DKPP Lamongan			1250	100	
			Pucuk	Ngambeg	Mitra tani Ngambeg	DKPP Lamongan			1250	100	
			Pucuk	Tanggungan	Tani Makmur Tanggungan	DKPP Lamongan			875	100	
			Pucuk	Tanggungan	Adil Makmur	DKPP Lamongan			1250	100	
			Pucuk	Tanggungan	Rukun Makmur Tanggungan	DKPP Lamongan			1000	100	



			Pucuk	Tanggungan	Karya Makmur	DKPP Lamongan			1250	100	
			Pucuk	Karangtinggil	Tani Nanggala	DKPP Lamongan			625	100	
			Pucuk	Karangtinggil	Sumber Rejeki	DKPP Lamongan			625	100	
			Pucuk	Kedali	Margo Subur 01	DKPP Lamongan			1000	100	
			Pucuk	Kedali	Margo Subur 02	DKPP Lamongan			750	100	
			Pucuk	Kedali	Margo Subur 03	DKPP Lamongan			750	100	
			Pucuk	Kedali	Margo Subur 04	DKPP Lamongan			625	100	
			Pucuk	CUNGKUP	Jaya Makmur 01 Cungkup	DKPP Lamongan			750	100	
			Pucuk	CUNGKUP	Jaya Makmur II	DKPP Lamongan			1000	100	
			Pucuk	CUNGKUP	Jaya Makmur 03	DKPP Lamongan			875	100	
			Pucuk	CUNGKUP	Jaya Makmur IV	DKPP Lamongan			875	100	
			Pucuk	CUNGKUP	Jaya Makmur 05 Cungkup	DKPP Lamongan			1000	100	
			Pucuk	CUNGKUP	Jaya Makmur 06 Cungkup	DKPP Lamongan			875	100	
			Pucuk	BABATKUMPUL	Tani Maju 01	DKPP Lamongan			625	100	
			Pucuk	BABATKUMPUL	Tani Maju 02	DKPP Lamongan			625	100	
			Pucuk	BABATKUMPUL	Tani Makmur Poncol	DKPP Lamongan			875	100	
			Pucuk	BABATKUMPUL	Tani Jaya Kwanon	DKPP Lamongan			875	100	
			Pucuk	PLOSOSETRO	Pembangunan 01	DKPP Lamongan			625	100	
			Pucuk	PLOSOSETRO	Pembangunan II	DKPP Lamongan			625	100	
			Pucuk	PLOSOSETRO	Pembangunan III	DKPP Lamongan			500	100	
			Pucuk	PUCUK	LESTARI	DKPP Lamongan			875	100	
			Pucuk	PUCUK	RAHAYU	DKPP Lamongan			875	100	
			Pucuk	PUCUK	SETIA TANI	DKPP Lamongan			750	100	
			TURI	Badurame	POLO RAME 01	DKPP Lamongan			1000	100	
			TURI	Badurame	POLO RAME 02	DKPP Lamongan			1250	100	
			TURI	Balun	SUMBER REJEKI 03	DKPP Lamongan			750	100	
			TURI	Balun	SEKAR WANGI	DKPP Lamongan			1250	100	
			TURI	Balun	SEKAR ARUM	DKPP Lamongan			1250	100	
			TURI	Bambang	SIDO HASIL 02	DKPP Lamongan			1250	100	
			TURI	Gedongboyongun tung	HARAPAN JAYA I	DKPP Lamongan			750	100	
			TURI	Gedongboyongun tung	HARAPAN JAYA 02	DKPP Lamongan			1000	100	
			TURI	Gedongboyongun tung	HARAPAN JAYA 03	DKPP Lamongan			750	100	
			TURI	Geger	POLO JAYA 01	DKPP Lamongan			1250	100	
			TURI	Geger	POLO JAYA 02	DKPP Lamongan			1250	100	
			TURI	Karangwedoro	DWI JAYA 01	DKPP Lamongan			1000	100	
			TURI	Karangwedoro	DWI JAYA 02	DKPP Lamongan			1000	100	
			TURI	Karangwedoro	DWI JAYA 03	DKPP Lamongan			500	100	
			TURI	Keben	WALUYO 01	DKPP Lamongan			750	100	
			TURI	Keben	WALUYO 02	DKPP Lamongan			1000	100	
			TURI	Kemlagigede	SEKAR JAYA 01	DKPP Lamongan			1000	100	
			TURI	Kemlagigede	SEKAR JAYA 03	DKPP Lamongan			1000	100	
			TURI	Kemlagilor	SARI BUMI 02	DKPP Lamongan			750	100	
			TURI	Kemlagilor	SARI BUMI 03	DKPP Lamongan			750	100	



			TURI	Kepudibener	TANI SUBUR 02	DKPP Lamongan			1000	100	
			TURI	Kepudibener	TANI SUBUR 03	DKPP Lamongan			1000	100	
			TURI	Nguiungrejo	SUMBER MAKMUR 01	DKPP Lamongan			750	100	
			TURI	Nguiungrejo	RIDHO ILLAHI	DKPP Lamongan			500	100	
			TURI	Pomahanjanggan	TANI MAKMUR 02	DKPP Lamongan			750	100	
			TURI	Pomahanjanggan	TANI MAKMUR 03	DKPP Lamongan			500	100	
			TURI	Putatkumpul	SARI PANGAN	DKPP Lamongan			1000	100	
			TURI	Putatkumpul	SARI ROWO 02	DKPP Lamongan			1000	100	
			TURI	Putatkumpul	TANI JAYA	DKPP Lamongan			750	100	
			TURI	Sukoanyar	MULYO ABADI 02	DKPP Lamongan			750	100	
			TURI	Sukoanyar	MULYA ABADI III	DKPP Lamongan			750	100	
			TURI	Sukorejo	HARI JAYA 01	DKPP Lamongan			1250	100	
			TURI	Sukorejo	SUMBER MAKMUR	DKPP Lamongan			500	100	
			TURI	Tambakploso	BUMI MULYO 01	DKPP Lamongan			1250	100	
			TURI	Tambakploso	BUMI MULYO 02	DKPP Lamongan			1000	100	
			TURI	Tawangrejo	SUMBER LESTARI 01	DKPP Lamongan			1250	100	
			TURI	Tawangrejo	SUMBER LESTARI 02	DKPP Lamongan			1250	100	
			TURI	Turi	RAHAYU 01	DKPP Lamongan			1250	100	
			TURI	Turi	RAHAYU 02	DKPP Lamongan			500	100	
			TURI	Wangunrejo	WALUYO JATI 01	DKPP Lamongan			1000	100	
			TURI	Wangunrejo	WALUYO JATI 02	DKPP Lamongan			750	100	
			Babat	Gembong	Sumber Makmur	DKPP Lamongan			1250	100	
			Babat	Gembong	sri makmur	DKPP Lamongan			1250	100	
			Babat	Gembong	makmur	DKPP Lamongan			1250	100	
			Babat	Sogo	Sogo Lestari I	DKPP Lamongan			1250	100	
			Babat	Sogo	Sogo Lestari II	DKPP Lamongan			1250	100	
			Babat	Gendongkulon	Tani Lestari	DKPP Lamongan			1250	100	
			Babat	Gendongkulon	Gendong Lestari	DKPP Lamongan			1875	100	
			Babat	Trepan	Sido dadi	DKPP Lamongan			1000	100	
			Babat	Trepan	Sido Luhur	DKPP Lamongan			750	100	
			Babat	Kebalanpelang	Balan maju I	DKPP Lamongan			1250	100	
			Babat	Kebalanpelang	Balan maju II	DKPP Lamongan			1250	100	
			Babat	truni	truni maju I	DKPP Lamongan			1250	100	
			Babat	truni	truni maju II	DKPP Lamongan			1250	100	
			Sekaran	Latek	Tani Mulyo 01 Latek	DKPP Lamongan			1250	100	
			Sekaran	Ngarum	Suko Tani II Ngarum	DKPP Lamongan			1250	100	
			Sekaran	Kudikan	Sido Makmur kudikan	DKPP Lamongan			1000	100	
			Sekaran	Kebalankulon	Tani Luhur II Kebalankulon	DKPP Lamongan			1250	100	
			Sekaran	Jugo	Makaryo 01 Jugo	DKPP Lamongan			1250	100	
			Sekaran	Jugo	Tani Makaryo III Jugo	DKPP Lamongan			1250	100	
			Sekaran	Bulutengger	Wilujeng Tengger	DKPP Lamongan			1250	100	
			Sekaran	Siman	Tani Mulyo 01 Siman	DKPP Lamongan			1250	100	
			Sekaran	Kembangan	Sekar 01 Kembangan	DKPP Lamongan			1125	100	
			Sekaran	Karang	Tani Murni Karang	DKPP Lamongan			1250	100	
			Sekaran	Porodeso	Sumber Rejeki 01 Porodeso	DKPP Lamongan			1000	100	



				Sekaran	Besur	Tani Karyo III Besur	DKPP Lamongan				875	100	
				Sekaran	Kendal	Rukun Makaryo II Kendal	DKPP Lamongan				1250	100	
				Sekaran	Titik	Makaryo II Titik	DKPP Lamongan				1000	100	
				Sekaran	Troso	Tani Harapan 01 Trosono	DKPP Lamongan				1000	100	
				Sekaran	Troso	Tani Harapan II Trosono	DKPP Lamongan				1000	100	
				Sekaran	Manyar	Tani Subur III Manyar	DKPP Lamongan				875	100	
				Sekaran	Sekaran	Sekar Gading 01 Sekaran	DKPP Lamongan				1250	100	
				Sekaran	Sekaran	Sekar Gading III Sekaran	DKPP Lamongan				1250	100	
				Sekaran	Moro	Tani Maju 01 Moro	DKPP Lamongan				625	100	
				Sekaran	Sungegeneng	Sekar Srengenge II Sungegeneng	DKPP Lamongan				1250	100	
				Sekaran	Sungegeneng	Sekar Srengenge III Sungegeneng	DKPP Lamongan				1250	100	
				Sekaran	Sungegeneng	Sekar Srengenge V Sungegeneng	DKPP Lamongan				1250	100	
				Sekaran	Manyar	Tani Subur 01 Manyar	DKPP Lamongan				1250	100	
				Sekaran	Keting	Tani Jaya 01 Kedalon	DKPP Lamongan				1125	100	
				Kedungpring	Kalen	SRI MANFAAT KEDUNGREJO	DKPP Lamongan				625	100	
				Kedungpring	Kalen	SUMBER MAKMUR BANJAR	DKPP Lamongan				625	100	
				Kedungpring	Kalen	SUMBER KENCANA TAMBAREJO	DKPP Lamongan				625	100	
				Kedungpring	Kandangrejo	SRI MAKMUR KEDUNG	DKPP Lamongan				625	100	
				Kedungpring	Kandangrejo	SRI JAYA KANDANGAN	DKPP Lamongan				625	100	
				Kedungpring	Kandangrejo	SRI SEDANI TREWEK	DKPP Lamongan				625	100	
				Kedungpring	Kandangrejo	SRI GATI TREWEK	DKPP Lamongan				625	100	
				Kedungpring	Blawirejo	BAROKAH BLAWI	DKPP Lamongan				625	100	
				Kedungpring	Blawirejo	TANI JAYA BLAWI	DKPP Lamongan				625	100	
				Kedungpring	Blawirejo	DEWI SRI BLAWI	DKPP Lamongan				625	100	
				Kedungpring	Majenang	MULYA JAYA MEJONO	DKPP Lamongan				625	100	
				Kedungpring	Majenang	TANI UTOMO SAWAHAN	DKPP Lamongan				625	100	
				Kedungpring	Majenang	CITRA TANI MAJENANG	DKPP Lamongan				625	100	
				Kedungpring	Majenang	TANI MAKARYO KRANGGAN	DKPP Lamongan				625	100	
				Kedungpring	Majenang	SABILILLAH SAWAHAN	DKPP Lamongan				625	100	
				Kedungpring	Karangcangkring	ANEKA KARYA PIYAK	DKPP Lamongan				625	100	
				Kedungpring	Karangcangkring	SUMBER MAKMUR KAYEN	DKPP Lamongan				625	100	
				Kedungpring	Sukomalo	SUMBER USAHA SUKOGENENG	DKPP Lamongan				625	100	
				Kedungpring	Sukomalo	SIDO MAKMUR MOJOROTO	DKPP Lamongan				625	100	
				Kedungpring	Sukomalo	TANI RAHARJO LONGGEAN	DKPP Lamongan				625	100	
				Kedungpring	Sukomalo	SIDO KUMPUL KABLUK	DKPP Lamongan				625	100	
				Kedungpring	Sukomalo	SUMBER USAHA IFRAK	DKPP Lamongan				625	100	



			Kedungpring	Sukomalo	MULYO NGULOH SUKOMALO	DKPP Lamongan			625	100	
			Kedungpring	Sumengko	SUMBER MAKMUR NGENKRENG	DKPP Lamongan			625	100	
			Kedungpring	Sumengko	TANI MAKMUR KRANDON	DKPP Lamongan			625	100	
			Kedungpring	Sumengko	HARAPAN JAYA SUMENGKO	DKPP Lamongan			625	100	
			Kedungpring	Nglebur	SRI REJEKI SATU MEGARANG	DKPP Lamongan			625	100	
			Kedungpring	Nglebur	SRI REJEKI II MEGARANG	DKPP Lamongan			625	100	
			Kedungpring	Nglebur	MEKAR LESTARI SATU NGLEBUR	DKPP Lamongan			625	100	
			Kedungpring	Nglebur	MEKAR LESTARI DUA NGLEBUR	DKPP Lamongan			625	100	
			Kedungpring	Nglebur	MEKAR LESTARI TIGA NGLEBUR	DKPP Lamongan			625	100	
			Kedungpring	Nglebur	MEKAR LESTARI EMPAT	DKPP Lamongan			625	100	
			Kedungpring	Gunungrejo	SUMBER MAKMUR BANYUURIP	DKPP Lamongan			625	100	
			Kedungpring	Gunungrejo	JAYA MAKMUR PLONGKO	DKPP Lamongan			625	100	
			Kedungpring	Kradenanrejo	SUMBER JAYA KRADENAN	DKPP Lamongan			625	100	
			Kedungpring	Kradenanrejo	TANI JAYA NGEPUNG	DKPP Lamongan			625	100	
			Kedungpring	Kradenanrejo	TANI MAKMUR BANJAR	DKPP Lamongan			625	100	
			Kedungpring	Kradenanrejo	TUNAS UNGGUL KRADENAN	DKPP Lamongan			625	100	
			Sukorame	Sukorame	Rekso Mulyo	DKPP Lamongan			1125	100	
			Sukorame	Sukorame	Budi Luhur Sukorejo Sukorame	DKPP Lamongan			1125	100	
			Sukorame	Sukorame	Suko Asri	DKPP Lamongan			1125	100	
			Sukorame	Sukorame	Tunas Tani Putuk	DKPP Lamongan			875	100	
			Sukorame	Sukorame	Delima Dusun Sukorame	DKPP Lamongan			1125	100	
			Sukorame	Sukorame	Tri Gading Sukorame	DKPP Lamongan			750	100	
			Sukorame	Sukorame	Tani Bahagia Serut	DKPP Lamongan			875	100	
			Sukorame	Sukorame	Tani Makmur Sukorame Ngrowo	DKPP Lamongan			1125	100	
			Sukorame	Sukorame	Trubus Makmur Mojo	DKPP Lamongan			625	100	
			Sukorame	Sukorame	Rukun Santoso Ngentak	DKPP Lamongan			625	100	
			Sukorame	Kedungkumpul	Sinta Murni Paluombo	DKPP Lamongan			750	100	
			Sukorame	Kedungkumpul	Sumber Makmur Jedung	DKPP Lamongan			1125	100	
			Sukorame	Kedungkumpul	Karya Tani Samben	DKPP Lamongan			1125	100	
			Sukorame	Kedungkumpul	Karya Luhur Samben	DKPP Lamongan			1125	100	
			Sukorame	Kedungkumpul	Sumber Rezeki Deza Kedungkum	DKPP Lamongan			750	100	
			Sukorame	Mragel	Karya Makmur Mragel	DKPP Lamongan			750	100	
			Sukorame	Mragel	Jaya Makmur Mragel	DKPP Lamongan			750	100	
			Sukorame	Kedungrejo	Sari Asih Godang	DKPP Lamongan			625	100	



			Sukorame	Kedungrejo	Sebra Jaya Kedungjaran	DKPP Lamongan		625	100	
			Sukorame	Pendowokumpul	Tegal Arum Pendowo	DKPP Lamongan		625	100	
			Sukorame	Pendowokumpul	Jaya Makmur Turi Pendowo	DKPP Lamongan		625	100	
			Maduran	Taji	Harapan Maju II	DKPP Lamongan		1250	100	
			Maduran	Brumbun	Petani Maju 01	DKPP Lamongan		1250	100	
			Maduran	Brumbun	Petani Maju 02	DKPP Lamongan		1500	100	
			Maduran	Brumbun	Maju III	DKPP Lamongan		1500	100	
			Maduran	Siwuran	Tani Maju 01	DKPP Lamongan		1250	100	
			Maduran	Siwuran	Tani Maju II	DKPP Lamongan		1250	100	
			Maduran	Klagensrampat	Harapan Makmur 01	DKPP Lamongan		1000	100	
			Maduran	Klagensrampat	Harapan Makmur II	DKPP Lamongan		1250	100	
			Maduran	Pangean	Sekar Sari II	DKPP Lamongan		1250	100	
			Maduran	Pangean	Sekar Sari	DKPP Lamongan		1250	100	
			Maduran	Maduran	Santoso II	DKPP Lamongan		1250	100	
			Maduran	Maduran	Santoso III	DKPP Lamongan		1000	100	
			Maduran	Jangkungsomo	Sumber Makmur 01	DKPP Lamongan		625	100	
			Maduran	Parengan	Sekar Tani II	DKPP Lamongan		625	100	
			Maduran	Pringgoboyo	Udi Makmur II	DKPP Lamongan		625	100	
			Maduran	Gedangan	Maju Makmur Satu	DKPP Lamongan		750	100	
			Maduran	Turi	Sekar Turi	DKPP Lamongan		1250	100	
			Maduran	Turi	Banjar	DKPP Lamongan		1250	100	
			Maduran	Gumantuk	Harapan Makmur 01	DKPP Lamongan		1250	100	
			Maduran	Gumantuk	Harapan Makmur II	DKPP Lamongan		1250	100	
			Maduran	Ngayung	Suko Tani 01	DKPP Lamongan		1625	100	
			Maduran	Kanugrahan	Sumber Makmur 01	DKPP Lamongan		1250	100	
			Maduran	Kanugrahan	Sumber Makmur II	DKPP Lamongan		1250	100	
			Maduran	Kanugrahan	Sumber Makmur III	DKPP Lamongan		1250	100	
		Sarana Pengembangan Kawasan Padi Biofortifikasi (20 paket)	Pucuk	Paji	Tani Makmur Paji	DKPP Lamongan		1 paket	100	
		Benih Padi Inpari Nutrizinc	Pucuk	Paji	Tani Jaya	DKPP Lamongan		1 paket	100	
		NPK dan Pupuk Hayati	Maduran	Blumbang	Gawe Makmur 1	DKPP Lamongan		1 paket	100	
			Maduran	Blumbang	Gawe Makmur II	DKPP Lamongan		1 paket	100	
			Tikung	Dukuhagung	Ngudi Tani Lenjer	DKPP Lamongan		1 paket	100	
			Tikung	Dukuhagung	Tani Makmur Dukuh	DKPP Lamongan		1 paket	100	
			Tikung	Dukuhagung	Tani Rahayu Tinaro	DKPP Lamongan		1 paket	100	
			Tikung	Dukuhagung	Tani Mulyo Kacangan	DKPP Lamongan		1 paket	100	
			Tikung	Dukuhagung	Tani Mukti Mojaranu	DKPP Lamongan		1 paket	100	
			Babat	Kebalandono	sri rejeki I	DKPP Lamongan		1 paket	100	
			Babat	Kebalandono	sri rejeki II	DKPP Lamongan		1 paket	100	
			Babat	Kebalandono	sri rejeki III	DKPP Lamongan		1 paket	100	
			KEDUNGPRING	MEKANDEREJO	TANI BASUKI JANGUR	DKPP Lamongan		1 paket	100	
			KEDUNGPRING	MEKANDEREJO	TANI RAHAYU KANDE	DKPP Lamongan		1 paket	100	
			KEDUNGPRING	MEKANDEREJO	TANI LESTARI KALANGAN	DKPP Lamongan		1 paket	100	
			KEDUNGPRING	MEKANDEREJO	TANI MAKMUR JANGUR	DKPP Lamongan		1 paket	100	



			KEDUNGPRING	KEDUNGPRING	TERONG SARI	DKPP Lamongan			1 paket	100
			KEDUNGPRING	KEDUNGPRING	SRI REJEKI JETIS	DKPP Lamongan			1 paket	100
			KEDUNGPRING	KEDUNGPRING	RUKUN SANTOSO KEDUNGPRING	DKPP Lamongan			1 paket	100
			KEDUNGPRING	KEDUNGPRING	Tani Widodo	DKPP Lamongan			1 paket	100
		Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Sarana Produksi Budidaya Padi Kaya Gizi (7 paket)	Kalitengah	Sugihwaras	Harta Agung 01	DKPP Lamongan			1 paket	100
		Benih Padi Inpari Nutrizinc	Kalitengah	Sugihwaras	Harta Agung II	DKPP Lamongan			1 paket	100
		NPK dan Pupuk Hayati	Kalitengah	Sugihwaras	Harta Agung III	DKPP Lamongan			1 paket	100
			Kalitengah	Sugihwaras	Harta Agung IV	DKPP Lamongan			1 paket	100
			Kalitengah	Sugihwaras	Harta Agung 05	DKPP Lamongan			1 paket	100
			Kalitengah	Pengangsalan	Suka Maju 01	DKPP Lamongan			1 paket	100
			Kalitengah	Dibe	Sumber Rejeki II	DKPP Lamongan			1 paket	100
		Peningkatan Indeks Pertanaman Jagung (182.645 kg)	Brondong	Lembor	Ngudi Makmur Lembor	DKPP Lamongan			1125	
		Benih Jagung P40	Brondong	Lembor	Surya Tani Desa Lembor	DKPP Lamongan			525	100
		Bneih Jagung Pertiwi 3	Brondong	Lembor	Taruna Desa Lembor	DKPP Lamongan			525	100
		Benih Jagung NK 212	Brondong	Lembor	Karya Raharja Lembor	DKPP Lamongan			750	100
			Brondong	Lembor	Hijau Lestari Lembor	DKPP Lamongan			750	100
			Mantup	Tugu	Tani Sari Satu	DKPP Lamongan			150	100
			Mantup	Tugu	Sari Makmur Satu	DKPP Lamongan			225	100
			Mantup	Tugu	Sari Makmur Dua	DKPP Lamongan			225	100
			Mantup	Mojosari	Sri Lestari II	DKPP Lamongan			300	100
			Mantup	Mojosari	Sri Lestari Belud	DKPP Lamongan			300	100
			Mantup	Mojosari	Tambah Maju II	DKPP Lamongan			225	100
			Mantup	Mojosari	Sumber Makmur Sendangsari	DKPP Lamongan			150	100
			Mantup	Mojosari	Jaya Makmur Sendangsari	DKPP Lamongan			150	100
			Mantup	Mojosari	Tambah Makmur	DKPP Lamongan			150	100
			Mantup	Mojosari	Sido Rukun Mojoroto	DKPP Lamongan			225	100
			Mantup	Sukosari	Sumber Makmur KD Sari	DKPP Lamongan			375	100
			Mantup	Sukosari	Nompo Mulyo	DKPP Lamongan			300	100
			Mantup	Sukosari	Lestari Makmur Suko	DKPP Lamongan			375	100
			Mantup	Sukosari	Sari Bumi Sukosari	DKPP Lamongan			300	100
			Mantup	Sukosari	Sopo Nyono Nompo	DKPP Lamongan			300	100
			Mantup	Sumberkerep	Tani Karya Jaya	DKPP Lamongan			450	100
			Mantup	Sumberkerep	Suko Ati	DKPP Lamongan			450	100
			Mantup	Sumberkerep	Sumber Karya	DKPP Lamongan			450	100
			Mantup	Sumberkerep	Sumber Makmur Sentosa	DKPP Lamongan			450	100
			Mantup	Mantup	Tani Asih	DKPP Lamongan			450	100
			Mantup	Mantup	Tani Raharjo Panjeran	DKPP Lamongan			450	100



			Mantup	Mantup	Tani Asri	DKPP Lamongan			450	100	
			Mantup	Mantup	Tani Maju Sambilan	DKPP Lamongan			450	100	
			Mantup	Rumpuk	Perkumpulan Tani Sejahtera Pok	DKPP Lamongan			375	100	
			Mantup	Rumpuk	Perkumpulan Murah Rejeki Pokt	DKPP Lamongan			450	100	
			Mantup	Rumpuk	Perkumpulan Sri Rejeki Poktan	DKPP Lamongan			300	100	
			Mantup	Kedukbembem	Tunas Harapan	DKPP Lamongan			600	100	
			Mantup	Kedukbembem	Karya Tani Kedukbembem	DKPP Lamongan			600	100	
			Mantup	Kedukbembem	Tani Harapan	DKPP Lamongan			600	100	
			Mantup	Kedukbembem	Gemah Ripah	DKPP Lamongan			300	100	
			Mantup	Sumberdadi	Sri Rejeki Babatan	DKPP Lamongan			600	100	
			Mantup	Sumberdadi	Jaya Mulya Dua	DKPP Lamongan			600	100	
			Mantup	Sumberdadi	Jaya Mulya Satu	DKPP Lamongan			600	100	
			Mantup	Sumberdadi	Jaya Makmur Sumberdadi	DKPP Lamongan			300	100	
			Mantup	Sumberdadi	Sumber Makmur Kedungsumber Satu	DKPP Lamongan			300	100	
			Mantup	Sumberdadi	Sumber Makmur Kedungsumber Dua	DKPP Lamongan			300	100	
			Mantup	Sumberdadi	Sri Sedono	DKPP Lamongan			450	100	
			Mantup	Sumberdadi	Rukun Santoso	DKPP Lamongan			450	100	
			Mantup	Sidomulyo	Sido Makmur Jaya	DKPP Lamongan			375	100	
			Mantup	Sidomulyo	Sido Makmur SW	DKPP Lamongan			300	100	
			Mantup	Sumberbendo	Gagak	DKPP Lamongan			625	100	
			Mantup	Sumberbendo	Sumber Tani Satu	DKPP Lamongan			375	100	
			Mantup	Sumberbendo	Gebang Sewu Sumberbendo	DKPP Lamongan			375	100	

Sumber : Data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan, 2024 (diolah)



**D. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB KABUPATEN LAMONGAN**

**Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat  
Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Lamongan Tahun 2024**

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Output, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
1	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Perjanjian Kerjasama Antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Timur dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan Nomor: 1328/HK.03/J1/2023	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA								
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Lamongan	Dinas PPKB	60,000,000	59,985,900	99.98%			BOKB
			Pengadaan Barang Milik Daerah Peunjang Urusan Pemerintah Daerah								
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Lamongan	Dinas PPKB	2,224,069,000	2,119,173,183	95.28%			DAK FISIK: Laparaskopi, Sepeda Motor dan







			Melaksanakan pencetakan media KIE serta pembuatan media KIE Elektronik							
			Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPk melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Lamongan	Dinas PPKB	405,000,000	404,999,900	100.00%		BOKB
			Keluaran :							
			Jumlah Balai Penyuluhan KB yang melaksanakan kegiatan minilok							
			Rincian Kegiatan :							
			Kegiatan penyuluhan (mini lokarya)							
			Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPk	Lamongan	Dinas PPKB	675,000,000	674,468,100	99.92%		BOKB
			Keluaran :							
			Jumlah Peserta Orientasi Tenaga Lini Lapangan, Pembinaan Kader IMP, dan Penyuluhan KB							
			Rincian Kegiatan :							
			Sosialisasi orientasi tenaga lini lapangan, pembinaan kader IMP serta penyuluhan KB							
			Pengendalian Program KKBPk	Lamongan	Dinas PPKB	80,000,000	78,299,800	97.87%		BOKB
			Keluaran :							
			Jumlah pelaksanaan audit kasus stunting							
			Rincian Kegiatan :							



			Pelaksanaan audit kasus stunting							
			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)							
			Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Lamongan	Dinas PPKB	1,706,400,000	1,705,524,900	99.9 4%		BOKB
			Keluaran :							
			Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang melaksanakan penyuluhan							
			Rincian Kegiatan :							
			Penyuluhan yang dilakukan oleh PPKBD dan sub PPKBD							
			Pengendalian dan Pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta Pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota							
			Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Lamongan	Dinas PPKB	30,500,000	30,497,500	99.9 9%		BOKB
			Keluaran :							
			Jumlah Faskes KB yang menerima Alkon							
			Rincian Kegiatan :							
			Faskes Pelayanan KB							
			Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Lamongan	Dinas PPKB	1,133,118,000	1,025,772,900	90.5 3%		BOKB
			Keluaran :							



		Jumlah Akseptor Implant yang terlayani, Jumlah Akseptor IUD yang terlayani, dan Jumlah Akseptor MOP yang terlayani								
		Rincian Kegiatan :								
		Pelayanan Medis								
		<b>Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya</b>	Lamongan	Dinas PPKB	32,500,000	32,499,900	100.00%			BOKB
		Keluaran :								
		Jumlah faskes KB yang di monitoring								
		Rincian Kegiatan :								
		terdapat 28 Faskes KB yang dimonotoring								
		<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>								
		<b>Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB</b>	Lamongan	Dinas PPKB	3,750,000	2,950,000	78.67%			BOKB
		Keluaran :								
		Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB								
		<b>Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB</b>	Lamongan	Dinas PPKB	1,748,500,000	1,748,499,800	100.00%			BOKB



			Keluaran :							
			Jumlah Peserta Kegiatan Tribina; Jumlah Peserta Pelaksanaan Mekanisme Operasional Lapangan di Kampung KB; Jumlah Peserta Pertemuan Kelompok Kerja di Kampung KB							
			Rincian Kegiatan :							
			Kegiatan Pertemuan di Kampung KB							
			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS),</b>							
			<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>							
			<b>Penyediaan Biaya Operasional bagi pengelols dan pelaksanaan (kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</b>	Lamongan	Dinas PPKB	6,555,600,000	6,542,767,000	99.8 0%		BOKB
			Keluaran :							
			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan							



			Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga ( BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Lamongan	Dinas PPKB	300,000,000	294,110,000	100.00%			BOKB
			Keluaran :								
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia								

Sumber : Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Lamongan, 2024 (diolah)

### E. Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan

#### Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan Tahun 2024

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	KAB/ KOTA	SKPD Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		NIHIL	NIHIL			NIHIL	NIHIL		NIHIL		

Sumber : Data Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan, 2024 (diolah)



**F. Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan**

**Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat  
Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan Tahun 2024**

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Hambatan/ Permasalahan Dan Upaya Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Permasalahan : Upaya :
1	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 29 Januari 2024 tentang percepatan penyediaan air minum dan layanan pengelolaan air limbah domestik	Program Penyediaan Air Minum SPAM REGIONAL MOJALGRES , jaringan distribusi langsung sepanjang 11.410 meter dan 638 SR (sambungan Rumah)	Desa Takeranklanting , Desa Dukuh Agung dan Desa Pengambilanadi Kecamatan Tikung	3.668.897.000	3.668.897.000	100%	100%		ada kendala pemunduran calon pelanggan sebanyak 41 SR dari total 638 SR pada saat pekerjaan pelaksana Inpres namun sudah ada calon pengganti dari 41 SR yang di usulkan oleh Perumda Air Minum Kabupaten Lamongan dengan persyaratan harus di reviu Calon pelanggan oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan dan sudah



											mengajukan surat usulan penggantian calon pelanggan sebanyak 41 SR/KK oleh Bapak Bupati ke Direktur Jendral Cipta Karya Kementerian PU
2	Kementerian PUPR	Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1467/KPTS/M/2024, Tanggal 27 Juni 2024 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 775/KPTS/M/2024 Tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Direktorat Jenderal	Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat / PAMSIMAS	Desa Sembung Kecamatan Sukorame	400.000.000	400.000.000	100%	100%	1. Waktu pekerjaan mulai dari tahap Persiapan, Perencanaan dan Pelaksanaan :terlalu pendek karena penetapan lokasi baru tanggal 30 Agustus 2024 dan Penandatanganan Kontrak Swakelola pada tanggal 03 September 2024 2. Cuaca Extreem pada saat Pelaksanaan Kegiatan membuat	Pekerjaan dilaksanakan secara paralel dengan melibatkan seluruh komponen dan sumber daya di desa	
			Desa Sewor Kecamatan Sukorame	400.000.000	400.000.000	100%	100%				
			Desa Cerme Kecamatan Ngimbang	400.000.000	400.000.000	100%	100%				
			Desa Brumbun Kecamatan Maduran	400.000.000	400.000.000	100%	100%				
			Desa Kuripan Kecamatan Babat	400.000.000	400.000.000	100%	100%				
			Desa Pataan Kecamatan Sambeng	400.000.000	400.000.000	100%	100%				



	Cipta Karya Tahun Anggaran 2024								Pekerjaan berjalan agak lambat	
--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--

Sumber : Data Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan, 2024 (diolah)

### G. Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Lamongan

#### Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Lamongan Tahun 2024 Dana Alokasi Khusus (DAK)

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1. Peraturan Presiden No. 57 Tahun 2024 Tanggal 22 April 2024 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2024 2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2024 3. Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2024	Program Penyelenggaraan Jalan Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota 1. Keluaran (Output) : CBC 2450 M Rincian Kegiatan : Rekonstruksi Ruas Jalan Pucuk – Sekaran 2. Keluaran (Output) : CBC 1129 M Rincian Kegiatan : Rekonstruksi Ruas Jalan	Kecamatan Sekaran Kecamatan Solokuro	Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan	9.812.173.000 4.500.000.000	9.400.061.475 4.290.351.528	100 100	CBC 2450 M CBC 1129 M	100 100	



NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			3. Dadapan – Solokuro Keluaran (Output) : CBC 1650 M			6.863.811.000	6.546.143.700	100	CBC 1650 M	100	
			Rincian Kegiatan : Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Ruas Kedungpring - Sukobendu	Kecamatan Kedungpring							
			4. Keluaran (Output) : CBC 1650 M			7.375.000.000	7.192.265.200	100	CBC 1805 M	100	
			Rincian Kegiatan : Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Ruas Sugio - Tlanak	Kecamatan Sugio							
			5. Keluaran (Output) : CBC 2990 M			12.100.000.00 0	11.830.026.8 00	100	CBC 2990 M	100	
			Rincian Kegiatan : Rekonstruksi Ruas Jalan Sukodadi – Plembon	Kecamatan Sukodadi							
			6. Keluaran (Output) : CBC 2572 M			9.206.689.000	9.027.203.90 0	100	CBC 2572 M	100	
			Rincian Kegiatan : Rekonstruksi Ruas Jalan Sumberwudi - Maduran	Kecamatan Karanggene ng							



**Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakai (DBH CHT)**

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Kementerian Keuangan Republik Indonesia	1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2024 Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 2. Surat dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Keuangan Nomor 900.1.15.5/20741/Keu	Program Penyelenggaraan Jalan  Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota  1. Keluaran (Output) : CBC 1596 M	Kecamatan Modo	Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan	3.255.848.500	3.160.522.000	100	CBC 1596 M	100	
		da tentang Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan	Rincian Kegiatan : Rekonstruksi Ruas Jalan Mojorejo-Jegreg								



		Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Pajak Daerah, DBH DR, DBH CHT, DBH Sawit, DBH Migas Otsus serta TDF	2. Keluaran (Output) : CBC 537 M  Rincian Kegiatan : Rekonstruksi Ruas Jalan Mojorejo - Medalem	Kecamatan Modo		1.200.000.000	1.182.425.000	100	CBC 537 M	100	
			3. Keluaran (Output) : CBC 1162 M Rincian Kegiatan : Rekonstruksi Ruas Jalan Cangkring – Talunrejo	Kecamatan Bluluk		3.000.000.000	2.943.357.000	100	CBC 1162 M	100	
			4. Keluaran (Output) : CBC 890 M Rincian Kegiatan : Rekonstruksi Ruas Jalan Kalen – Jatipayak	Kecamatan Modo		1.900.000.000	1.860.610.000	100	CBC 890 M	100	
			5. Keluaran (Output) : CBC 1468 M Rincian Kegiatan : Rekonstruksi Ruas Jalan Tanjung – Songowareng	Kecamatan Bluluk		4.843.000.000	4.759.189.800	100	CBC 1468 M	100	
			6. Keluaran (Output) : CBC 1410 M  Rincian Kegiatan : Rekonstruksi Ruas Jalan Ngimbang - Bluluk	Kecamatan Ngimbang		2.165.458.151	2.135.874.800	100	CBC 1410 M	100	

Sumber : Data Dinas PU Bina Marga Kab. Lamongan, 2024 (diolah)



## H. Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan

### Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan Tahun 2024

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Hambatan/Permasalahan dan Upaya Penyelesaian
1	Kementerian Kesehatan (Global Fund)	Peraturan Menteri Kesehatan No. 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis	Program Tuberkulosis Kegiatan : Penanggulangan Tuberkulosis Keluaran (Output) : Eliminasi Tuberkulosis Rincian Kegiatan : - Packing Sputum	Faskes (RS, Klinik & Puskesmas)	Faskes (RS, Klinik & Puskesmas)	190.200.000	190.200.000	100%	1 kegiatan	100%	
			- Pengemasan Spesimen ke Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya	Faskes (RS, Klinik & Puskesmas)	Faskes (RS, Klinik & Puskesmas)	27,000,000	27,000,000	100%	1 kegiatan	100%	
			- Pengiriman specimen ke Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya	Faskes (RS, Klinik & Puskesmas)	Faskes (RS, Klinik & Puskesmas)	6,720,000	6,720,000	100%	1 kegiatan	100%	
			- Croscheck Fee	Laboratorium TB)	Laboratorium TB)	5.970.000	5.970.000	100%	1 kegiatan	100%	

Sumber : Data Dinas Kesehatan Kab. Lamongan, 2024 (diolah)



**I. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Lamongan**

**Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat  
Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Lamongan Tahun 2024**

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANAAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	HAMBATAN PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN
1	Kementerian Ketenagakerjaan	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara dan Barang Milik Negara Bidang Ketenagakerjaan	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Lamongan	BLK Disnaker Lamongan	645.014.000	644.426.500	99.91%	Pelatihan Pembuatan Roti dan Kue Sebanyak 32 Orang	100%	
		Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Ketenagakerjaan	Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Binalavotas						Tata Rias Pengantin dan Hantaran 16 Orang	100%	
		Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai Latihan Kerja Sidoarjo Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-026.13.2.050302/2024 Tanggal 30 November 2023							Plate Welder SMAW 2G 16 Org	100%	
		Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Sidoarjo Nomor 2.21/13/KU.02/I/2024							Menjahit Pakaian Wanita Dewasa 32 Orang	100%	
									Service Sepeda Motor Sistem Injeksi 16 Orang	100%	
									Desain Grafis Muda 16 Orang	100%	

Sumber : Data Dinas Ketenagakerjaan Kab. Lamongan, 2024 (diolah)



### **3.2. Tugas Pembantuan Provinsi Yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten/Kota**

Tugas pembantuan dari daerah provinsi yang ditugaskan kepada daerah kabupaten/kota

#### **3.1.3. Target Kinerja**

##### **A. DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMONGAN**

Target kinerja tugas pembantuan provinsi yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

1. Bidang Rehabilitasi Sosial  
Kegiatan Penyandang Disabilitas sumber dana APBD PROV
2. Bidang Pemberdayaan Sosial  
Kegiatan TKSK, jumlah bantuan pada operasional TKSK sebanyak 27 orang
3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial  
Kegiatan Keluarga Harapan (PKH) plus

##### **B. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN LAMONGAN**

Target kinerja tugas pembantuan provinsi yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan adalah:

- Irigasi Perpompaan Besar Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
  - o 6 paket prasarana irigasi perpompaan
  - o 120 unit pompa air
- Peningkatan Indeks Pertanaman
  - o 100.000 kg benih padi Inpari 32
- Peningkatan Indeks Pertanaman
  - o 9 paket benih padi Inpari Nutrizinc dan NPK beserta pupuk hayati
- Peningkatan Indeks Pertanaman Jagung
  - o 45.000 kg benih jagung Bisi 321



### **C. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan**

Target Kinerja Tugas Pembantuan yang dilakukan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan :

- 1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas  
Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, Layanan Pengendalian dan Penanggulangan PMK. Pemberian bantuan vaksin PMK sebanyak 120.000 dosis vaksin PMK Sasaran kegiatan vaksinasi adalah ternak yang tidak terkena PMK, Sudah terealisasi 96.355 dosis.
- 2) Program Penandaan dan Pendataan Ternak  
Penunjukan petugas tim operasional/ pelaksana penandaan dan pendataan ternak, target penandaan ternak : 12.400 ekor dan realisasi : 12.400 ekor.
- 3) Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, Mandiri dan Sejahtera (Peti Koin Bermantra)  
Program Peti Koin Bermantra merupakan keberlanjutan dan desain ulang *Anti Poverty Program (APP)* yang sudah berjalan sejak tahun 2003 di 17 Kabupaten lokasi APP di Jawa Timur salah satunya di Kabupaten Lamongan berupa hibah ternak.

### **D. Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan**

Target Kinerja Tugas Pembantuan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan :

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan  
Kegiatan : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kab/Kota  
Keluaran (Output) : 5 dokumen Promkes, Advokasi Kemitraan & Pemberdayaan Masyarakat  
Rincian Kegiatan : Pendampingan pesantren sehat, terdiri



dari :

Orintasi pendampingan pesantren sehat

- a. Pertemuan SMD (Survey Mawas Diri)
- b. Pertemuan MMPP
- c. (Musyawarah Masyarakat Pondok Pesantren)
- d. Evaluasi Pendampingan Pesantren Sehat
- e. Pembuatan media

2. Program : Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan  
Kegiatan : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,  
Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor  
Tingkat Daerah Kab/Kota

Keluaran (Output) : 4 dokumen Promkes, Advokasi  
Kemitraan & Pemberdayaan Masyarakat

Rincian Kegiatan : Pendampingan Ibu Hamil KEK terdiri dari:

- a. Rapat koordinasi pendampingan ibu hamil KEK
- b. Peningkatan Kapasitas kader pendampingan Ibu hamil KEK
- c. Evaluasi pendampingan ibu hamil KEK
- d. Pembuatan media

#### **E. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan**

Berdasarkan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 400.10.2/3169/112.2/2024 tentang Penyampaian Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan ke Kabupaten dan Kota Batu untuk Honorarium Aparatur Pemerintah Desa pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024:

- Kepala Desa sejumlah 462 dengan anggaran masing-masing Rp300.000 sehingga jumlah seluruh anggaran Rp138.600.000;
- Sekretaris Desa sejumlah 462 dengan anggaran masing-masing Rp275.000 sehingga jumlah seluruh anggaran



Rp127.050.000;

- Kepala Urusan sejumlah 1.386 dengan anggaran masing-masing Rp250.000 sehingga jumlah seluruh anggaran Rp346.500.000;
- Kepala Seksi sejumlah 1.386 dengan anggaran masing-masing Rp250.000 sehingga jumlah seluruh anggaran Rp346.500.000;
- Kepala Kewilayahan/Dusun sejumlah 1.431 dengan anggaran masing-masing Rp250.000 sehingga jumlah seluruh anggaran Rp357.750.000;
- Staf Desa sejumlah 462 dengan anggaran masing-masing Rp250.000 sehingga jumlah seluruh anggaran Rp92.400.000.



### 3.1.4. Realisasi

#### A. Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

#### Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2024

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana TP	Tahap	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Bidang Pemberdayaan Sosial	Permensos Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Program: Pemberdayaan Sosial Kegiatan: TKSK Keluaran(Output): Terlaksananya operasional TKSK di Kab. Lamongan Rincian Kegiatan: pemberian operasional pada Tenaga Kesejahteraan Sosial Tenaga Kecamatan (TKSK)	Kab. Lamongan	Dinsos Kab. Lamongan		81.000.000	81.000.000	100%	81.000.000	100%	
2	Bidang Rehabilitasi Sosial	Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/151/KITS/013/2021 tentang Penerima Bantuan Sosial	Program: Rehabilitas Sosial Kegiatan: ASPD (Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas) Perorangan Keluaran(Output): Terlaksananya bantuan pada disable berat di Kab. Lamongan Rincian Kegiatan: pemberi bantuan pada disable berat	Kab. Lamongan	Dinsos Kab. Lamongan		223.300.000	223.300.000	100%	223.300.000	100%	
3	Kemensos	Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan	Program : Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kab Lamongan	Dinsos Kab Lamongan	1	1.593.500.000	1.593.500.000	100%	1.593.500.000	100%	
			Kegiatan : Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota			2	1.201.500.000	1.201.500.000	100%	1.201.500.000	100%	
			Sub kegiatan : Fasilitasi bantuan sosial Kesejahteraan Keluarga			3	1.451.500.000	1.451.500.000	100%	1.451.500.000	100%	



No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana TP	Tahap	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Keluaran(output) : terlaksananya bantuan uang non tunai pada komponen KPM PKH plus di Kab Lamongan			4	1.400.000.000	1.400.000.000	100%	1.400.000.000	100%	

Sumber : Data Dinas Sosial Kab. Lamongan, 2024 (diolah)

## B. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan

### Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan

#### (Bantuan Keuangan Kabupaten Bagi Aparatur Pemerintah Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2024)

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program, Kegiatan, Output, Dan Rincian Kegiatan	Kab/ Kota	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 400.10.2/3169/112.2/2024 tentang Penyampaian Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan ke Kabupaten dan Kota Batu untuk Honorarium Aparatur Pemerintah Desa pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024	Bantuan Keuangan Kabupaten Bagi Aparatur Pemerintah Desa <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Desa</li> <li>• Sekretaris Desa</li> <li>• Kepala Urusan</li> <li>• Kepala Seksi</li> <li>• Kepala Dusun</li> <li>• Staf Desa</li> </ul>	LMG	Dinas PMD	Rp2.817.600.000,00	Rp2.407.250.000,00	85,44%	Rp2.407.250.000,00	100%	

Sumber : Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lamongan, 2024 (diolah)



**C. Dinas Ketahanan Pangan, dan Pertanian Kabupaten Lamongan**

**Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi  
Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan Tahun 2024**

NO	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi			SKPD Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Hambatan/Permasalahan dan Upaya Penyelesaian
				Kec	Desa	Kelompok							
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12
		Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 Nomor SP NOMOR : SP DIPA - 018.08.4.059185/2024 Revisi 10 tanggal : 31 Juli 2024	Kegiatan Irigasi Perpompaan Besar Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian:				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan						
			120 unit pompa	Babat	Trepan	Sidodadi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
				Babat	Trepan	Sido luhur	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab.				1 unit	100	



							Lamongan					
				Babat	Kebalanpelang	Balan maju I	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100
				Babat	Truni	Truni Maju I	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100
				Babat	Sogo	Sogo Lestari II	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100
				Babat	Tritunggal	Mekar Sari	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100
				Bluluk	Kuwurejo	Joyo Makmur Kuwurejo	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100
				Bluluk	Cangkring	Margo Rukun Mlaten	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100
				Bluluk	Bluluk	Mardi Utomo Bluluk	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100
				Bluluk	Talunrejo	Ngudi Aman	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100
				Bluluk	Bronjong	Muji Langgeng	Dinas Ketahanan				1 unit	100



							Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan						
				Bluluk	Primpen	Sri Rejeki Tlatah	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
				Bluluk	Banjargondang	Tani Asih Bluluk	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
				Deket	Rejo Tengah	Karya Jaya II	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
				Deket	Sidomulyo	Giat	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
				Deket	Srirande	Sriwidya II	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
				Deket	Sidorejo	Budi Luhur	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
				Deket	Laladan	Ngudi Mulyo	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
				Glagah	Sudangan	Handayani II	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab.				1 unit	100	



							Lamongan						
				Glagah	Mluwur	Usaha Satu	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
				Glagah	Jatirenggo	Mina Karya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
				Glagah	Konang	Barokah II	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
				Glagah	Dukuhtunggal	Maju Satu Pedurangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
				Kalitengah	Pengangsalan	Suka Maju II	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
				Kalitengah	Butungan	Sumber Bahagia II	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
				Kalitengah	Pucangtelu	Subur Makmur III	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
				Kalitengah	Pucangro	Hargo Mulyo 01	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
				Kalitengah	Bojoasri	Ngudi Luhur III	Dinas Ketahanan				1 unit	100	



				h			Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan						
				Kalitengah	Sugiharas	Harta Agung III	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
				Kalitengah	Kediren	Sumber Mulyo 01	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
				Kalitengah	Somosari	Puji Rahayu 01	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
				Kalitengah	Kuluran	Tumbuh 01	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
				Karanggeneng	Prijekngablag	Gapoktan Rame Gawe	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
				Karanggeneng	Jagran	Tani Raharjo III	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
				Karanggeneng	Kawistolegi	Sumber Makmur I	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
				Karanggeneng	Karanggeneng	Sri Lestari II	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab.				1 unit	100	



							Lamongan						
				Karangge neng	Kaligerman	Mekar Sari II	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
				Karangge neng	Tracal	Upoyo Bogo 01	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
				Karangge neng	karangrejo	Sari Bumi III	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
				Karangge neng	Mertani	Makmur Sejahtera	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
				Karangge neng	Latukan	Rukun Makmur I	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
				Karangge neng	Sonoadi	Adi Mulyo II	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
				Kedungpri ng	Kalen	Sri Manfaat Kedungrejo	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
				Kedungpri ng	Sumengko	Harapan Jaya Sumengko	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
				Kedungpri	Kandangrejo	Sri Rejeki	Dinas Ketahanan				1 unit	100	



				ng		Trewek	Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan						
				Kedungpring	Maindu	Melati Maindu	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
				Kedungpring	Kedungpring	Gapoktan Tani Abadi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
				Kembangbahu	Lopang	Sumber Baru Makmur	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
				Kembangbahu	Puter	Sari Tani Satu	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
				Kembangbahu	Tlogoagung	Terus Maju Slatung	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
				Kembangbahu	Kedungmegarih	Ngudi Rejeki Kedungdowo	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
				Kembangbahu	Kedungasri	Sri Lestari Cempleng	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
				Kembangbahu	Pelang	Mekar Sari	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab.				1 unit	100	



							Lamongan						
				Kembang bahu	Lopang	Sri Manunggal	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
				Lamongan	Banjarmendala n	Banjar Mulyo 01	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
				Lamongan	Sidoarjo	Rukun Makmur Sidorukun	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
				Lamongan	Jetis	Melati Indah Jetis LMG	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
				Lamongan	Rancangkencono	Bina Makmur RCG	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
				Laren	Karangwungul or	Mekar Jaya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
				Laren	Siser	Mandiri	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
				Laren	Mojoasem	Tirto Agung II	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
				Laren	Jabung	Karya Tani II	Dinas Ketahanan				1 unit	100	



							Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan						
				Maduran	Turi	Banjar	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
				Maduran	Pringgoboyo	Udi Makmur 01 Pringgoboyo	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
				Maduran	kanugrahan	Sumber Makmur 01 Pagendingan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
				Maduran	Blumbang	Gawe Makmur 01	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
				Mantup	Sumberbendo	Sumber Tani Dua	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
				Mantup	Tunggunjagir	Mulya Bersama Tunggu	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
				Mantup	Sukosari	Sumber Makmur Kd Ulo	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
				Mantup	Tunggunjagir	Walet	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab.				1 unit	100	



							Lamongan						
				Mantup	Sidomulyo	Sido Mukti SB	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
				Mantup	Rumpuk	Perkumpulan Murah rejeki poktan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
				Mantup	Mojosari	Sido Makmur Sidobinangun	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
				Modo	Kedungpengaron	Tani Murni Pengkol	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
				Modo	Kedungwaras	Sekar Maju	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
				Modo	Sidodowo	Margo Dadi Damarsi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
				Modo	Sidomulyo	Rukun Santoso Ngegot	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
				Modo	Sidodowo	Sido Dadi Damber	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
				Modo	Mojorejo	Rekso Mulyo	Dinas Ketahanan				1 unit	100	



						Lebak	Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan						
				Ngimbang	Munungrejo	Tani Joyo	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
				Ngimbang	Mendogo	Teguh Madu	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
				Ngimbang	Jejel	Rukun Makmur	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
				Paciran	Sumurgayam	Beringin Tunggal	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
				Pucuk	Gempolpading	Sri Kunciung	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
				Pucuk	Wanar	Sumber Makmur Desa Wanar	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
				Pucuk	Kedali	Margo Subur 04	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
				Pucuk	Ngambeg	Maju makmur Ngambeg	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab.				1 unit	100	



							Lamongan					
				Pucuk	Kesambi	Sido Makmur Kesambi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100
				Sambeng	Sidokumpul	Melati Subur Tambar	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100
				Sambeng	Candisari	Godong Ijo Sejahtera	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100
				Sambeng	Semampirejo	Budi Luhur Semampir	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100
				Sambeng	Sidokumpul	Nabati Tambar	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100
				Sarirejo	Dermolemahb ang	Rukun Abadi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100
				Sarirejo	Dermolemahb ang	Mudah Jaya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100
				Sarirejo	Kedungkumpul	Tani Mulyo	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100
				Sekaran	Sungegeneng	Sekar	Dinas Ketahanan				1 unit	100



						Srengenge III	Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan						
				Sekaran	Sungegeneng	Sekar Srengenge V	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
				Sugio	Jubelkidul	Tani Raharjo kedungjati	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
				Sugio	Supenuh	Sumber Makmur Supenuh	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
					Deketagung	Tani Karya Raharja	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
				Sugio	Jubellor	Dwi Mertani Paji	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
				Sukodadi	Menongo	Karya Makmur	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
				Sukodadi	Pajangan	Tani Harapan IV	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
				Sukodadi	Baturono	Geneng Makmur	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab.				1 unit	100	



							Lamongan					
				Sukodadi	Menongo	Urip Makmur	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100
				Sukodadi	Tlogorejo	Ringin Mulyo	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100
				Sukodadi	Sukolilo	Sumber Makmur	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100
				Sukodadi	Banjarejo	Sumber Barokah	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100
				Sukodadi	Sumberaji	Sumber Rejeki	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100
				Sukodadi	Sumberaji	Sumber Murni	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100
				Sukodadi	Sidogembul	Margi Mulyo	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100
				Sukodadi	Kadungrebu g	Margo Tani	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100
				Sukodadi	Plumpang	Suka Unggul	Dinas Ketahanan				1 unit	100



							Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan						
				Sukodadi	Bandungsari	Karya Sejati	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
				Sukorame	Sukorame	Rekso Mulyo	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
				Sukorame	Banggle	Sido Dadi Kedungpoh	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
				Sukorame	Kedungrejo	Mekar Sari Wedangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
				Tikung	Wonokromo	Sri Rukun	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
				Tikung	Dukuhagung	Tani Rahayu Tinaro	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
				Tikung	Pengumbulana di	Mardi Tani	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 unit	100	
			6 paket sarana prasarana irigasi	Brondong	Sendangharjo	Poktan Wanaasri	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab.	94000000	94000000	100	1 paket	100	



			perpipaan				Lamongan						
				Mantup	Plabuhanrejo	Poktan Tani Makmur Plabuhan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan	94000000	94000000	100	1 paket	100	
				Mantup	Tunggunjagir	Poktan Arebra Sejahtera	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan	94000000	94000000	100	1 paket	100	
				Sambeng	Tenggiring	Poktan Citra Mandiri	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan	94000000	94000000	100	1 paket	100	
				Sambeng	Semampirejo	Poktan Barokah Semampir Lamongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan	94000000	94000000	100	1 paket	100	
				Solokuro	Tebluru	Poktan Rukun Tani Ngula'An	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan	94000000	94000000	100	1 paket	100	
			Peningkatan Indeks Pertanaman	Karanggeneng	Karangwungu	Tani Seger Satu	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1125		
			Benih Padi Inpari 32 sebanyak	Karanggeneng	Sumberwudi	Udi Mulyo I	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1250		
			100.000	Karanggeneng	Sumberwudi	Udi Mulyo II	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				750		
				Karanggeneng	Mertani	Tani Sejahtera III	Dinas Ketahanan						



				eng			Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1250		
				Karanggen eng	Kawistolegi	Sumber Makmur IV	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1125		
				Karanggen eng	Kawistolegi	Sumber Makmur Baru	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				750		
				Karanggen eng	Kendalkemlagi	Rukun Gawe I	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1250		
				Karanggen eng	Kendalkemlagi	Rukun Gawe II	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1250		
				Karanggen eng	Kendalkemlagi	Rukun Gawe Wetan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1250		
				Karanggen eng	Kendalkemlagi	Rukun Gawe III	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1250		
				Karanggen eng	Kendalkemlagi	Rukun Gawe IV	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1125		
				Karanggen eng	Kendalkemlagi	Rukun Gawe Baru	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab.				1125		



							Lamongan					
				Karanggeneng	Karangrejo	Sari Bumi I	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan			1250		
				Karanggeneng	Karangrejo	Sari Bumi III	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan			750		
				Karanggeneng	Bantengputih	Makaryo Tani I	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan			2500		
				Karanggeneng	Latukan	Rukun Makmur VII	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan			1500		
				Kalitengah	Tiwet	Adi Karya 01	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan			500		
				Kalitengah	Tiwet	Adi Karya II	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan			500		
				Kalitengah	Tiwet	Adi Karya III	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan			375		
				Kalitengah	Tunjungmekar	Sumber Kencono 01	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan			750		
				Kalitengah	Tunjungmekar	Sumber Kencono II	Dinas Ketahanan					



							Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1875		
				Kalitengah	Pucangro	Hargo Mulyo 01	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1875		
				Kalitengah	Pucangro	Hargo Mulyo II	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1875		
				Kalitengah	Pucangtelu	Subur Makmur 01	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1125		
				Kalitengah	Pucangtelu	Subur Makmur II	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				500		
				Kalitengah	Pucangtelu	Subur Makmur III	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				625		
				Kalitengah	Pucangtelu	Subur Makmur IV	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1750		
				Kalitengah	Mungli	Sri Rejeki 01	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				2250		
				Kalitengah	Mungli	Sri Rejeki II	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab.				1875		



							Lamongan					
				Kalitengah	Cluring	Tekad Makmur 01	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1250	
				Kalitengah	Cluring	Tekad Makmur II	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1375	
				Kalitengah	Gambuhan	Tirto Mulyo 01	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				500	
				Kalitengah	Gambuhan	Tirto Mulyo II	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				500	
				Kalitengah	Gambuhan	Tirto Mulyo III	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				500	
				Kalitengah	Blajo	Rukun Jaya 01	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1875	
				Kalitengah	Blajo	Rukun Jaya II	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				625	
				Kalitengah	Blajo	Rukun Jaya III	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				375	
				Kalitengah	Jelakatur	Gemah Ripah IV	Dinas Ketahanan					



							Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				750		
				Kalitengah	Somosari	Puji Rahayu 01	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1875		
				Kalitengah	Somosari	Puji Rahayu II	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				625		
				Kalitengah	Somosari	Puji Rahayu III	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				2250		
				Kalitengah	Bojoasri	Ngudi Luhur 01	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1250		
				Kalitengah	Bojoasri	Ngudi Luhur II	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1250		
				Kalitengah	Bojoasri	Ngudi Luhur III	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1125		
				Kalitengah	Bojoasri	Ngudi Luhur IV	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1250		
				Karangbinangun	Karangbinangun	Madu Kismo Dua	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab.				1750		



							Lamongan						
				Karangbina ngun	Windu	Progresif Satu	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				2500		
				Karangbina ngun	Gawerejo	Kering Tani Satu	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				2500		
				Karangbina ngun	Kuro	Sekar Arum satu	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1250		
				Karangbina ngun	Priyoso	Dewi Sri Dua	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1000		
				Karangbina ngun	Putatbangah	Adil Makmur Tiga	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1250		
				Karangbina ngun	Sambopinggir	Sri Lestari Satu	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				3750		
				Karangbina ngun	Bogobabadan	Sejahtera Satu	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				625		
				Karangbina ngun	Watangpanjang	Harapan Dua	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1750		
				Karangbina	Banyuurip	Sri Rejeki Satu	Dinas Ketahanan						



				ngun			Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1000		
				Karangbina ngun	Palangan	Gotong Royong Dua	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				3000		
				Karangbina ngun	Mayong	Teladan Satu	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				3375		
				Karangbina ngun	Banjarejo	Sumber Makmur Dua	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				2500		
				Karangbina ngun	Pendowolimo	Sumber Makmur Tiga	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1750		
				Karangbina ngun	Baranggayam	Maju Jaya Satu	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1000		
				Karangbina ngun	Blawi	Mina Jaya Satu	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				3375		
				Karangbina ngun	Ketapangtelu	Mina Jaya Tiga	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				2500		
				Karangbina ngun	Sukorejo	Andalan Satu	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab.				2250		



							Lamongan					
				Karangbina ngun	Waruk	Setia Satu	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan			1250		
				Karangbina ngun	Karanganom	Sumber Urip Satu	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan			750		
				Karangbina ngun	Somowinangun	Rowo Jaya Satu	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan			1875		
				Deket	Deket Kulon	Tawakal	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan			625		
				Deket	Deket Kulon	Sido Makmur	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan			625		
				Deket	Sidorejo	Budi Mulyo	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan			625		
				Deket	Rejo Tengah	Karya Jaya I	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan			625		
				Deket	Rejo Tengah	Karya Jaya II	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan			625		
				Deket	Rejo Tengah	Karya Jaya III	Dinas Ketahanan					



							Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan			625		
				Deket	Rejo Tengah	Karya Jaya IV	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan			625		
				Deket	Babat Agung	Sri Agung	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan			625		
				Deket	Srirande	Sriwidya I	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan			625		
				Deket	Srirande	Sriwidya II	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan			625		
			Peningkatan Indeks Pertanaman (9 paket)	Kalitengah	Lukrejo	Sari Bumi 01	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan			1 paket		
			Bneih Padi Inpari Nutrizinc	Kalitengah	Lukrejo	Sari Bumi II	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan			1 paket		
			NPK dan Pupuk Hayati	Kalitengah	Lukrejo	Sari Bumi III	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan			1 paket		
				Kalitengah	Lukrejo	Sari Bumi IV	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab.			1 paket		



							Lamongan					
				Karanggen eng	Sungelebak	Tani Muncul I	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 paket	
				Karanggen eng	Sungelebak	Tani Muncul II	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 paket	
				Karanggen eng	Sungelebak	Tani Muncul III	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 paket	
				Karanggen eng	Sungelebak	Tani Muncul IV	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 paket	
				Karanggen eng	Sungelebak	Tani Muncul V	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1 paket	
			Peningkatan Indeks Pertanaman Jagung	Mantup	Kedungsoko	Suko Pari Suko	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				300	
			Benih Jagung varietas Bisi 321 (kg)	Mantup	Kedungsoko	Dewi Sri Satu	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				300	
			45.000	Mantup	Kedungsoko	Dewi Sri Dua Majjo	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				300	
				Mantup	Tugu	Sari Makmur Tiga	Dinas Ketahanan					



							Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				300		
				Mantup	Tugu	Tani Sari Bulu	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				300		
				Mantup	Sumberagung	Sari Agung Gempol Waru	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				450		
				Mantup	Sumberagung	Banjarselir	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				450		
				Mantup	Sumberagung	Sumber Mulyo Waru Lor	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				450		
				Mantup	Sumberagung	Sumber Makmur Gempol Waru	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				450		
				Mantup	Mojosari	Sido Sentosa	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				150		
				Mantup	Mojosari	Sido Makmur Sidobinangun	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				150		
				Mantup	Sukosari	Sumber Makmur KD ulo	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab.				450		



							Lamongan						
				Mantup	Sukosari	Sumber Tani Suko	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				300		
				Mantup	Sukosari	Tani Makmur Prono	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				300		
				Mantup	Sukosari	Sumber Rejeki Kepohsari	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				300		
				Mantup	Sukosari	Surya Makmur	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				300		
				Mantup	Sumberkerep	Suko Tani Makmur	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				300		
				Mantup	Mantup	Tani Subur Waton	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				750		
				Mantup	Mantup	Glugurejo	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				750		
				Mantup	Plabuhanrejo	Perkumpulan Poktan Gawe Makmur	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				450		
				Mantup	Plabuhanrejo	Perkumpulan Sari	Dinas Ketahanan						



						Tani Poktan	Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				375		
				Mantup	Plabuhanrejo	Srikiti Margo mulyo	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				375		
				Mantup	Plabuhanrejo	Perkumpulan Tani Maju Poktan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				375		
				Mantup	Rumpuk	Perkumpulan Tani Raharjo Poktan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				450		
				Mantup	Kedukbembem	Sido Makmur Gridi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				300		
				Mantup	Sumberbendo	Sekar Arum Jaya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				300		
				Mantup	Sumberbendo	Sumber Tani Dua	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				300		
				Mantup	Sidomulyo	Sido Mukti Sb	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				300		
				Mantup	Mantup	Tani Makmur Jaya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab.				300		



							Lamongan						
				Mantup	Mantup	Tani Makmur Kaopen	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				300		
				Mantup	Tunggunjagir	Jalak	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				300		
				Sugio	Lawanganagung	Lohjinawe Lawanganagung	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				675		
				Sugio	Lawanganagung	Sumber Makmur Klampok	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				600		
				Sugio	Bedingin	Sido Mulyo Tlogoagung	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				525		
				Sugio	Bedingin	Sido Makmur Kowak	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				525		
				Sugio	Kalitengah	Rukun Santoso Jegrek	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				900		
				Sugio	Kalitengah	Margo Utomo Buluplapak	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				825		
				Sugio	Gondanglor	Asri Manunggal	Dinas Ketahanan						



							Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				450		
				Sugio	Daliwangun	Margo Rukun Wangun	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				450		
				Sugio	Sidorejo	Karangrejo Caling	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				750		
				Laren	Gampangsejati	Sedio Utomo	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				525		
				Laren	Gampangsejati	Maju Makmur	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				675		
				Laren	Gampangsejati	Wono Asri (LMDH)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				750		
				Laren	Pelangwot	Harapan Jaya (LMDH)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				1125		
				Laren	Pelangwot	Sido Dadi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				525		
				Laren	Centini	Margo Joyo	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab.				300		



							Lamongan					
				Laren	Centini	Margo Joyo II	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				300	
				Laren	Keduyung	Sido Joyo	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				300	
				Laren	Brangsi	Loh Jinawe	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				450	
				Laren	Bulubrangsi	Makmur	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				450	
				Laren	Bulubrangsi	Jaya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				375	
				Laren	Godog	Mandiri	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				375	
				Laren	Karangtawar	Karangtawar	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				525	
				Laren	Tamanprijek	Gemah Ripah	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				375	
				Bluluk	Talunrejo	Ngudi Jaya	Dinas Ketahanan					



							Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				375		
				Bluluk	Talunrejo	Ngudi Pangestu	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				750		
				Bluluk	Talunrejo	Ngudi Hasil Talun	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				750		
				Bluluk	Talunrejo	Ngudi Luhur	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				375		
				Bluluk	Bluluk	Rukun Raharjo	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				375		
				Bluluk	Bluluk	Sari Murni	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				375		
				Bluluk	Bluluk	Kaum tani	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				375		
				Bluluk	Bluluk	Margo Subur Mengkuli	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				750		
				Bluluk	Bluluk	Sumber Makmur Suren	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab.				750		



							Lamongan					
				Bluluk	Bluluk	Banjarsari Bluluk	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan			375		
				Bluluk	Banjargondang	Roso asih	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan			375		
				Bluluk	Banjargondang	Tani asih Bluluk	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan			375		
				Bluluk	Primpen	Tani rahayu Primpen	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan			750		
				Bluluk	Primpen	Sri Rejeki Tlatah	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan			300		
				Bluluk	Bronjong	Muji Mulyo	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan			300		
				Bluluk	Bronjong	Muji santoso	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan			450		
				Bluluk	Bronjong	Muji Langgeng	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan			675		
				Bluluk	Bronjong	Muji Pangestu	Dinas Ketahanan					



							Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				450		
				Bluluk	Bronjong	Sido Mukti Ngrojo	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				450		
				Sukorame	Kedungkumpul	Tegal Ombo Jedung	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				600		
				Sukorame	Kedungkumpul	Sumber Makmur Jedung	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				375		
				Sukorame	Kedungkumpul	Bumi Sari Lampean	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				450		
				Sukorame	Kedungkumpul	Podomoro Lampean	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				450		
				Sukorame	Mragel	Karya Makmur Mragel	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				450		
				Sukorame	Mragel	Jaya Mulya Mragel	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				375		
				Sukorame	Kedungrejo	Mawar Arum Wedegan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab.				450		



							Lamongan					
				Sukorame	Kedungrejo	Sari Asih Godang	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan			450		
				Sukorame	Sukorame	Budi Luhur Sukorejo Sukorame	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan			450		
				Sukorame	Sukorame	Suko Asri	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan			450		
				Sukorame	Sukorame	Tani Bahagia Serut	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan			375		
				Sukorame	Sukorame	Delima Dusun Sukorame	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan			450		
				Sukorame	Sukorame	Tri Gading Sukorame	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan			375		
				Sukorame	Sukorame	Melati Gebang	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan			375		
				Sukorame	Sukorame	Jati Mulyo	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan			450		
				Sukorame	Sukorame	Trubus Makmur	Dinas Ketahanan					



						Mojo	Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				375		
				Sukorame	Pendowokumpul	Dewi Ratih Tulung	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				450		
				Sukorame	Pendowokumpul	Tani Makmur Nusantara	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				450		
				Sukorame	Pendowokumpul	Jaya Makmur Turi Pendowo	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				450		
				Sukorame	Sewor	Arum Dalu sewor	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				375		
				Sukorame	Sewor	Sukonoto	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				375		
				Sukorame	Sembung	Sumber Rejeki Sembung	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				450		



				Sukorame	Sembung	Sumber Pangan Sembung	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				375		
				Sukorame	Bangle	Mekar Sari Banggle	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				450		
				Sukorame	Bangle	Sidodadi Kedungpoh	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				375		
				Sukorame	Bangle	Sri Rejeki Banggle	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				375		
				Maduran	Pangean	Tani Jaya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				375		
				Maduran	Gedangan	Maju Makmur I	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan				300		

Sumber : Data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan, 2024 (diolah)



**D. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan**

**Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi  
Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2024**

No	Program/ Kegiatan	Target Bantuan	Realisasi	Capaian
1.	Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Dana Operasional Petugas	Operasional Petugas (Vaksinasi PMK)	80,29%
2.	Program Penandaan dan Pendataan Ternak	Dana Operasional Petugas	Operasional Petugas (Pemasangan eartag)	100%
3.	Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, Mandiri dan Sejahtera (Peti Koin Bermantra)	Hibah / bantuan Ternak kepada Kelompok Ternak	Penyaluran hibah ternak kepada Kelompok Ternak Panjeran Mulyo Desa Mantup Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan.	100%

Sumber : Data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan, 2024 (diolah)

**E. Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan**

**Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi  
Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan Tahun 2024**

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Hambatan/Permasalahan dan Upaya Penyelesaian
1.	Bidang Kesehatan (Kesmas) Dana BK	Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan Tahun 2024	Program : Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Kegiatan : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta	PP AI – Ikhlas PP Az Zahida PP Karang Sawo	Dinas Kesehatan	36.366.500	35.396.200	97%	5 dokumen	100%	



		Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren	Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kab/Kota Keluaran (Output) : 5 dokumen Promkes, Advokasi Kemitraan & Pemberdayaan Masyarakat Rincian Kegiatan : Pendampingan pesantren sehat, terdiri dari : Orintasi pendampingan pesantren sehat, Pertemuan SMD (Survey Mawas Diri), Pertemuan MMPP (Musyawarah Masy. Pondok Pesantren), Evaluasi, Pendampingan Pesantren Sehat Pembuatan media								
2.	Bidang Kesehatan (Kesmas) Dana BK	Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan Tahun 2024 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan	Program : Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Kegiatan : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kab/Kota Keluaran (Output) : 4 dokumen Promkes, Advokasi Kemitraan & Pemberdayaan Masyarakat Rincian Kegiatan : Pendampingan Ibu Hamil KEK terdiri dari : Rapat koordinasi pendampingan ibu hamil KEK, Peningkatan Kapasitas kader pendampingan Ibu hamil KEK, Evaluasi pendampingan ibu hamil KEK, Pembuatan media	Puskesmas Sukorame, Bluluk, Ngimbang, Sambeng, Sugio, Dradah, Modo, Deket, Laren, Paciran	Dinas Kesehatan	119.477.000	117.819.650	99%	4 dokumen	100%	



		Kesehatan Seksual									
3.	Bidang Kesehatan (Yankes) Dana BK	Peraturan Gubernur Jatim Nomor 4 Tahun 2010 tentang Podok Kesehatan Desa di Jawa Timur  Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Penjabaran APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023	Program: Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan utk UKM & UKP rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota Keluaran (Output) : Jumlah keluarga yg sudah dikunjungi dan di intervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan Puskesmas Rincian Kegiatan : kunjungan konseling dari pintu ke pintu, rapat koordinasi antara petugas Ponkesdes dan Organisasi Masyarakat	5 Ponkesdes, 4 Puskesmas	Dinas Kesehatan	6.360.000	6.360.000	100%	300 keluarga yg sudah dikunjungi	100%	

Sumber : Data Dinas Kesehatan Kab. Lamongan, 2024 (diolah)

### **3.3. Permasalahan Dan Kendala**

#### **3.3.1. Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan**

Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan tidak melaksanakan tugas pembantuan (NIHIL).

#### **3.3.2. Dinas Sosial Kabupaten Lamongan**

Hambatan/Permasalahan dalam pelaksanaan tugas pembantuan:

- Kegiatan Keluarga Harapan (PKH); Tidak ada kendala.
- Kegiatan PBI-JKN; Tidak ada Kendala
- ASPD (Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas) perorangan; Kendalanya adalah masih adanya warga yang tidak ingin menunjukkan anaknya atau keluarganya yang mengalami cacat berat. Hal ini terbukti dengan tidak dimasukkannya di Kartu Keluarga sehingga tidak memiliki KTP.
- TKSK; Tidak ada kendala.

#### **3.3.3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan**

Dalam pelaksanaan tugas pembantuan Provinsi terkait Bantuan Keuangan Kabupaten Bagi Aparatur Pemerintah Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 terdapat permasalahan yaitu:

1. Tugas pembantuan dilaksanakan pada bulan Desember atau di akhir tahun;
2. Jangka waktu pencairan yang singkat;
3. Database Aparatur Pemerintah Desa yang belum terupdate.

#### **3.3.4. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan**

Dalam melaksanakan tugas pembantuan baik dari provinsi maupun pusat, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tidak



mengalami kendala yang berarti. Semua tugas telah terlaksana dengan baik.

### **3.3.5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB kabupaten Lamongan**

Dalam melaksanakan kegiatan yang bersumber dari DAK, terdapat kendala yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan yaitu:

- Jumlah PLKB/PKB tidak seimbang dengan jumlah desa di kabupaten Lamongan sebanyak 474 Desa, sehingga rata-rata PLKB/PKB membina desa dengan perbandingan 1:7. sedangkan rasio ideal untuk pemenuhannya adalah 1:2.

### **3.3.6. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan**

Hambatan/Permasalahan Dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang dialami oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan diantaranya:

1. Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas
  - Adanya peternak yang masih menolak vaksinasi, karena takut akan adanya efek samping yang ditimbulkan.
2. Program Program Penandaan dan Pendataan Ternak
  - Adanya peternak yang menolak ternaknya dipasang eartag, karena takut ternak tersebut mengalami kesakitan dan takut akan adanya efek samping yang ditimbulkan setelah pemasangan eartag.

### **3.3.7. Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan**

Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan tidak melaksanakan tugas pembantuan (NIHIL).



### **3.3.8. Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan**

Hambatan/Permasalahan Dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang dialami oleh Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan diantaranya:

- Program BSPS

Dalam pelaksanaan Program BSPS selama tahun anggaran 2024 tidak terdapat permasalahan.

- Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) / PAMSIMAS

Dalam pelaksanaan Program PAMSIMAS selama tahun anggaran 2024 tidak terdapat permasalahan.

- Program Penyediaan Air Minum SPAM REGIONAL MOJOLAGRES

Dalam pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum SPAM REGIONAL MOJOLAGRES selama tahun anggaran 2024 tidak terdapat permasalahan.

### **3.3.9. Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan**

Adapun permasalahan dan kendala yang di hadapi oleh pemerintah kabupaten Lamongan dalam Kegiatan penanggulangan Tuberculosis (TB Paru) melalui kegiatan Packing Sputum, Pengemasan Spesimen ke Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya, Pengiriman specimen ke Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya, Croscheck Fee pada klinik adalah :

- a. Sempat terkendalanya logistic catridge TCM karena dibekukanya pengadaan dari alokasi DAK NF dan minimnya alokasi dari provinsi pada Tahun 2023;
- b. Belum semua klinik dan DPM yang mengikuti program TBC sehingga masih ada kasus yang tidak dilaporkan di SITB;
- c. Penderita TBC RO yang tidak memiliki BPJS dikarenakan komorbid yang tidak menjadi tanggungan GF.



### **3.3.10. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Lamongan**

Banyaknya peminat peserta pelatihan sehingga tidak semua terakomodir.

## **3.4. Saran Dan Tindak Lanjut**

### **3.4.1. Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan**

Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan tidak melaksanakan tugas pembantuan (NIHIL).

### **3.4.2. Dinas Sosial Kabupaten Lamongan**

Saran dan tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan tugas pembantuan:

- Kegiatan Keluarga Harapan (PKH); Tidak ada kendala.
- Kegiatan PBI-JKN;  
Untuk itu upaya Dinas Sosial Kabupaten Lamongan yaitu kerjasama dengan Operator Desa untuk membantu kecocokan NIK masyarakat dengan Disdukpencahil.
- ASPD (Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas) perorangan;  
Untuk itu upaya Dinas Sosial Kabupaten Lamongan perlu memberikan sosialisasi dan motivasi pada keluarga Disabel berat tentunya kerjasama dengan Mitra Dinsos seperti Paguyupan Disabel, TKSK, PKH. Selain itu Dinas Sosial Kabupaten Lamongan bekerjasama dengan Disdukpencahil untuk pembuatan KTP bagi Warga Disabilitas untuk bisa mendapatkan bantuan sosial.
- TKSK; Tidak ada kendala.



### **3.4.3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan**

Tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan tugas pembantuan Provinsi terkait Bantuan Keuangan Kabupaten Bagi Aparatur Pemerintah Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 yaitu:

- Berkoordinasi dengan Kecamatan Database Aparatur Pemerintah Desa;
- Input anggaran di aplikasi SIPD dan percepatan proses pencairan.

### **3.4.4. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan**

Tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah :

- a. Mempersiapkan segala dokumen yang diperlukan, termasuk dokumen administrasi dan dokumen pertanggungjawaban;
- b. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. Memahami risiko dan dapat mengendalikannya.

### **3.4.5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB kabupaten Lamongan**

Untuk menanggulangi permasalahan yang disebutkan di atas, perlu dilakukan tindak pencegahan antara lain:

- Memaksimalkan peran Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan sub Pembantu Pembina KB Desa (sub PPKBD) di lapangan yang memberikan informasi dan bantuan melalui pendidikan dan kegunaan alat kontrasepsi dengan memanfaatkan teknologi.

### **3.4.6. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan**

Tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan yaitu:



1. Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutann Mandiri dan Sejahtera (PETI KOIN BERMANTRA)
  - Melakukan evaluasi program secara berkala dengan mengembangkan pelaporan yang efektif untuk memantau perkembangan program
2. Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas
  - Terus melakukan KIE terhadap peternak dan mengajak berbagai instansi lain untuk turut serta menyukseskan Vaksinasi PMK seperti dari pihak TNI dan Polri, maupun perangkat desa setempat.
3. Program Program Penandaan dan Pendataan Ternak
  - Terus menerus melakukan KIE terhadap peternak dan mengajak berbagai instansi lain untuk turut serta menyukseskan Penandaan dan Pendataan Ternak seperti dari pihak TNI dan Polri, maupun perangkat desa setempat memotivasi petugas lapang semaksimal mungkin untuk mencapai target yang ditentukan.

#### **3.4.7. Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan**

Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan tidak melaksanakan tugas pembantuan (NIHIL).

#### **3.4.8. Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan**

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan selalu siap menerima tugas pembantuan demi keberlanjutan program di Kabupaten Lamongan.

#### **3.4.9. Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan**

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa solusi yang telah dilakukan antara lain :

- Dana yang semula bergantung pada bantuan hibah global



fund agar bisa di hibahkan kembali

- Berkoordinasi dengan bidang Yankes sehingga pasien bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dengan pembayaran baik BPJS atau sesuai aturan perundangan yang berlaku
- Penganggaran pengadaan catridge TCM 2024 yang sudah di buka kembali oleh kementrian kesehatan melalui dana BOK NF.
- Kegiatan supervise berkala ke semua fasyankes dengan melibatkan puskesmas yang menaungi fasyankes di bawahnya (klinik dan DPM).

#### **3.4.10. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Lamongan**

Penambahan anggaran sehingga masyarakat Kabupaten Lamongan dapat mengikuti pelatihan.



## BAB IV

### PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

#### 4.1. Urusan Pendidikan

##### 4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

SPM pendidikan mencakup SPM pendidikan daerah Provinsi dan SPM pendidikan daerah Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas:

1. Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Pendidikan Dasar;
3. Pendidikan Kesetaraan.

Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar yaitu warga negara dengan ketentuan:

1. Warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD/TK/RA;
2. Warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar/SD/MI;
3. Warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

#### Pelayanan Dasar Bidang Pelayanan Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan
1	Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini	Warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD/TK/RA
2	Pelayanan Pendidikan Dasar	Warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar/SD/MI
3	Pelayanan Pendidikan Kesetaraan	Warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan

Sumber : Data Dinas Pendidikan Kab. Lamongan, 2024 (diolah)

##### 4.1.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

Target pencapaian SPM pada pelayanan bidang pelayanan pendidikan dikategorikan dalam target nasional dan target daerah. Target



Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh daerah tersebut disajikan sebagaimana tabel berikut:

**Target SPM Bidang Pelayanan Pendidikan**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Ket
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	35.698	2024	Angka partisipasi sekolah	84,20%	2024	
					Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	84,50%		
					Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	93,75%		
					Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	03,39%		
					Kecukupan formasi guru ASN	0		
					Indeks distribusi guru	0		
					Proporsi PTK bersertifika	65,23%		
					Proporsi PTK penggerak	00,29%		
					Pengalaman pelatihan guru	00,35%		
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD)	158.584	2024	Angka partisipasi kasar	100 %	2024	
					Angka partisipasi sekolah	99.75%		
					Angka partisipasi murni	94.5%		
					Kemampuan literasi	61,67		
					Kemampuan numerasi	55		
					Perbedaan skor literasi	0		
					Perbedaan skor numerasi	0		
					Indeks iklim keamanan	61,67		
					Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	57,33%		
					Kecukupan formasi guru ASN	24,38%		
					Indeks distribusi guru	0,62%		
					Proporsi PTK bersertifikat	52,03%		
					Proporsi PTK penggerak	0,05%		



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Ket
					Pengalaman pelatihan guru	45%		
		Jumlah warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SMP)	56.548	2024	Angka partisipasi kasar	100%	2024	
					Angka partisipasi sekolah	98,55%		
					Angka partisipasi murni	86,5%		
					Kemampuan literasi	70		
					Kemampuan numerasi	58		
					Perbedaan skor literasi	0		
					Perbedaan skor numerasi	0		
					Indeks iklim keamanan	66,9		
					Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	61%		
					Kecukupan formasi guru ASN	0%		
					Indeks distribusi guru	0%		
					Proporsi PTK bersertifikat	52,03%		
					Proporsi PTK penggerak	0,10%		
					Pengalaman pelatihan guru	45%		
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan)	1.650	2024	Angka partisipasi kasar	0%	2024	
					Angka partisipasi sekolah	2,95%		
					Angka partisipasi murni	0%		
					Kemampuan literasi	33,65		
					Kemampuan numerasi	29,9		
					Perbedaan skor literasi	0		
					Perbedaan skor numerasi	0		
					Indeks iklim keamanan	60,29		
					Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	54,46		
					Kecukupan formasi guru ASN	0%		
					Indeks distribusi guru	0%		
					Proporsi PTK bersertifikat	0%		
					Proporsi PTK penggerak	0%		
					Pengalaman pelatihan guru	0%		

Sumber : Data Dinas Pendidikan Kab. Lamongan, 2024 (diolah)



Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2024, standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh pendidikan dasar, pendidikan kesetaraan dan pendidikan Anak usia dini berupa standar satuan pendidikan, kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik, partisipasi dan pemerataan peserta didik serta kualitas dan pemerataan layanan.

Standar satuan pendidikan meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana prasarana, standar pembiayaan dan standar penilaian, sedangkan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik berupa kompetensi literasi dan kompetensi numerasi. Partisipasi dan pemerataan peserta didik berupa angka partisipasi kasar dan angka partisipasi sekolah, adapun untuk kualitas dan pemerataan layanan untuk pendidikan dasar baik pada sekolah dasar, sekolah menengah pertama maupun satuan pendidikan kesetaraan mencakup iklim keamanan, iklim kebinekaan dan inklusivitas, sedangkan untuk pendidikan anak usia dini merupakan proporsi jumlah satuan pendidikan anak usia dini merupakan proporsi jumlah satuan pendidikan anak usia dini yang mendapatkan akreditasi B.

#### **4.1.3. Realisasi**

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Pendidikan secara umum sudah bagus dan telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa indikator yang masih belum memenuhi target dan perlu adanya evaluasi. Realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) tersebut disajikan sebagaimana tabel berikut:



### Realisasi SPM Bidang Pelayanan Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Target	Realisasi	Indikator	Target	Realisasi	Ket	
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	35.698	35.698	Angka Partisipasi Sekolah	84,20%	84,28%		
					Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	84,50%	84,64		
					Tingkat Pertumbuhan Pendidik PAUD S1 dan DIV	93,75%	93,9		
					Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	03,39%	22,05%		
					Kecukupan formasi guru ASN	0	0		
					Indeks distribusi guru	0	0		
					Proporsi PTK bersertifika	65,23%	65,03%		
					Proporsi PTK penggerak	00,29%	00,29%		
					Pengalaman pelatihan guru	00,35%	00,51%		
					2	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD)	158.584	158.584
Angka partisipasi sekolah	99.75%	94.79%							
Angka partisipasi murni	94.5%	94.79%							
Kemampuan literasi	61,67	70.27							
Kemampuan numerasi	55	55.02							
Perbedaan skor literasi	0	0							
Perbedaan skor numerasi	0	0							
Indeks iklim keamanan	61,67	71,07							
Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	57,33%	63,57%							
Kecukupan formasi guru ASN	24,38%	27%							
Indeks distribusi guru	0,62%	0,85%							
Proporsi PTK bersertifikat	52,03%	90,95%							
Proporsi PTK penggerak	0,05%	0,07%							
Pengalaman pelatihan guru	45%	79,9%							
		Jumlah warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SMP)	56.548	56.548		Angka partisipasi kasar	100%	110,86%	
						Angka partisipasi sekolah	98,55%	98,95%	
						Angka partisipasi murni	86,5%	86,55%	
						Kemampuan literasi	70	77.86	
						Kemampuan numerasi	58	58,73	
						Perbedaan skor literasi	0	0	
						Perbedaan skor numerasi	0	0	
						Indeks iklim keamanan	66,9	66,93	
						Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	61%	61,04%	
						Kecukupan formasi guru ASN	0%	0%	
					Indeks distribusi guru	0%	0%		
					Proporsi PTK bersertifikat	52,03%	85,9%		
Proporsi PTK penggerak	0,10%	0,14%							
Pengalaman pelatihan guru	45%	57,9%							



3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7 - 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	1.650	1.650	Angka partisipasi kasar	0%	0%	
					Angka partisipasi sekolah	2,95%	2,95%	
					Angka partisipasi murni	0%	0%	
					Kemampuan literasi	33,65	47,63	
					Kemampuan numerasi	29,9	29,92	
					Perbedaan skor literasi	0	0	
					Perbedaan skor numerasi	0	0	
					Indeks iklim keamanan	60,29	61,81	
					Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	54,46	56,31	
					Kecukupan formasi guru ASN	0%	0%	
					Indeks distribusi guru	0%	0%	
					Proporsi PTK bersertifikat	0%	0%	
					Proporsi PTK penggerak	0%	0%	
					Pengalaman pelatihan guru	0%	0%	

Sumber : Data Dinas Pendidikan Kab. Lamongan, 2024 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan raelisasi pelayanan dasar bidang pendidikan kabupaten Lamongan pada tahun 2024 yaitu pada kurun waktu bulan Januari s/d Desember 2024 telah mencapai 100,00% artinya bahwa Indeks Indikator pencapaian .Standar Mutu Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan berada pada Tuntas Paripurna dan masih perlu peningkatan sampai menacapai 100%.

Realisasi untuk layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berdasarkan rapor pendidikan untuk mutu minimal pelayanan diantaranya Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 5 – 6 tahun adalah 84,28% dari target 84,20% artinya terealisasi 100% ditahun 2024. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B dengan target 84,50%, realisasi 84,64% dengan capaian 100%. Untuk mutu layanan pertumbuhan pendidikan PAUD di S1/D4 dengan target 93,75%, realisanya 93,90% dengan capaian 100%

Realisasi jenis mutu layanan Pendidikan Dasar untuk angka partisipasi kasar ditargetkan 100%, telah terealisasi 100,68% sehingga capaian 100%. Selanjutnya, Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 tahun dengan target 99,75% lelah terealisasi 99,99% ini artinya telah tercapai 100%. Beberapa kegiatan yang dapat mendukung peningkatan APS diantaranya melakukan pendataan terhadap warga negara usia 7 12



tahun yang tidak bersekolah, pemberian beasiswa bagi peserta didik dari keluarga miskin dan pemutakhiran data dapodik minimal 2 kali dalam 1 tahun. Angka partisipasi murni meraih capaian 94,79% melebihi target 94,5% dengan pencapaian sebesar 100%. Kemampuan literasi berdasarkan hasil asesmen nasional 70,27 lebih tinggi dari target yaitu 61,67 dengan hasil capaian 100%. Kemampuan numerasi target nilai 55, terealisasi dengan nilai 55,02 sehingga capaian 100% , beberapa kegiatan diantaranya adalah pemenuhan kebutuhan guru dengan pengajuan formasi ASN, pendistribusian tenaga guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, dan pelatihan guru yang berupa workshop, bimtek, diklat dan lain-lain. Indeks iklim keamanan dengan target nilai 61,67, terealisasi dengan nilai 71,07, sehingga capaian 100%. Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas dengan target tahun 2024 adalah 57,33%, terealisasi 63,65% sehingga hasil capaian 100%. Untuk kecukupan guru ASN memiliki target 24,38% dengan realisasi 27% atau telah tercapai 100%. Indeks distribusi guru tercapai 100% dengan target 0,62% dan terealisasi 0,85%. Pada proporsi PTK bersertifikat dan PTK penggerak tercapai 100% dan pengalaman pelatihan guru tercapai 100% dengan target 45% dan telah terealisasi 79,9%.

Pada tingkat SMP, realisasi angka partisipasi kasar dengan target 100%, terealisasi melebihi target yaitu 110,86%. Begitupula dengan angka partisipasi sekolah dan angka partisipasi murni tercapai 100%. Kemampuan literasi dan kemampuan numerasi tercapai 100% melebihi target. Indeks iklim keamanan dengan target nilai 66,9, realisasi 66,93, untuk capaian sebesar 100%. Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk dapat mencapai target adalah melakukan pengembangan regulasi dan program dalam memberikan perlindungan dan rasa aman secara fisik maupun psikologis melalui pencegahan perundungan, kekerasan seksual, narkoba, hukuman fisik, serta pembinaan dalam rangka pendidikan kesehatan. Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas, proporsi PTK bersertifikat, proporsi PTK penggerak dan pengalaman pelatihan guru terealisasi melebihi target atau dengan kata lain tercapai 100%.



Realisasi Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7 – 18 tahun yang berpartisipasi pada pendidikan kesetaraan dengan target 2,95%, realisasi capaian 2,95% ini artinya capaian 100%. Beberapa kegiatan yang dikerjakan untuk mencapai target yang sudah ditetapkan diantaranya adalah pendataan warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum berpartisipasi dalam pendidikan formal, Pemberian biaya pendidikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus (Beasiswa), Pemberian perlengkapan penunjang pembelajaran ke peserta didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus dan pemutakhiran data Dapodik minimal 2 kali dalam 1 tahun. Kemampuan literasi, kemampuan numerasi, indeks iklim keamanan, serta indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas secara keseluruhan tercapai 100% dengan realisasi melebihi target.

#### **4.1.4. Alokasi Anggaran**

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja operasional yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah. Dana tersebut dapat bersumber dari APBD, APBN, dan sumber dana lain yang sah. Penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah tentunya menjadi prioritas dalam penganggaran oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota. Penerapan dan pencapaian tersebut dapat didukung oleh alokasi penganggaran dalam APBN serta sumber dana lainnya yang sah. Hal tersebut memberi ruang kreativitas dan inovasi Pemerintah Daerah untuk menggali potensipembiayaan penerapan dan pencapaian SPM dari luar APBD-nya.

Alokasi anggaran program dan kegiatan dalam rangka penerapan dan pencapaian pelayanan dasar bidang pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



**Alokasi Anggaran SPM Bidang Pelayanan Pendidikan  
Kabupaten Lamongan Tahun 2024**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi Anggaran (Rp)			Jumlah (Rp)
		APBD Kab. (Rp)	APBD Prov.	APBN	
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	59.587.030.000	-	-	59.587.030.000
2	Pendidikan Dasar	188.347.897.400	-	-	188.347.897.400
3	Pendidikan Kesetaraan	7.514.830.000	-	-	7.514.830.000
	Jumlah	255.449.757.400	-	-	255.449.757.400

*Sumber : Data Dinas Pendidikan Kab. Lamongan, 2024 (diolah)*

Alokasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan penunjang dalam rangka penerapan dan pencapaian pelayanan dasar bidang Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Alokasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penunjang  
Pencapaian SPM Bidang Pendidikan  
Kabupaten Lamongan Tahun 2024**

No	Program Penunjang	Alokasi APBD (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	595.105.872.135
2	Program Pengelolaan Pendidikan	255.149.757.400
3	Program Pengembangan Kurikulum	30.000.000
4	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	300.000.000
	Jumlah	850.585.629.535

*Sumber : Data Dinas Pendidikan Kab. Lamongan, 2024 (diolah)*

**4.1.5. Realisasi Anggaran**

Pemerintah Kabupaten Lamongan memprioritaskan penganggaran dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan. Anggaran tersebut dikelola dalam rangkaian program, kegiatan dan sub Kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Pada Tahun Anggaran 2024 ini, Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan mengalokasikan anggaran sebesar Rp850.585.629.535 (delapan ratus lima puluh milyar lima ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas Rp255.449.757.400 (dua ratus lima puluh lima milyar empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) untuk penganggaran program dan kegiatan dalam rangka penerapan dan



pencapaian pelayanan dasar bidang pendidikan, dan Rp595.135.872.135 (lima ratus Sembilan puluh lima milyar seratus tiga puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus tiga puluh lima rupiah) untuk program dan kegiatan penunjang penerapan dan pencapaian pelayanan dasar bidang pendidikan.

Dari keseluruhan anggaran dimaksud, realisasi anggaran bulan Januari s/d Desember Tahun 2024 ini adalah sebesar Rp 772.821.846.932 (tujuh ratus tujuh puluh dua milyar delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas Rp255.449.757.400 (dua ratus lima puluh lima milyar empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) untuk penganggaran program dan kegiatan dalam rangka penerapan dan pencapaian pelayanan dasar bidang pendidikan, dan Rp526.915.857.217 (lima ratus dua puluh enam milyar sembilan ratus lima belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus yujuh belas rupiah) untuk program dan kegiatan penunjang penerapan dan pencapaian pelayanan dasar bidang pendidikan dimaksud.

Realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka penerapan dan pencapaian pelayanan dasar bidang pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini:

**Realisasi Anggaran SPM Bidang Pendidikan  
Kabupaten Lamongan Tahun 2024**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	59.587.030.000	59.204.633.700	99,36%
2	Pendidikan Dasar	188.047.897.400	180.559.113.015	96,21%
3	Pendidikan Kesetaraan	7.514.830.000	6.142.243.000	81,73%
	Jumlah	255.449.757.400	246.205.725.615	96,38%

*Sumber : Data Dinas Pendidikan Kab. Lamongan, 2024 (diolah)*

Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan penunjang dalam rangka penerapan dan pencapaian pelayanan dasar bidang pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2024 disajikan dalam tabel sebagai berikut:



**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2024**

No	Program Penunjang	Alokasi APBD (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	526.591.641.117
2	Program Pengelolaan Pendidikan	245.905.989.715
3	Program Pengembangan Kurikulum	24.480.200
4	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	299.735.900
	Jumlah	772.821.846.932

Sumber : Data Dinas Pendidikan Kab. Lamongan, 2024 (diolah)

**4.1.6. Dukungan Personil**

Dukungan personel dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Pendidikan berasal dari personel Dinas Pendidikan. Adapun rincian personel pada Dinas Pendidikan dimaksud disajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Dukungan Personel Pada Bidang Pelayanan Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2024**

No	Jabatan/ Eselon	Jumlah (Orang)
1	Eselon II.b	1
2	Eselon III.a	1
3	Eselon III.b	4
4	Eselon IV.a/ Jabatan Fungsional	11
6	Pejabat Fungsional	4
7	Staf PNS	30
8	Staf TTK	35
	Jumlah	96

Sumber : Laporan Kepegawaian 2024 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa hampir seluruh formasi jabatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan sudah terisi. Formasi jabatan yang telah terisi secara keseluruhan tersebut sangat menunjang kinerja instansi, dimana kerangka kebijakan strategis diambil oleh Kepala Dinas/ Eselon II.b, pada tataran taktis diarahkan oleh para Kepala Bidang/ Eselon III.b dan dikoordinasikan oleh Sekretaris/ Eselon III.a, sedangkan untuk tataran teknis operasional dilaksanakan oleh para Kasubbag dan Kasi/ Eselon IV.a beserta para Stafnya. Namun demikian, perludilakukan penambahan jumlah Staf yang berstatus PNS sehingga dapat menunjang kinerja dinas dimaksud dalam tataran operasional.



#### **4.1.7. Permasalahan dan Solusi**

Adapun berbagai permasalahan yang dihadapi dan solusi yang ditempuh oleh Dinas Pendidikan dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

##### **a. Kendala dan Permasalahan**

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Data anak tidak sekolah belum terintegrasi dengan dapodik sehingga terdapat ATS yang belum terdata;
2. Pengumpulan data belum optimal karena data dari Kemenag dan hanya berupa rekapitulasi, tidak dapat akses untuk melihat data personil berdasarkan usia dan alamat;
3. Belum semua admin dapodik mengupdate data tepat waktu dan tidak melakukan sinkronisasi, serta terdapat satuan pendidikan yang tidak aktif tapi tidak segera mengajukan penutupan sekolah;
4. Belum semua operator sekolah melakukan verifikasi dan validasi dapdik secara berkala;
5. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan belum sesuai standar;
6. Kualitas dan kuantitas guru belum memenuhi standar;
7. Belum meratanya kualitas pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan;
8. Sebagian anak usia sekolah dari keluarga miskin belum mendapatkan bantuan beasiswa dari Program Indonesia Pintar (PIP) karena belum masuk data base DTKS di pusat;
9. Lembaga pendidikan inklusi belum bisa melayani anak berkebutuhan khusus secara optimal karena keterbatasan pendidik/pendamping untuk anak berkebutuhan khusus.



## **b. Solusi**

Terkait dengan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan tersebut, solusi yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Kedepan pendataan harus berbasis desa/kelurahan yang terintegrasi ke dalam sistem pendataan secara nasional;
2. Perlu peningkatan koordinasi dengan kemenag untuk ketersediaan data yang valid dan akuntabel;
3. Perlunya peningkatan kapasitas admin dapodik di satuan pendidikan;
4. Sudah dilaksanakan desk verifikasi data pendidikan, namun hanya sebatas jenjang SD dan SMP Negeri dan Swasta;
5. Pemenuhan terhadap kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan termasuk untuk pembelajaran yang berbasis komputer secara bertahap;
6. Pemenuhan kebutuhan guru melalui penambahan CPNS maupun guru P3K serta peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan bimbingan teknis baik secara daring maupun luring;
7. Pemerataan kualitas pendidikan melalui peningkatan kompetensi guru secara bertahap
8. Pemberian beasiswa untuk anak – anak dari keluarga miskin;
9. Kerja sama dengan lembaga pendidikan luar biasa terdekat.

## **4.2. Urusan Kesehatan**

### **4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan terdiri atas sebagai berikut :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;



2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
4. Pelayanan Kesehatan Balita;
5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar;
6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif;
7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut;
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus;
10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat;
11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis;
12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

Fokus pelayanan yang diberikan bersifat peningkatan/*promotive* dan pencegahan/*preventif* mencakup peningkatan kesehatan, perlindungan spesifik, diagnosis dini dan pengobatan tepat, pencegahan kecacatan dan rehabilitasi.

#### **Pelayanan Dasar Bidang Pelayanan Kesehatan**

No	Jenis Layanan Dasar	Sasaran
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	15.323 Orang
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	14.804 Orang
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	14.547 Orang
4	Pelayanan Kesehatan Balita	59.805 Orang
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	146.650 Orang
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	766.889 Orang
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	205.722 Orang
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	337.496 Orang
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	23.148 Orang
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa	2.295 Orang
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	17.123 Orang
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	18.423 Orang

*Sumber : Data Dinas Kesehatan Kab. Lamongan, 2024 (diolah)*

#### **4.2.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah**

Target pencapaian SPM pada pelayanan bidang pelayanan kesehatan dikategorikan dalam target nasional dan target daerah. Target



Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh daerah tersebut disajikan sebagaimana tabel berikut:

**Target SPM Bidang Pelayanan Kesehatan  
Kabupaten Lamongan Tahun 2024**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Daerah (%)	Target Nasional (%)
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	Jumlah warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100
11	Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	Jumlah warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100
12	Pelayanan kesehatan orang berisiko terinfeksi HIV	Jumlah warga Negara dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100

*Sumber : Data Dinas Kesehatan Kab. Lamongan, 2024 (diolah)*

**4.2.3. Realisasi**

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Kesehatan secara umum sudah bagus dan telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Terdapat indikator yang masih belum memenuhi target dan perlu adanya evaluasi. Realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) tersebut disajikan sebagaimana tabel berikut:



### Realisasi SPM Bidang Pelayanan Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Target / Sasaran	Realisasi	Capaian (%)
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	15.323	14.796	96,56
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	14.804	14.804	100
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	14.547	14.586	100,27
4	Pelayanan kesehatan balita	59.805	59.880	100,13
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	146.650	146.856	100,14
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	766.889	770.545	100,48
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	205.722	206.196	100,23
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	337.496	337.826	100,10
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	23.148	23.311	100,70
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	2.295	2.535	110,46
11	Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	19.025	20.529	107,91
12	Pelayanan kesehatan orang berisiko terinfeksi HIV	18.423	21.182	114,98

Sumber : Data Dinas Kesehatan Kab. Lamongan, 2024 (diolah)

#### 4.2.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamongan Tahun 2024 dalam rangka penerapan pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan, adalah sebagai berikut:

#### Alokasi Anggaran SPM Bidang Pelayanan Kesehatan

No	Jenis Layanan Dasar	Sumber Dana	Pagu Anggaran (Rp)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	APBD, DAK Non Fisik	2.131.655.100
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	APBD, DAK Non Fisik	254.000.000
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	APBD	10.000.000
4	Pelayanan Kesehatan Balita	APBD, DAK Non Fisik	1.373.991.350
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	APBD, DAK Non Fisik	968.486.000
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	APBD, DAK Non Fisik	843.114.800
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	APBD, DAK Non Fisik	746.568.900
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	APBD	10.000.000
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	APBD	10.000.000



No	Jenis Layanan Dasar	Sumber Dana	Pagu Anggaran (Rp)
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	APBD, DAK Non Fisik	293.160.200
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Terduga Tuberkulosis (TB)	APBD, DAK Non Fisik	368.492.900
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	APBD, DAK Non Fisik	189.438.500
13	Pengadaan Bahan Habis Pakai	DAK Non Fisik	7.960.498.320
14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	DAK Non Fisik	15.015.346.000

Sumber : Data Dinas Kesehatan Kab. Lamongan, 2024 (diolah)

#### 4.2.5. Realisasi Anggaran

Adapun rincian realisasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Kesehatan dimaksud, disajikan dalam tabel berikut:

#### Realisasi Anggaran SPM Bidang Pelayanan Kesehatan

No	Indikator SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Prosentase Realisasi
1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	2.131.655.100	2,082,255,646	97,68 %
2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	254.000.000	33.570.000	13,22 %
3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	10.000.000	8.450.000	84,50 %
4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	1.373.991.350	1.308.370.510	95,22 %
5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	968.486.000	963.887.050	99,53 %
6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	843.114.800	826.436.570	98,02 %
7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	746.568.900	740.788.350	99,23 %
8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	10,000,000	9,519,000	95.,19 %
9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	10.000.000	7.650.000	76,50 %
10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	293.160.200	266.693.950	90,97 %
11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	368.492.900	356.065.950	96,63 %
12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	189.438.500	181.519.900	95,82 %
13	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	0	0%
14	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan	0	0	0%



No	Indikator SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Prosentase Realisasi
	akibat bencana dan/atau berpotensi bencana			
	<b>JUMLAH</b>	<b>7.198.907.750</b>	<b>6.785.206.926</b>	<b>94,25 %</b>

Sumber : Data Dinas Kesehatan Kab. Lamongan, 2024 (diolah)

#### 4.2.6. Dukungan Personil

Dukungan personil dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Kesehatan berasal dari personel Dinas Kesehatan. Adapun rincian personel pada Dinas Kesehatan dimaksud disajikan dalam tabel sebagai berikut:

#### Dukungan Personel Bidang Pelayanan Kesehatan Kabupaten Lamongan Tahun 2024

No	Spesifikasi	Jumlah
1	Dokter	145
2	Bidan	708
3	Perawat	1267
4	Kesehatan Masyarakat	25
5	Gizi	71
6	Analisis Teknik Lab. Medik	112
7	Dokter	145

Sumber : Data Dinas Kesehatan Kab. Lamongan, 2024 (diolah)

#### 4.2.7. Permasalahan dan Solusi

Berikut disampaikan permasalahan dan solusi untuk indikator SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024 yang tidak memenuhi target 100%, sebagai berikut:

#### Kendala, Permasalahan, dan Solusi Bidang Kesehatan Tahun 2024

No	Jenis Layanan Dasar	Capaian (%)	Permasalahan
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	96,56	Sasaran proyeksi dari Pusdatin lebih tinggi dari kondisi riil; Ada beberapa ibu hamil yg mengalami persalinan secara <i>premature</i> .
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100	
3	Pelayanan Kesehatan bayi Baru Lahir	100,27	
4	Pelayanan Kesehatan Balita	100,13	
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100,14	



No	Jenis Layanan Dasar	Capaian (%)	Permasalahan
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100,48	
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100,23	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100,10	
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	100,70	
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	110,46	
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Terduga Tuberkulosis (TB)	107,91	
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	114,98	

Sumber : Data Dinas Kesehatan Kab. Lamongan, 2024 (diolah)

### 4.3. Urusan Pekerjaan Umum

#### 4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

SPM pekerjaan umum mencakup SPM pekerjaan umum daerah provinsi dan SPM pekerjaan umum daerah kabupaten/kota. Jenis pelayanan dasar pada SPM pekerjaan umum daerah kabupaten/kota terdiri atas:

1. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

Tersedianya akses air bersih yang aman melalui sistem penyediaan air bersih melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari.

2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Tersedianya akses pengolahan air limbah domestik. Terdapat 2 jenis pelayanan yaitu:

- a. Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALD-S)
- b. Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T)

#### **Pelayanan Dasar Bidang Pelayanan Pekerjaan Umum Kabupaten Lamongan Tahun 2024**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	Setiap Warga Negara
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Setiap Warga Negara



#### 4.3.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian SPM pada pelayanan bidang pelayanan pekerjaan umum dikategorikan dalam target nasional dan target daerah. Indikator dan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh daerah tersebut disajikan sebagaimana tabel berikut:

#### Target SPM Bidang Pelayanan Pekerjaan Umum Kabupaten Lamongan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja / Jenis Pelayanan SPM		Indikator Pencapaian / Output
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		
	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	8.000
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
2	1. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Sambungan Rumah/SR	2.000
	2. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	Sambungan Rumah/SR	2.000
	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		
	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	600
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
	1. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga	250
	2. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga	150
	3. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga	150

Sumber : Data Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kab. Lamongan, 2024 (diolah)



#### 4.3.3. Realisasi

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Pekerjaan Umum secara umum sudah bagus dan telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa indikator yang masih belum memenuhi target dan perlu adanya evaluasi. Realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) tersebut disajikan sebagaimana tabel berikut:

**Realisasi SPM Bidang Pelayanan Pekerjaan Umum Kabupaten Lamongan Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja / Jenis Pelayanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Capaian
			Target	Realisasi	Selisih	
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					
	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	8.000	8.000	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					
	1. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Sambungan Rumah/SR	2.000	2.000	0	100%
	2. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	Sambungan Rumah/SR	2.000	2.000	0	100%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					
	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	600	600	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					
	1. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air	Rumah Tangga	250	275	-25	110%



No	Indikator Kinerja / Jenis Pelayanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Capaian
		Target	Realisasi	Selisih	
	limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)				

Sumber : Data Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kab. Lamongan, 2024 (diolah)

#### 4.3.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Pekerjaan Umum Kabupaten Lamongan Tahun 2024 sebesar Rp15.302.444.000 yang secara keseluruhan berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2024 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan. Dari keseluruhan dana dimaksud, untuk penerapan dan pencapaian SPM Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari dialokasikan anggaran dana sebesar Rp13.031.692.000 dan untuk Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik dialokasikan anggaran dana sebesar Rp2.270.752.000.

Adapun rincian alokasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Pekerjaan Umum dimaksud, disajikan dalam tabel berikut:

#### Alokasi Anggaran SPM Bidang Pelayanan Pekerjaan Umum Kabupaten Lamongan Tahun 2024

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	13,031,692,000
1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen 100,000,000
2	Supervisi pembangunan/peningkatan/ perluasan/perbaikan SPAM	Dokumen 25,000,000
3	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/ Detik 0
4	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR 754,830,000
5	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/ Detik 0
6	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	12,151,862,000
7	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	SR 0



No	Kegiatan/Sub Kegiatan		Alokasi Anggaran
8	Perbaiki SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		0
9	Pembinaan dan pengawasan terhadap tarif Air Minum		0
10	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri	Badan Usaha	0
11	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat	Kelompok Masyarakat	0
12	Fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM	Unit	0
13	Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM	Unit	0
14	Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM		0
15	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perkotaan	Unit	0
16	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perdesaan	Unit	0
17	Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Rumah Tangga	0
18	Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		0
19	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		0
20	Perbaiki SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Unit	0
21	Perbaiki SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Unit	0
<b>JUMLAH INDIKATOR</b>			<b>13,031,692,000</b>
<b>JUMLAH PROGRAM</b>			<b>13,031,692,000</b>
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>			<b>2,270,752,000</b>
2	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik</b>		<b>2,270,752,000</b>
1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	100,000,000
2	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Dokumen	0
3	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala Kota	Rumah Tangga	1,780,752,000
4	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Rumah Tangga	0
5	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Rumah Tangga	0
6	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Rumah Tangga	0
7	Pembinaan teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	30,000,000



No	Kegiatan/Sub Kegiatan		Alokasi Anggaran
8	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		0
9	Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit	0
10	Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		360,000,000
11	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman		0
12	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman	Orang	0
13	Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Unit	0
14	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Dokumen	0
15	Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT	Rumah Tangga	0
16	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	Rumah Tangga	0
17	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	Dokumen	0
JUMLAH INDIKATOR			2,270,752,000
JUMLAH PROGRAM			2,270,752,000

Sumber : Data Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kab. Lamongan, 2024 (diolah)

#### 4.3.5. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Pekerjaan Umum Kabupaten Lamongan Tahun 2024 sebesar Rp14.968.107.867. Dari keseluruhan anggaran dimaksud, untuk penerapan dan pencapaian SPM Pelayanan Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari terealisasi sebesar Rp12.748.894,.417 dan untuk Pelayanan Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik terealisasi sebesar Rp2.219.213.450.

Adapun rincian realisasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Pekerjaan Umum dimaksud, disajikan dalam tabel berikut:



**Realisasi Anggaran SPM Bidang Pelayanan Pekerjaan Umum  
Kabupaten Lamongan Tahun 2024**

No	Kegiatan/Sub Kegiatan		Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Prosentase Realisasi
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		13,031,692,000	12,748,894,417	97.83 %
1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen	100,000,000	99,740,000	99.74 %
2	Supervisi pembangunan/peningkatan/ perluasan/perbaikan SPAM	Dokumen	25,000,000	23,872,000	95.49 %
3	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/ Detik	0	0	0%
4	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR	754,830,000	733,292,251	97.15 %
5	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/ Detik	0	0	0%
6	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		12,151,862,000	11,891,990,166	97.86 %
7	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	SR	0	0	0%
8	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		0	0	0%
9	Pembinaan dan pengawasan terhadap tarif Air Minum		0	0	0%
10	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri	Badan Usaha	0	0	0%
11	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat	Kelompok Masyarakat	0	0	0%
12	Fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM	Unit	0	0	0%
13	Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM	Unit	0	0	0%
14	Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM		0	0	0%
15	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perkotaan	Unit	0	0	0%
16	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perdesaan	Unit	0	0	0%
17	Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Rumah Tangga	0	0	0%
18	Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		0	0	0%
19	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		0	0	0%
20	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Unit	0	0	0%
21	Perbaikan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Unit	0	0	0%
<b>JUMLAH INDIKATOR</b>			<b>13,031,692,000</b>	<b>12,748,894,417</b>	<b>97.83 %</b>
<b>JUMLAH PROGRAM</b>			<b>13,031,692,000</b>	<b>12,748,894,417</b>	<b>97.83 %</b>
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>			<b>2,270,752,000</b>	<b>2,219,213,450</b>	<b>97.73 %</b>
2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik		2,270,752,000	2,219,213,450	97.73 %
1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	100,000,000	99,583,000	99.58 %



No	Kegiatan/Sub Kegiatan		Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Prosentase Realisasi
2	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Dokumen	0	0	0%
3	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala Kota	Rumah Tangga	1,780,752,000	1,780,752,000	100.00 %
4	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
5	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Rumah Tangga	0	0	0%
6	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Rumah Tangga	0	0	0%
7	Pembinaan teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	30,000,000	29,931,100	99.77 %
8	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		0	0	0%
9	Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit	0	0	0%
10	Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		360,000,000	308,947,350	85.82 %
11	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman		0	0	0%
12	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman	Orang	0	0	0%
13	Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Unit	0	0	0%
14	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Dokumen	0	0	0%
15	Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT	Rumah Tangga	0	0	0%
16	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	Rumah Tangga	0	0	0%
17	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	Dokumen	0	0	0%
JUMLAH INDIKATOR			2,270,752,000	2,219,213,450	97.73 %
JUMLAH PROGRAM			2,270,752,000	2,219,213,450	97.73 %

Sumber : Data Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kab. Lamongan, 2024 (diolah)

#### 4.3.6. Dukungan Personil

Dukungan personel dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Pekerjaan Umum berasal dari personel Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya. Adapun rincian personel pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dimaksud disajikan dalam tabel sebagai berikut:



**Dukungan Personel Pada Bidang Pelayanan Pekerjaan Umum  
Kabupaten Lamongan Tahun 2024**

Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	
1. PNS	: 2 Orang
2. Non PNS	: 4 Orang
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	
1. PNS	: 4 Orang
2. Non PNS	: 11 Orang

Sumber : Data Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kab. Lamongan, 2024 (diolah)

**4.3.7. Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari
  - a. Tingkat pelayanan air minum yang masih rendah
  - b. Kurangnya kuantitas / ketersediaan air baku
  - c. Terkendala oleh cuaca yang tidak menentu terutama pada saat curah hujan tinggi lokasi yang berada di wilayah yang rawan banjir menjadi terganggu karena beberapa lokasi pekerjaan ada yang terendam banjir
  - d. Membutuhkan teknologi untuk proses pengolahan air yang layak minum
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik
  - a. Terkendalanya sarana dan prasarana dalam pengolahan limbah
  - b. Kurangnya keahlian SDM mengenai pengolahan limbah
  - c. Belum terlaksananya pemeliharaan IPAL komunal yang sudah terbangun
  - d. Pengelolaan air limbah domestik belum optimal

Terkait dengan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Pekerjaan Umum tersebut, solusi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari
  - a. Meningkatkan pelayanan air minum di seluruh wilayah Lamongan dengan mengoptimalkan kerja sama dengan pihak ketiga;



- b. Digunakan teknik pendugaan air bawah tanah (geo listrik) dengan biaya diambilkan dari pagu masing-masing desa. Namun hal ini tidak dapat berhasil 100% dikarenakan ada beberapa lokasi desa yang memiliki air bawah tanah asin/ payau, keadaan asin/ payau tersebut tidak mampu dideteksi oleh alat geo listrik;
  - c. Berkoordinasi dengan OPD terkait mengenai keberadaan air permukaan berupa waduk/ embung sebagai sumber air baku;
  - d. Meningkatkan pengetahuan / teknologi untuk pengolahan air minum agar sesuai standar.
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik
- a. Peningkatan sarana dan sarana pada IPLT
  - b. Peningkatan SDM dengan pembekalan teknis pengolahan limbah
  - c. Sosialisasi ke masyarakat mengenai pengolahan air limbah domestik
  - d. Memelihara dan mengoptimalkan operasional IPAL komunal yang sudah ada

#### **4.4. Urusan Perumahan Rakyat**

##### **4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar**

SPM perumahan rakyat mencakup SPM perumahan rakyat daerah provinsi dan SPM perumahan rakyat daerah kabupaten/kota. Jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat daerah kabupaten/kota terdiri atas:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota;
2. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar yaitu warga negara dengan ketentuan:

1. Korban bencana kabupaten/kota yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;



2. Masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

### **Pelayanan Dasar Bidang Pelayanan Perumahan Rakyat Kabupaten Lamongan Tahun 2024**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Korban bencana kabupaten
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/ kota	Masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten

*Sumber : Data Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kab. Lamongan, 2024 (diolah)*

#### **4.4.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah**

Target pencapaian SPM pada pelayanan Bidang Pelayanan Perumahan Rakyat dikategorikan dalam target nasional dan target daerah. Indikator dan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh daerah tersebut disajikan sebagaimana tabel berikut:

#### **Target SPM Bidang Pelayanan Perumahan Rakyat Kabupaten Lamongan Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja / Jenis Pelayanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output
			Target
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		
	Jumlah yang Harus Dilayani	Rumah	15
2	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
	1. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah	15
	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		
	Jumlah yang Harus Dilayani	Rumah	15



No	Indikator Kinerja / Jenis Pelayanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output
			Target
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
	1. Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Rumah	15

Sumber : Data Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kab. Lamongan, 2024 (diolah)

#### 4.4.3. Realisasi

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Perumahan Rakyat secara umum sudah bagus dan telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa indikator yang masih belum memenuhi target dan perlu adanya evaluasi. Realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) tersebut disajikan sebagaimana tabel berikut:

#### Realisasi SPM Bidang Pelayanan Perumahan Rakyat Kabupaten Lamongan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja / Jenis Pelayanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Capaian
			Target	Realisasi	Selisih	
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					
	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	8.000	8.000	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					
	1. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Sambungan Rumah/SR	2.000	2.000	0	100%
	2. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	Sambungan Rumah/SR	2.000	2.000	0	100%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik					



No	Indikator Kinerja / Jenis Pelayanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Capaian
			Target	Realisasi	Selisih	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					
	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	600	600	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					
	1. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga	250	275	-25	110%

Sumber : Data Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kab. Lamongan, 2024 (diolah)

#### 4.4.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Perumahan Rakyat Kabupaten Lamongan Tahun 2024 sebesar Rp300.000.000 yang secara keseluruhan berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2024 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan. Dari keseluruhan dana dimaksud, untuk penerapan dan pencapaian SPM pelayanan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota dialokasikan anggaran dana sebesar Rp250.000.000 dan untuk Pelayanan Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah dialokasikan sebesar Rp50.000.000.

Adapun rincian alokasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Perumahan Rakyat dimaksud, disajikan dalam tabel berikut:



**Alokasi Anggaran SPM Bidang Pelayanan Perumahan Rakyat  
Kabupaten Lamongan Tahun 2024**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal			Sumber Anggaran
		Indikator	Target	Alokasi Anggaran	
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah yang harus dilayani	15 Rumah	250.000.000	APBD
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah yang harus dilayani	15 Rumah	50.000.000	APBD

Sumber : Data Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kab. Lamongan, 2024 (diolah)

**4.4.5. Realisasi Anggaran**

Realisasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Perumahan Rakyat Kabupaten Lamongan Tahun 2024 sebesar Rp. 416.442.000,00. Dari keseluruhan dana dimaksud, untuk penerapan dan pencapaian SPM Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota terealisasi sebesar Rp. 371.940.500,00; dan untuk Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota terealisasi sebesar Rp. 44.501.500,00.

Adapun rincian realisasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Perumahan Rakyat dimaksud, disajikan dalam tabel berikut:

**Realisasi Anggaran SPM Bidang Pelayanan Perumahan Rakyat**

No	Indikator SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Prosentase Realisasi
A	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota			
1.	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Rp50.000.000	Rp49.858.000	99,72%
B	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota			



1.	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Rp200.000.000	Rp199.902.000	99,95%
Jumlah		Rp. 250.000.000	Rp249.760.000	99,90%

Sumber : Data Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kab. Lamongan, 2024 (diolah)

#### 4.4.6. Dukungan Personil

Dukungan personil dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Perumahan Rakyat berasal dari personil Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya sebanyak 2 orang PNS dan 4 (empat) orang TTK.

#### 4.4.7. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan & Rehabilitasi Rumah Yg Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota
  - a. Belum tersedianya data rumah yang menjadi korban bencana
  - b. Belum adanya Surat Keputusan Bupati tentang Relokasi Korban Bencana Alam
  - c. Belum tersedianya kriteria penerima bantuan
  - d. Belum tersedianya SOP penanganan rumah korban bencana
  - e. Belum tersedianya anggaran yang spesifik untuk korban bencana
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota
  - a. Belum tersedianya data rumah yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota



- b. Belum adanya Surat Keputusan Bupati tentang Relokasi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota
- c. Belum tersedianya kriteria penerima bantuan
- d. Belum tersedianya SOP penanganan rumah masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota
- e. Belum tersedianya anggaran yang spesifik untuk masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota

Terkait dengan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Pekerjaan Umum tersebut, solusi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota
  - a. Pendataan rumah korban bencana
  - b. Koordinasi dengan dinas dan desa/ kecamatan terkait
  - c. Membuat Surat Keputusan Bupati tentang Relokasi Korban Bencana Alam
  - d. Menyusun Surat Keputusan yang berisi kriteria penerima bantuan
  - e. Menyusun SOP penanganan rumah korban bencana
  - f. Mengusulkan anggaran untuk mengantisipasi penanganan rumah korban bencana
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota
  - a. Pendataan rumah masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota
  - b. Koordinasi dengan dinas dan desa/ kecamatan terkait
  - c. Membuat Surat Keputusan Bupati tentang Relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota



- d. Menyusun Surat Keputusan yang berisi kriteria penerima bantuan
- e. Menyusun SOP penanganan rumah masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota
- f. Mengusulkan anggaran untuk mengantisipasi penanganan rumah masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota.

#### **4.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat**

##### **4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar**

SPM Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat mencakup SPM ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat daerah provinsi dan SPM ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat daerah kabupaten/kota.

##### **Satpol PP**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, SPM Bidang Trantibumlinmas jenis pelayanan dasarnya adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran

##### **BPBD**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka jenis pelayanan dasar yang diampu BPBD yaitu :

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana;
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.



#### 4.5.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target SPM pada pelayanan Bidang Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat dikategorikan dalam target nasional dan target daerah. Indikator dan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh daerah tersebut disajikan sebagaimana tabel berikut:

#### Target SPM Bidang Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lamongan Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian
<b>Satpol PP</b>			
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda	100% 160 Orang
2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100% 50 Orang
<b>BPBD</b>			
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	558.635 Orang
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	280.761 Warga
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	6.607 Korban

Sumber : Data BPBD Kab. Lamongan, 2024 (diolah)

#### 4.5.3. Realisasi

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat secara umum sudah bagus dan telah memenuhi target yang telah ditetapkan.



## Realisasi SPM Bidang Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lamongan Tahun 2024

### Satpol PP

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda	100% 160 Orang	100% 160 Orang
2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100% 50 Orang	100% 229 Orang

Sumber : Data BBD Kab. Lamongan, 2024 (diolah)

### BPBD

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	KATEGORI PENCAPAIAN KEBENCANAAN				100,00%
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)				100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00%
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :	558.635 Warga	558.635 Warga	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20,00%
	B. Jumlah Mutu Barang/ Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100,00%
	1.Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	1 Dokumen KRB	1 Dokumen KRB	0	100,00%
	2.Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	558.635 Warga	558.635 Warga	0	100,00%
	3.Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	97.722 Warga	97.722 Warga	0	100,00%



	4. Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana.	200 Rambu	200 Rambu	0	100,00%
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)				100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	280761 Warga	280761 Warga	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20,00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100,00%
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, .... dll)	81	81	0	100,00%
	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub- urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	43	43	0	100,00%
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)				100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00%
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :	6607 Warga	6607 Warga	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20,00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100,00%
	1. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi system komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	1 Posko	1 Posko	0	100,00%
	2. Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan	1 Dokumen	1 Dokumen	0	100,00%



	penetapan status darurat bencana)				
	3. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	6607 Warga	6607 Warga	0	100,00%
	4. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	99 Kejadian	100 Kejadian	0	101,00%

Sumber : Data BBD Kab. Lamongan, 2024 (diolah)

#### 4.5.4. Alokasi Anggaran

Adapun rincian alokasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat dimaksud, disajikan dalam tabel berikut:

#### Alokasi Anggaran SPM Bidang Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

##### Satpol PP

No	Prog	Keg	Sub Kegiatan	Target (Rp)	Sumber Dana
1			Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 6.611.492.950,00	
			Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 643.846.850,00	
			Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 50.000.000,00	APBD
			Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 178.000.000,00	APBD
			Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 100.000.000,00	APBD
			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 111.284.000,00	APBD
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Rp 187.062.850,00	APBD
			Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 15.000.000,00	APBD



No	Prog	Keg	Sub Kegiatan	Target (Rp)	Sumber Dana
			Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Rp 2.500.000,00	APBD
			Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Rp 5.967.646.100,00	
			Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Rp 4.625.647.600,00	DBHCH T
			Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Rp 128.000.000,00	APBD
			Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	Rp 1.213.998.500,00	DBHCH T
2			Program Penanggulangan Kebakaran	Rp 227.862.050,00	
			Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 127.000.000,00	
			Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 17.000.000,00	APBD
			Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 20.000.000,00	APBD
			Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Rp 90.000.000,00	APBD
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Rp 100.862.050,00	
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Rp 100.862.050,00	APBD
3			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 50.014.947,00	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 50.014.947,00	
			Pengadaan Mebel	Rp 20.014.947,00	APBD
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 30.000.000,00	APBD

Sumber : Data Dinas Satpol PP Kab. Lamongan, 2024 (diolah)

### **BPBD**

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (RP)
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	408.920.000
	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota	90.000.000
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	318.920.000
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	528.555.100
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	110.000.000



No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (RP)
	Penyusunan Rencana Kontijensi	-
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	-
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	52.860.100
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	-
	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	34.400.000
	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	-
	Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana	231.295.000
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	919.154.450
	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	884.154.450
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	20.000.000
	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	-
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	15.000.000
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	234.920.000
	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	70.000.000
	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	14.920,000
	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	150.000.000

Sumber : Data BBD Kab. Lamongan, 2024 (diolah)

#### 4.5.5. Realisasi Anggaran

Adapun rincian realisasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat dimaksud, disajikan dalam tabel berikut:



**Realisasi Anggaran SPM Bidang Pelayanan Ketenteraman,  
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat  
Kabupaten Lamongan Tahun 2024**

**Satpol PP**

No	Prog	Keg	Sub Keg	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Sumber Dana
1			Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 6.611.492.950,00	Rp 5.752.995.823,00	87,02%	
			Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 643.846.850,00	Rp 556.726.650,00	86,47%	
			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 50.000.000,00	Rp 13.558.000,00	27,12%	APBD
			Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 178.000.000,00	Rp 143.104.000,00	80,40%	APBD
			Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 100.000.000,00	Rp 99.320.000,00	99,32%	APBD
			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 111.284.000,00	Rp 110.984.800,00	99,73%	APBD
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Rp 187.062.850,00	Rp 178.039.850,00	95,18%	APBD
			Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 15.000.000,00	Rp 11.720.000,00	78,13%	APBD
			Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Rp 2.500.000,00	-	0%	
			Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Rp 5.967.646.100,00	Rp 5.196.269.173,00	87,07%	
			Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Rp 4.625.647.600,00	Rp 4.146.571.352,00	89,64%	DBHCH T
			Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Rp 128.000.000,00	Rp 125.332.000,00	97,92%	APBD



No	Prog	Keg	Sub Keg	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Sumber Dana
			Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	Rp 1.213.998.500,00	Rp 924.365.821,00	76,14%	DBHCH T
2	Program Penanggulangan Kebakaran			Rp 227.862.050,00	Rp 192.288.750,00	84,39%	
			Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 127.000.000,00	Rp 113.267.000,00	89,19%	
			Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 17.000.000,00	Rp 5.827.000,00	34,28%	APBD
			Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 20.000.000,00	Rp 20.000.000,00	100%	APBD
			Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Rp 90.000.000,00	Rp 87.440.000,00	97,16%	APBD
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Rp 100.862.050,00	Rp 79.021.750,00	78,35%	
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Rp 100.862.050,00	Rp 79.021.750,00	78,35%	APBD
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			Rp 50.014.947,00	Rp 49.640.000,00	99,25%	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 50.014.947,00	Rp 49.640.000,00	99,25%	
			Pengadaan Mebel	Rp 20.014.947,00	Rp 19.840.000,00	99,13%	APBD
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 30.000.000,00	Rp 29.800.000,00	99,33%	APBD

Sumber : Data Dinas Satpol PP Kab. Lamongan, 2024 (diolah)

### **BPBD**

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	408.920.000	408.198.600
	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota	90.000.000	-
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	318.920.000	318.821.400
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	528.555.100	467.628.800
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	110.000.000	99.027.200
	Penyusunan Rencana Kontijensi	-	-



No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000	99.621.700
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	-	-
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	52.860.100	8.722.000
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	-	-
	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	34.400.000	29.825.400
	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	-	-
	Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana	231.295.000	230.432.500
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	919.154.450	895.086.250
	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	884.154.450	864.410.250
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	20.000.000	19.351.000
	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	-	-
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	15.000.000	11.325.000
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	234.920.000	205.977.900
	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	70.000.000	44.448.000
	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	14.920,000	11.529.900
	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	150.000.000	150.000.000

Sumber : Data BBD Kab. Lamongan, 2024 (diolah)

#### 4.5.6. Dukungan Personil

Dukungan personel dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat berasal dari personel Satuan Polisi Pamong Praja sejumlah 20 (dua puluh) orang Pejabat Eselon dan 201 orang Staf serta pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sejumlah 10 (sepuluh) orang PNS dan 23 (dua puluh tiga) orang TKK.

#### 4.5.7. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:



### **Satpol PP**

Adapun permasalahan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan dalam penerapan dan pencapaian SPM Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pada tahapan pengumpulan data masih ada data yang belum terkelola dengan baik oleh bidang;
2. Kurang optimalnya anggaran untuk menunjang penerapan dan pencapaian SPM pada program maupun kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan;
3. Masih kurangnya sosialisasi maupun bimbingan teknis terkait pengisian format isian pada tahapan penerapan SPM;
4. Perlu adanya revisi Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 menyesuaikan perubahan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

### **BPBD**

Adapun permasalahan yang dihadapi BPBD Kabupaten Lamongan dalam penerapan dan pencapaian SPM Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Belum adanya Rencana Kontijensi bencana Banjir, Longsor, Angin Puting Beliung dan Kekeringan;
2. Kurangnya Koordinasi antara forum relawan di kabupaten Lamongan sebagai penunjang penanganan darurat bencana;
3. Terbatasnya sosialisasi untuk opd, terkait dengan SPM;
4. Masih kurangnya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat di daerah rawan bencana dalam penanganan bencana;
5. Belum optimalnya pelatihan secara khusus di adakan di sekolah rawan bencana;
6. Kurang ketertiban dalam inventarisasi di gudang;



7. Terbatasnya alokasi pendanaan untuk pemulihan dan penataan kembali kerusakan akibat bencana baik dibidang fisik maupun non fisik;
8. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antar pemangku kepentingan di bidang teknis atau yg berkaitan dengan kebencanaan;
9. Belum adanya kajian menyeluruh kebutuhan pasca bencana sehingga kurang informasi dalam perencanaan;
10. Terbatasnya kegiatan di bidang RR dengan mengacu pada permendagri Nomor 101 tentang SPM.

Solusi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

#### **Satpol PP**

Adapun solusi yang dalam meyelesaikan permasalahan diatas, adalah sebagi berikut :

1. Adanya perbaikan sistem pelaporan dari masing-masing bidang selaku pelaksana kegiatan ketentraman dan ketertiban umum dalam upaya penegakan perda
2. Adanya dukungan anggaran dari pemerintah daerah, sebagai upaya terwujudnya pelaksanaan kegiatan
3. Mengupayakan sosialisasi maupun bimbingan teknis pengisian format isi tahapan penerapan SPM sesuai dengan aturan yang berlaku.

#### **BPBD**

Adapun solusi yang harus dihadapi atas permasalahan diatas, adalah sebagi berikut:

1. Perlu adanya rencana kontijensi bencana banjir, longsor, angin puting beliung dan kekeringan;
2. Perlu diadakan pelatihan relawan sebagai koordinasi;
3. Perlu diadakan pelatihan desa tangguh lebih banyak lagi;
4. Perlu diadakan khusus untuk sekolah di wilayah rawan bencana;



5. Perlu diadakan pelatihan penanganan darurat khusus anggota Tim TRC;
6. Perlu diadakan pelatihan untuk petugas gudang;
7. Perlunya peningkatan alokasi anggaran untuk pemulihan dan penata kembali kerusakan akibat bencana;
8. Perlunya rapat koordinasi dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan;
9. Sedang di susunnya dokumen penyusunan kajian kebutuhan pasca bencana;
10. Review Permendagri 101 tentang SPM.

#### 4.6. Urusan Sosial

##### 4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar dalam rangka penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2024 berpedoman pada peraturan yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pada pasal 10 ayat (2) jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Sosial tersebut meliputi :

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota

#### **Pelayanan Dasar Bidang Pelayanan Sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2024**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti	Penyandang disabilitas terlantar
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti	Anak terlantar
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti	Lanjut usia terlantar



4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti	Gelandangan dan Pengemis
5.	Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Korban bencana kabupaten

Sumber : Data Dinas Sosial Kab. Lamongan, 2024 (diolah)

#### 4.6.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian SPM pada pelayanan bidang pelayanan sosial dikategorikan dalam target nasional dan target daerah. Indikator dan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh daerah tersebut disajikan sebagaimana tabel berikut:

#### Target SPM Bidang Pelayanan Sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2024

No	Indikator SPM	Target Daerah
A.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti	
1.	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %
B.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti	
1.	Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %
C.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti	
1.	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %
D.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti	
1.	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100 %
E.	Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
1.	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/ kota yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kab/ kota	

Sumber : Data Dinas Sosial Kab. Lamongan, 2024 (diolah)

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018, standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis tersebut berupa pelayanan data dan



pengaduan, kedaruratan, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Layanan data merupakan layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis untuk diusulkan masuk dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu. Layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau Pusat kesejahteraan sosial mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Layanan kedaruratan merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial kabupaten/kota dan/atau Pusat kesejahteraan sosial kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Adapun layanan pemenuhan kebutuhan dasar meliputi: permakanaan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari; sandang; alat bantu; perbekalan kesehatan; bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis; bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan dan pengemis, serta masyarakat; fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak; akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar; penelusuran keluarga; reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial; dan rujukan.

Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh korban bencana daerah kabupaten/ kota pada saat tanggap darurat bencana merupakan kebutuhan dasar berupa permakanaan, sandang, tempat penampungan pengungsi, penanganan khusus bagi kelompok rentan, dan dukungan psikososial. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Korban Bencana daerah kabupaten/ kota setelah tanggap darurat bencana merupakan kebutuhan dasar berupa penanganan khusus bagi kelompok rentan, dan dukungan



psikososial. Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan dan pengemis, serta korban bencana tersebut disesuaikan dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen/penilaian dari pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, atau relawan sosial yang berada di bawah naungan Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.

#### 4.6.3. Realisasi

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Sosial secara umum sudah bagus dan telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa indikator yang masih belum memenuhi target dan perlu adanya evaluasi. Realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) tersebut disajikan sebagaimana tabel berikut:

**Realisasi SPM Bidang Pelayanan Sosial  
Kabupaten Lamongan Tahun 2024**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Semester II	Realisasi Semester II	Keterangan
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	<p>Formulasi perhitungan:</p> $\text{Realisasi} = \frac{\text{Disabilitas penerima rehab}}{\text{Disabilitas target keseluruhan}}$ <p>Realisasi jumlah penyandang disabilitas yang menerima rehabilitasi sosial di luar panti pada Tahun 2024 sejumlah 2.478 orang. Keseluruhan jumlah PPKS tersebut meliputi penerima layanan DTKS disabilitas lansia sebanyak 43 orang, DTKS disabilitas dewasa sebanyak 1.699 orang, program ASDP (tugas pembantuan provinsi) sejumlah 186 orang, alat bantu Disabel (Balai Besar Kartini Kemensos) sejumlah 110 orang meliputi alat bantu dengar sebanyak 9 orang, jahit sebanyak 3 orang, pijat sebanyak 2 orang, jual pulsa sebanyak 1 orang, kursi roda sebanyak 76 orang, TPA (Tongkat Penuntun Adaptif) sebanyak 10 orang, ABD kaki palsu sebanyak 9 orang, alat bantu Disabel (Pemprov Jawa Timur) sejumlah 71 orang meliputi alat bantu kursi roda sebanyak 64 orang, kruk</p>



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Semester II	Realisasi Semester II	Keterangan
					sebanyak 2 orang, memijat sebanyak 3 orang, menjahit 2 orang, bantuan kewirausahaan bagi disabilitas (Sentra Terpadu Kartini) sebanyak 10 orang, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup layak bagi disabilitas DTKS (Sentra Terpadu Kartini), alat bantu disabilitas (Pemerintah Kabupaten Lamongan) sejumlah 30 orang meliputi kursi roda sebanyak 5 orang, bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial sebanyak 10 orang, bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan sebanyak 15 orang, fasilitasi pembuatan NIK, Akta Kelahiran, surat nikah dan KIA. Jumlah Disabilitas target keseluruhan pada semester II 2024 sejumlah 2.478 orang.

Sumber : Data Dinas Sosial Kab. Lamongan, 2024 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa secara keseluruhan realisasi Pelayanan Dasar Bidang Sosial Kabupaten Lamongan pada Semester II Tahun 2024, yaitu pada kurun waktu bulan Januari s/d Desember telah mencapai 100%. Artinya, realisasi jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Lamongan yang mendapatkan rehabilitasi sosial pada Tahun 2024 adalah sejumlah 36.662 orang. Jenis Pelayanan Dasar dengan jumlah PMKS paling banyak adalah Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti adalah sebanyak 13.897 orang atau sebesar 100%, sedangkan Jenis Pelayanan Dasar dengan jumlah PMKS paling sedikit adalah Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti yaitu sebanyak 86 orang atau sebesar 100%. Adapun Jenis Pelayanan Dasar lainnya, yaitu Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti yaitu sebanyak 4.024 orang atau sebesar 100%, Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti adalah sebanyak 10.017 orang atau sebesar 100%, dan Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi



korban bencana kabupaten/ kota adalah sebanyak 8.638 orang atau sebesar 100%.

#### 4.6.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah. Dana tersebut dapat bersumber dari APBD, APBN, dan Sumber dana lain yang sah. Penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah tentunya menjadi prioritas dalam penganggaran oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota. Penerapan dan pencapaian tersebut dapat didukung oleh alokasi penganggaran dalam APBN serta Sumber Dana Lainnya yang Sah. Hal tersebut memberi ruang kreativitas dan inovasi Pemerintah Daerah untuk menggali potensi pembiayaan penerapan dan pencapaian SPM dari luar APBD-nya.

Alokasi anggaran program dan kegiatan dalam rangka penerapan dan pencapaian pelayanan dasar bidang sosial Kabupaten Lamongan Semester II Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

#### Alokasi Anggaran SPM Bidang Pelayanan Sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi Anggaran (Rp)			
		APBD Kab.	APBN	Lainnya	Jumlah
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;	319.067.000	-	-	319.067.000
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;	78.671.000	-	-	78.671.000
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;	164.334.000	-	-	164.334.000
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;	3.928.000	-	-	3.928.000
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota.	290.000.000	-	-	290.000.000
	<b>Jumlah</b>	<b>856.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>856.000.000</b>

Sumber : Data Dinas Sosial Kab. Lamongan, 2024 (diolah)



Kabupaten Lamongan menjadikan prioritas penganggaran guna penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial. Anggaran tersebut dikelola dalam rangkaian program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Lamongan. Pada Tahun Anggaran 2024, alokasi anggaran dalam rangka pencapaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Lamongan adalah sebesar Rp 11.192.262.000,- (sebelas milyar seratus Sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas alokasi APBD Kabupaten Lamongan sebesar Rp 663.400.000,- (enam ratus enam puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan alokasi APBN Pusat sebesar Rp 10.528.862.000,- (sepuluh milyar lima ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah). Keseluruhan alokasi anggaran tersebut dikelola melalui Dinas Sosial Kabupaten Lamongan untuk penganggaran program dan kegiatan dalam rangka penerapan dan pencapaian pelayanan dasar bidang sosial.

Alokasi anggaran program dan kegiatan penunjang dalam rangka penerapan dan pencapaian pelayanan dasar bidang sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Alokasi Anggaran Program dan Kegiatan Penunjang  
Pencapaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2024**

No	Kegiatan Penunjang	Alokasi APBD (Rp)
1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	20.814.464.100
2	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	30.000.000
3	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.957.831.250
	<b>Jumlah</b>	<b>22.802.295.350</b>

Sumber : Data Dinas Sosial Kab. Lamongan, 2024 (diolah)

Pemerintah Kabupaten Lamongan juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 22.802.295.350,- (dua puluh dua milyar delapan ratus dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) untuk program dan kegiatan penunjang penerapan dan pencapaian pelayanan dasar bidang sosial. Alokasi anggaran tersebut terdiri atas alokasi untuk



program dan kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 20.814.464.100 (Dua puluh milyar delapan ratus empat belas juta empat ratus enam puluh empat ribu serratus rupiah), Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), dan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 1.957.831.250,- (Satu milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).

#### 4.6.5. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran program dan kegiatan dalam rangka penerapan dan pencapaian pelayanan dasar bidang sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2024 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

#### Realisasi Anggaran SPM Bidang Pelayanan Sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Realisasi Anggaran (Rp)			
		APBD Kab.	APBN	Lainnya	Jumlah
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;	90.306.500	-	-	90.306.500
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;	194.750.000	-	-	194.750.000
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;	189.800.000	-	-	189.800.000
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;	75.680.000	-	-	75.680.000
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota.	91.827.300	-	-	91.827.300
	<b>Jumlah</b>	<b>642.363.800</b>	-	-	<b>642.363.800</b>

Sumber : Data Dinas Sosial Kab. Lamongan, 2024 (diolah)



Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan penunjang dalam rangka penerapan dan pencapaian pelayanan dasar bidang sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2024 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2024**

No	Kegiatan Penunjang	Alokasi APBD (Rp)
1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	12.010.254.987
2	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	11.445.600
3	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.778.064.740
	Jumlah	13.799.765.327

Sumber : Data Dinas Sosial Kab. Lamongan, 2024 (diolah)

**4.6.6. Dukungan Personil**

Dukungan personel dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Pendidikan berasal dari personel Dinas Pendidikan. Adapun rincian personel pada Dinas Pendidikan dimaksud disajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Dukungan Personel Pada Bidang Pelayanan Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2024**

No	Jabatan/ Eselon	Jumlah (orang)
1	Eselon II.b	1
2	Eselon III.a	1
3	Eselon III.b	4
4	Eselon IV.a	3
6	Pejabat Fungsional	10
7	Staf PNS	5
8	TKK	23
	Jumlah	49

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa hampir seluruh formasi jabatan pada Dinas Sosial Kabupaten Lamongan sudah terisi. Formasi jabatan yang telah terisi secara keseluruhan tersebut sangat menunjang kinerja instansi, dimana kerangka kebijakan strategis diambil oleh Kepala Badan/ Eselon II.b, pada tataran taktis diarahkan oleh para



Kepala Bidang/ Eselon III.b dan dikoordinasikan oleh Sekretaris/ Eselon III.a, dan tataran teknis operasional dilaksanakan oleh para Kasubbag / Eselon IV.a, Pejabat Fungsional dan para Staf. Namun demikian, perlu dilakukan penambahan jumlah Staf sehingga dapat menunjang kinerja dinas dimaksud dalam tataran operasional.

#### 4.6.7. Permasalahan dan Solusi

Adapun berbagai kendala, permasalahan yang dihadapi dan solusi yang ditempuh oleh Dinas Sosial dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

##### a. Kendala dan Permasalahan

Kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial adalah sebagai berikut :

#### Kendala dan permasalahan SPM Bidang Sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2024

No	Aspek	Permasalahan
1	Pengumpulan Data	Data dimiliki oleh masing-masing operator program dan kegiatan pada masing-masing bidang, sehingga perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi yang baik
2	Perhitungan Kebutuhan	Perhitungan kebutuhan untuk pemenuhan pelayanan dasar Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti relatif susah dilakukan, karena umumnya gepeng dan pengemis hidup tidak menetap (berpindah-pindah)
3.	Perencanaan dan Penganggaran	Keterbatasan dukungan dana dan fasilitas
4.	Pelaksanaan	1). Sarana dan Prasarana LIPOSOS belum memadai 2). Fasilitas penyelenggaraan panti sosial untuk kegiatan usaha produktif belum tercukupi Santunan Anak Terlantar, Lanjut Usia, Penyandang Cacat, Tuna Sosial, Gelandangan, Pengemis dan Bekas Narapidana belum memadai Fasilitasi peningkatan pengetahuan dan keterampilan kepada tokoh masyarakat, LSM dan PPKS yang berpotensi melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan masih terbatas



No	Aspek	Permasalahan
		Pemberian bantuan penanggulangan bencana masih belum optimal Sarana dan prasarana pemberdayaan generasi muda masih belum memadai
5.	Lainnya	-

*Sumber : Data Dinas Sosial Kab. Lamongan, 2024 (diolah)*

### b. Solusi

Terkait dengan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial tersebut, solusi yang dilakukan adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.36.**

**Solusi Permasalahan SPM Bidang Sosial  
Kabupaten Lamongan Tahun 2024**

No	Aspek	Permasalahan
1	Pengumpulan Data	Dilakukan koordinasi dan sinkronisasi yang baik antar operator program dan kegiatan pada masing-masing Bidang
2	Perhitungan Kebutuhan	Koordinasi dengan berbagai OPD terkait
3	Perencanaan dan Penganggaran	Identifikasi dan usulan prioritas untuk mendapatkan dukungan dana dan fasilitas
4	Pelaksanaan	Penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya dan manajemen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lamongan; Penerapan prinsip nilai (transparansi, keterbukaan dan akuntabilitas) tata kelola pemerintahan yang baik ( <i>good governance</i> ) dalam pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Lamongan; Peningkatan kualitas pelayanan publik Dinas Sosial Kabupaten Lamongan; Identifikasi, intensifikasi dan ekstensifikasi tantangan dan potensi Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, dengan berbasis data yang valid dan <i>update</i> ; Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial; Sosialisasi kepada sektor swasta dan masyarakat tentang kebijakan, program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Lamongan;



No	Aspek	Permasalahan
		Pembinaan, pemberdayaan dan pendayagunaan sektor swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
5.	Lainnya	-

Sumber : Data Dinas Sosial Kab. Lamongan, 2024 (diolah)

#### 4.7. PROGRAM DAN KEGIATAN

Adapun berbagai proram dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah sebagai berikut:

##### 1. Urusan Pendidikan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Lamongan telah terintegrasi dalam program prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan tahun 2021-2024. Urusan wajib Bidang Pendidikan, juga sudah terintegrasi dalam program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Lamongan dimaksud, yaitu PERINTIS atau pendidikan berkualitas dan gratis bagi masyarakat kurang mampu. Adapun berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan pada tahun ini adalah sebagai berikut:

##### a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Jenis Pelayanan Dasar dimaksud didukung kegiatan dan sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM PAUD
  - a. Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
  - b. Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun;
  - c. Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;



- d. Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa.
2. Kegiatan Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Layanan Satuan
  - a. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
  - b. Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
  - c. Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran;
  - d. Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
  - e. Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak.
3. Pemenuhan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PAUD)
  - a. Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemenuhan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PAUD)
  - a. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan;
  - b. Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
  - c. Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak.

#### **b. Pendidikan Dasar**

Jenis Pelayanan Dasar dimaksud didukung kegiatan dan sub kegiatan yaitu:



1. Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs)
  - a) Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah;
  - b) Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus;
  - c) Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung.
2. Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Hasil Belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/MTs)
  - a) Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut;
  - b) Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru.
3. Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Layanan (SD/SMP/MI/MTs)
  - a) Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
  - b) Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
  - c) Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat;
  - d) Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran.
4. Pemenuhan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SD/SMP/)



- a) Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
  - b) Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan;
  - c) Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d) Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif;
  - e) Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah;
  - f) Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah;
  - g) Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan .
5. Pemenuhan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SD/SMP)
- a) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan
  - b) Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
  - c) Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak



### **c. Pendidikan Kesetaraan**

Jenis Pelayanan Dasar dimaksud didukung kegiatan dan sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM (Kesetaraan)
  - a. Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah;
  - b. Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus.
2. Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Hasil Belajar Peserta Didik (Kesetaraan)
  - a. Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut;
  - b. Pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru.
3. Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Layanan (Kesetaraan)
  - a. Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
  - b. Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat.
4. Pemenuhan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan)
  - a. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan;
  - b. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

Selain itu, berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan dalam penerapan Standar



Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan tersebut didukung berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan
  - a. Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
  - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
  - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Pengembangan Kurikulum
  - a. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar;
  - b. Penetapan Kurikulum muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
  - a. Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

## 2. Urusan Kesehatan

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pelayanan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan. Adapun program dan kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

### Program Kegiatan Bidang Pelayanan Kesehatan Kabupaten Lamongan Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.131.655.100



No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	254.000.000
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	10.000.000
4	Pelayanan kesehatan balita	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1.373.991.350
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	968.486.000
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	843.114.800
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	746.568.900
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	10.000.000
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	10.000.000
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	293.160.200
11	Pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	368.492.900
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi Human	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	189.438.500



No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
	Immundeficiency Virus)			

Sumber : Data Dinas Kesehatan Kab. Lamongan, 2024 (diolah)

### 3. Urusan Pekerjaan Umum

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada unit kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

#### 1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Daftar Kegiatan :

##### a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

Daftar Sub Kegiatan :

- 1) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
- 2) Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM
- 3) Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
- 4) Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

#### 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Daftar Kegiatan :

##### a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

Daftar Sub Kegiatan :

- 1) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota



- 3) Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik
  - 4) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
3. Program Pembangunan Perumahan :
- Daftar Kegiatan :
- a. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- Daftar Sub Kegiatan :
- 1) Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
- b. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- Daftar Sub Kegiatan :
- 1) Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
- c. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- Daftar Sub Kegiatan:
- 1) Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana

#### **4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada unit kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- Daftar Kegiatan :
- a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
- Daftar Sub Kegiatan :
- 1) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM



- 2) Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM
  - 3) Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
  - 4) Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- Daftar Kegiatan :
- a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Daftar Sub Kegiatan :
- 1) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - 2) Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota
  - 3) Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik
  - 4) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
3. Program Pembangunan Perumahan :
- Daftar Kegiatan :
- a. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- Daftar Sub Kegiatan :
- 1) Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
- b. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- Daftar Sub Kegiatan :
- 1) Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana



- c. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

Daftar Sub Kegiatan :

- 1) Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana

## 5. **UrusanTrantibumlinmas**

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan.

### **Satpol PP**

Berikut adalah Program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan Tahun 2024 sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2024 :

1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan kegiatan:
  - a) Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
    - 1) Pencegahan Angguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan
    - 2) Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
    - 3) Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
    - 4) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum



- 5) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
  - 6) Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - 7) Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada
- b) Penengakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- 1) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota
  - 2) Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota
  - 3) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota
2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, dengan kegiatan :
- a) Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
    - 1) Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
    - 2) Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
    - 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
  - b) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
    - 1) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat



## **BPBD**

Program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2024 :

- 1) Program Penanggulangan Bencana
  - a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
    1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
    2. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Perjenis Bencana)
  - b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
    1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
    2. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
    3. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
    4. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
    5. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
  - c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
    1. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
    2. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
    3. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
  - d. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
    1. Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
    2. Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
    3. Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota



## 6. Urusan Sosial

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pelayanan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lamongan. Adapun program dan kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti  
Jenis Pelayanan Dasar dimaksud didukung program dan kegiatan yaitu:
  - a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
    - (1).Penyediaan Permakanan;
    - (2).Penyediaan Sandang
    - (3).Penyediaan Alat Bantu
    - (4).Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
    - (5).Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
    - (6).Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Terlantar
    - (7).Fasilitas Pembuatan NIK, Akta Kelahiran, dan KIA
    - (8).Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
    - (9).Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
    - (10).Pemberian Layanan Kedaruratan
    - (11).Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
    - (12).Pelayanan Rujukan
  - b. Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Perorangan (ASPD);
  - c. Program Keluarga Harapan (PKH), Program Keluarga Harapan Jaminan Sosial Lanjut Usia (PKH Plus Jaslut), Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN)
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti



Jenis Pelayanan Dasar dimaksud didukung program dan kegiatan yaitu:

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
    - (1). Penyediaan Permakanan;
    - (2). Penyediaan Sandang
    - (3). Penyediaan Alat Bantu
    - (4). Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga
    - (5). Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
    - (6). Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Terlantar
    - (7). Fasilitas Pembuatan NIK, Akta Kelahiran, dan KIA
    - (8). Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
    - (9). Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
    - (10). .Pemberian Layanan Kedaruratan
    - (11). Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
    - (12). Pelayanan Rujukan
  - b. Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN)
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti
- Jenis Pelayanan Dasar dimaksud didukung program dan kegiatan yaitu:
- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
    - (1). Penyediaan Permakanan;
    - (2). Penyediaan Sandang
    - (3). Penyediaan Alat Bantu
    - (4). Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga
    - (5). Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial



- (6). Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Terlantar
  - (7). Fasilitas Pembuatan NIK, Akta Kelahiran, dan KIA
  - (8). Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
  - (9). Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
  - (10). Pemberian Layanan Kedaruratan
  - (11). Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
  - (12). Pelayanan Rujukan
- b. Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN)
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis di Luar Panti
- Jenis Pelayanan Dasar dimaksud didukung program dan kegiatan yaitu: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
- (1). Penyediaan Permakanan;
  - (2). Penyediaan Sandang
  - (3). Penyediaan Alat Bantu
  - (4). Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga
  - (5). Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
  - (6). Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Terlantar
  - (7). Fasilitas Pembuatan NIK, Akta Kelahiran, dan KIA
  - (8). Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
  - (9). Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
  - (10). Pemberian Layanan Kedaruratan
  - (11). Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
  - (12). Pelayanan Rujukan



5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota

Jenis Pelayanan Dasar dimaksud didukung program dan kegiatan yaitu:

- a. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
  - (1) Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana;
  - (2) Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana;
  - (3) Cadangan beras Pemerintah untuk korban bencana.
- b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Pemulangan Warga Negara Migran Kota Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota Untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

Selain itu, berbagai program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Lamongan dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial tersebut didukung berbagai program dan kegiatan penunjang sebagai berikut:

- a. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
  - (1). Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
  - (2). Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
  - (3). Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
  - (4). Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
  - (5). Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)



- b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)  
Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
  - (1). Pemberian Layanan Data dan Pengaduan;
  - (2). Pemberian Layanan Kedaruratan;
  - (3). Penyediaan Permakanan
- c. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
  - (1). Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
  - (2). Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
  - (3). Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
  - (4). Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lamongan adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah selama 1 tahun anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat (1).

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2024 memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri atas Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu Capaian Kinerja Makro, Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, dan Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (SAKIP), selain substansi tersebut LPPD juga memuat laporan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan.

Dari hasil kinerja yang dilaporkan pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2024, dapat disimpulkan bahwa dalam pembangunan yang telah dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan, pada umumnya dinilai berjalan dengan baik dan lancar.

Hasil pembangunan di Kabupaten Lamongan pada hakekatnya merupakan hasil sinergi dari kinerja eksekutif, legislatif, masyarakat dan dunia usaha. Keberhasilan pembangunan tersebut, tidak terlepas dari itikad baik, kerja keras, kreativitas, dan inovasi dari semua pihak yang memiliki keterkaitan fungsi sesuai dengan bidang tugas dan usahanya masing-masing khususnya DPRD Kabupaten Lamongan, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Sosial Politik, Lembaga Profesi, Perguruan Tinggi, Tokoh-Tokoh Agama, Insan Pers, dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Lamongan lainnya.



Hasil pembangunan yang telah dicapai pada tahun 2024, tentunya masih perlu untuk ditingkatkan kembali agar apa yang menjadi target dan sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026 dapat dicapai dan dilaksanakan. Terhadap berbagai kekurangan, kelemahan dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2024 akan dilakukan evaluasi untuk dapat dijadikan acuan bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lamongan ini dapat menjadi bahan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk memberikan catatan-catatan sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan pembangunan kedepan di Kabupaten Lamongan guna mewujudkan masyarakat Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing.

Lamongan ,           Maret 2025

**BUPATI LAMONGAN**

**Dr. YUHRONUR EFENDI., MBA., M.Ek.**

## LAMPIRAN I

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	PEMDA	
				Capaian	Keterangan
1.a.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	96,476383	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan dini dianggap belum penting dan belum wajib</li> <li>2. Banyak yang berdomisili diluar kabupaten Lamongan tetapi masih belum mengurus surat pindah</li> </ol>
1.a.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	99,660735	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lingkungan keluarga (adanya konflik rumah tangga)</li> <li>2. Anak berkebutuhan khusus (kurangnya fasilitas pendidikan untuk ABK terutama tenaga Guru)</li> <li>3. Banyak anak yang ada di pondok pesantren yang datanya tidak masuk di Dapodik</li> <li>4. Banyak yang berdomisili</li> </ol>

1.a.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	99,526017	1. Lingkungan keluarga (adanya konflik rumah tangga)2. Anak berkebutuhan khusus (kurangnya fasilitas pendidikan untuk ABK terutama tenaga Guru)3. Faktor Ekonomi Keluarga (masih usia sekolah SMP yang membantu orang tuanya bekerja terutama nelayan)4.
-------	-----------------------------------------------------	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.a.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang&nbsp;berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	19,381658	1. Faktor ekonomi keluarga (Banyak anak yang membantu orang tua bekerja) 2. sudah ada yang berumah tangga 3. Memilih melanjutkan pendidikan di pondok pesantren 4. Banyak yang sudah tidak berdomisili di kabupaten Lamongan 5. Anak Berkebutuhan Khusus (
1.b.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	1,3717512	
1.b.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100	
1.b.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	
1.b.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	
1.b.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	















2.j.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	12	
2.k.1.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP elektronik	98,91116 1	
2.k.1.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	65,45864 8	
2.k.1.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepemilikan akta kelahiran	98,92000 8	
2.k.1.4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	39,0625	
2.l.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	100	
2.l.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	100	









3.b.2	Urusan Pilihan	Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	-10,62866	Kunjungan wisatawan menurun salah satunya dikarenakan kondisi perekonomian/daya beli masyarakat menurun sehingga masyarakat lebih memilih untuk membeli kebutuhan pokok dibanding liburan
3.b.3	Urusan Pilihan	Pariwisata	Tingkat hunian akomodasi	24,03216 2	
3.b.4	Urusan Pilihan	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	1,882871 6	
3.b.5	Urusan Pilihan	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	95,48467 6	
3.c.1	Urusan Pilihan	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	751,4805 8	
3.c.2	Urusan Pilihan	Pertanian	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persentase kasus zoonosis kab/kota	96,72131 2	
3.d	Urusan Pilihan	Kehutanan		100	tidak memiliki kewenangan

3.e	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota &nbsp;	0	tidak ada perusahaan yang bekerja dibidang pemanfaatan panas bumi
3.f.1	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) &nbsp;	100	
3.f.2	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase kinerja realisasi pupuk &nbsp;	85,27532 2	
3.f.3	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase alat &ndash; alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku &nbsp;	64,24305 8	
3.g.1	Urusan Pilihan	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota &nbsp;	2,156808 8	
3.g.2	Urusan Pilihan	Perindustrian	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	1613,54	
3.g.3	Urusan Pilihan	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	15,68627 5	









LAPORAN  
PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN  
DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN  
LAMONGAN